



PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2026
TENTANG
STANDAR BIAYA KELUARAN DALAM PENGANGGARAN KEMENTERIAN
NEGARA/LEMBAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 10 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran dan Pasal 47 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Keluaran dalam Penganggaran Kementerian Negara/Lembaga;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Pasal 7 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6850);

5. Peraturan Presiden Nomor 158 Tahun 2024 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 354);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 472) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1088);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1063) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1208);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG STANDAR BIAYA KELUARAN DALAM PENGANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA.

Pasal 1

Standar Biaya Keluaran yang selanjutnya disingkat SBK adalah indeks biaya yang ditetapkan untuk menghasilkan 1 (satu) volume keluaran.

Pasal 2

- (1) SBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 meliputi:
 - a. SBK umum; dan
 - b. SBK khusus.
- (2) SBK umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan SBK yang berlaku untuk:
 - a. lebih dari 1 (satu); atau
 - b. seluruh,kementerian negara/lembaga.
- (3) SBK khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan SBK yang berlaku untuk 1 (satu) kementerian negara/lembaga.

Pasal 3

- (1) SBK umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) SBK khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (3) Rincian indeks SBK umum dan SBK khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Pasal 4

- (1) Kementerian negara/lembaga menggunakan SBK umum dan SBK khusus dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga baik dalam perencanaan maupun pelaksanaan anggaran.
- (2) Penggunaan SBK umum dan SBK khusus bersifat batas tertinggi yang tidak dapat dilampaui.
- (3) Dalam hal terdapat kebutuhan kementerian negara/lembaga untuk melampaui besaran biaya SBK umum dan SBK khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), kementerian negara/lembaga mengajukan permintaan pelampauan besaran biaya SBK umum dan SBK khusus kepada Menteri Keuangan.
- (4) Menteri Keuangan melimpahkan kewenangan dalam bentuk mandat kepada Direktur Jenderal Anggaran untuk menindaklanjuti permintaan pelampauan besaran biaya SBK umum dan SBK khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Direktur Jenderal Anggaran atas nama Menteri Keuangan dapat menyetujui permintaan pelampauan besaran biaya SBK umum dan SBK khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dengan pertimbangan sebagai berikut:
- a. harga pasar;
 - b. prinsip ekonomis, efisien, dan efektif; dan/atau
 - c. perubahan tahapan.
- (6) Dalam hal permintaan pelampauan besaran biaya SBK umum dan SBK khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetujui, Direktur Jenderal Anggaran atas nama Menteri Keuangan menyampaikan surat persetujuan kepada kementerian negara/lembaga untuk melakukan revisi anggaran.
- (7) Dalam hal permintaan pelampauan besaran biaya SBK umum dan SBK khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak disetujui, Direktur Jenderal Anggaran atas nama Menteri Keuangan menyampaikan surat penolakan kepada kementerian negara/lembaga pengusul.

Pasal 5

Pengawasan atas penggunaan SBK umum dan SBK khusus dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah kementerian negara/lembaga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Penggunaan SBK umum dan SBK khusus berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran serta akuntansi dan pelaporan keuangan.

Pasal 7

Ketentuan dalam Peraturan Menteri ini digunakan untuk penyusunan rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga mulai tahun anggaran 2026.

Pasal 8

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Januari 2026

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,



PURBAYA YUDHI SADEWA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR

LAMPIRAN I
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 3 TAHUN 2026
 TENTANG STANDAR BIAYA KELUARAN DALAM
 PENGANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

| Kode BA/Unit/Program/ Kegiatan/KRO/RO | Uraian |
|--|---|
| 2 | 3 |
| | 1. SBK Layanan Perencanaan dan Penganggaran |
| XXXX.EBD.XXX | Layanan Perencanaan dan Penganggaran |
| | 2. SBK Layanan Pelatihan |
| | <i>a. Layanan Pelatihan Struktural Kepemimpinan</i> |
| XXXX.EBC.XXX | 1) Layanan Pelatihan Struktural Kepemimpinan Pratama |
| XXXX.EBC.XXX | 2) Layanan Pelatihan Struktural Kepemimpinan Pratama (Blended Learning) |
| XXXX.EBC.XXX | 3) Layanan Pelatihan Struktural Kepemimpinan Administrator |
| XXXX.EBC.XXX | 4) Layanan Pelatihan Struktural Kepemimpinan Administrator (Blended Learning) |
| XXXX.EBC.XXX | 5) Layanan Pelatihan Struktural Kepemimpinan Pengawas |
| XXXX.EBC.XXX | 6) Layanan Pelatihan Struktural Kepemimpinan Pengawas (Blended Learning) |
| | <i>b. Layanan Pelatihan Dasar/Prajabatan</i> |
| XXXX.EBC.XXX | 1) Layanan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil |
| XXXX.EBC.XXX | 2) Layanan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (Blended Learning) |
| XXXX.EBC.XXX | 3) Layanan Pelatihan Prajabatan Kategori 1 dan Kategori 2 |
| | 3. SBK Layanan Audit Internal |
| XXX.EBD.XXX | a. Layanan Audit Internal Dalam Perkantoran yang Sama |
| XXX.EBD.XXX | b. Layanan Audit Internal Dalam Kota |
| XXX.EBD.XXX | c. Layanan Audit Internal Luar Provinsi |
| | 4. SBK Pemantauan dan Evaluasi |
| XXXX.EBD.XXX | a. Layanan Pemantauan dan Evaluasi untuk Satker Koordinator |
| XXXX.EBD.XXX | b. Layanan Pemantauan dan Evaluasi untuk Satker Vertikal |
| XXXX.FAE/UAE.XXX | c. Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan |
| | 5. SBK Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi |
| XXXX.EBA.XXX | a. Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi untuk Satker Koordinator |
| XXXX.EBA.XXX | b. Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi untuk Satker Vertikal |
| | 6. SBK Layanan Bantuan Hukum |
| XXXX.EBA.XXX | a. Layanan Bantuan Hukum Pegawai |
| XXXX.EBA.XXX | b. Layanan Bantuan Hukum Institusi |
| | 7. SBK Layanan Barang Milik Negara (BMN) |
| XXXX.EBA.XXX | a. Layanan BMN untuk Satker Koordinator |
| XXXX.EBA.XXX | b. Layanan BMN untuk Satker Vertikal |
| | 8. SBK Layanan Manajemen Kinerja |
| XXXX.EBD.XXX | a. Layanan Manajemen Kinerja untuk Satker Koordinator |
| XXXX.EBD.XXX | b. Layanan Manajemen Kinerja untuk Satker Vertikal |
| | 9. SBK Layanan Manajemen Keuangan |
| XXXX.EBD.XXX | a. Layanan Manajemen Keuangan untuk Satker Koordinator |
| XXXX.EBD.XXX | b. Layanan Manajemen Keuangan untuk Satker Vertikal |
| | 10. SBK Layanan Manajemen Sumber Daya Manusia |

| Kode BA/Unit/Program/ Kegiatan/KRO/RO | Uraian |
|--|--|
| 2 | 3 |
| XXXX.EBC.XXX | a. Layanan Manajemen SDM lingkup Kementerian/Lembaga tanpa satker vertikal dan tanpa UPT |
| XXXX.EBC.XXX | b. Layanan Manajemen SDM lingkup kementerian/lembaga yang memiliki satker vertikal/ memiliki UPT di daerah Kategori Kecil |
| XXXX.EBC.XXX | c. Layanan Manajemen SDM lingkup kementerian/lembaga yang memiliki satker vertikal/ memiliki UPT di daerah Kategori Sedang |
| XXXX.EBC.XXX | d. Layanan Manajemen SDM lingkup kementerian/lembaga yang memiliki satker vertikal/ memiliki UPT di daerah Kategori Besar |
| | 11. SBK Layanan Hukum |
| XXXX.EBA.XXX | Layanan Hukum |
| | 12. SBK Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal |
| XXXX.EBA.XXX | Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal |
| | 13. SBK Layanan Penyelenggaraan Kearsipan |
| XXXX.EBD.XXX | a. Layanan Penyelenggaraan Kearsipan untuk Satker Koordinator |
| XXXX.EBD.XXX | b. Layanan Penyelenggaraan Kearsipan untuk Satker Vertikal |
| | 14. SBK Layanan Reformasi Kinerja |
| XXXX.EBD.XXX | a. Layanan Reformasi Kinerja untuk Satker Koordinator |
| XXXX.EBD.XXX | b. Layanan Reformasi Kinerja untuk Satker Vertikal |
| | 15. SBK Rancangan Standar Nasional Indonesia 3 (RSNI3) |
| XXXX.ADA.XXX | a. RSNI3 dengan Metode Pengembangan Sendiri |
| XXXX.ADA.XXX | b. RSNI3 dengan Metode Adopsi Modifikasi |
| XXXX.ADA.XXX | c. RSNI3 dengan Metode Adopsi Identik Terjemahan |
| XXXX.ADA.XXX | d. RSNI3 dengan Metode Adopsi Republikasi- <i>Reprint</i> |
| | 16. SBK Riset dan Inovasi |
| XXXX.DDD/SDD.XXX | a. Kekayaan Intelektual Hasil Riset dan Inovasi |
| XXXX.DDB/SDB.XXX | b. Purwarupa Hasil Riset dan Inovasi |
| XXXX.DDC/SDC.XXX | c. Model Hasil Riset dan Inovasi |
| XXXX.ABA-ABW.XXX | d. Publikasi Bereputasi Global Hasil Riset dan Inovasi |
| XXXX.PBA-PBW.XXX | e. Publikasi Bereputasi Nasional Hasil Riset dan Inovasi |
| XXXX.ABA-ABW.XXX | f. Naskah Kebijakan Hasil Riset dan Inovasi |
| XXXX.PBA-PBW.XXX | |
| | 17. SBK Naskah/ Kebijakan Aktual Strategis |
| XXXX.ABA-ABW.XXX | Naskah/Rekomendasi Kebijakan Aktual Strategis |
| XXXX.PBA-PBW.XXX | |
| | 18. SBK Peraturan Menteri/Pimpinan Lembaga |
| XXXX.AAG/PAG.XXX | a. Peraturan Menteri/Pimpinan Lembaga yang bersifat Internal |
| XXXX.AAG/PAG.XXX | b. Peraturan Menteri/Pimpinan Lembaga yang bersifat Eksternal |
| | 19. SBK Peraturan Presiden |
| XXXX.AAD/PAD.XXX | a. Peraturan Presiden yang Bersifat Sederhana |
| XXXX.AAD/PAD.XXX | b. Peraturan Presiden yang Bersifat kompleks |
| | 20. SBK Peraturan Pemerintah |
| XXXX.AAC/PAC.XXX | a. Peraturan Pemerintah yang Bersifat Sederhana |
| XXXX.AAC/PAC.XXX | b. Peraturan Pemerintah yang Bersifat Kompleks |
| | 21. SBK Rancangan Undang-Undang |

| Kode BA/Unit/Program/ Kegiatan/KRO/RO | Uraian |
|--|---|
| 2 | 3 |
| XXXX.AAA/PAA.XXX | a. Rancangan Undang-Undang Bersifat Sederhana |
| XXXX.AAA/PAA.XXX | b. Rancangan Undang-Undang Bersifat Kompleks |
| | 22. SBK Peraturan Lainnya |
| XXXX.AAH/PAH.XXX | Peraturan Lainnya |
| | 23. SBK Sosialisasi dan Diseminasi |
| XXXX.AEF/PEF.XXX | Sosialisasi dan Diseminasi |

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

PURBAYA YUDHI SADEWA

PENJELASAN SBK UMUM

A. Ketentuan Umum SBK Umum (SBKU)

1. Klasifikasi Rincian *Output* (KRO) adalah kumpulan atas rincian *output* yang disusun dengan mengelompokkan muatan rincian *output* yang sejenis atau serumpun berdasarkan sektor/bidang/jenis tertentu secara sistematis.
2. Rincian *Output* (RO) merupakan keluaran riil yang dihasilkan oleh unit kerja Kementerian Negara/Lembaga (K/L) yang berfokus pada isu tertentu serta berkaitan langsung dengan tugas dan fungsi unit kerja tersebut dalam mendukung pencapaian sasaran kegiatan yang telah ditetapkan.
3. KRO dan RO mengacu pada pedoman penyusunan dan pemanfaatan klasifikasi rincian output dan rincian output dalam perencanaan dan penganggaran yang ditetapkan bersama oleh Direktur Jenderal yang membidangi anggaran pada Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang keuangan dan Deputi yang membidangi pembiayaan dan investasi pembangunan pada Kementerian yang menyelenggaran urusan pemerintah di bidang perencanaan pembangunan nasional.
4. Satuan Kerja Koordinator adalah satuan kerja pada tingkat unit Eselon I atau yang setara, atau pada tingkat Kementerian Negara/Lembaga, yang memiliki tugas untuk mengoordinasikan penyusunan dan pemanfaatan keluaran bagi satker vertikal dalam Aplikasi SAKTI.
5. Satuan Kerja Vertikal adalah unit organisasi lini pada Kementerian Negara/Lembaga yang berada langsung di bawah unit eselon I, berkedudukan di luar kantor pusat, serta memiliki kewenangan serta tanggung jawab dalam penggunaan anggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Penuangan Volume RO pada SBKU dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. SBKU yang menggunakan satuan layanan dibatasi maksimal 1 (satu) volume.
 - b. Dalam hal satker Koordinator:
 - 1) memiliki satker anggaran dibawahnya;
 - 2) menggunakan Jenis RO Dukungan Manajemen Internal dengan satuan layanan; dan
 - 3) pengalokasian anggarannya dilakukan secara terpusat; jumlah volume SBKU berdasarkan jumlah satuan kerja yang dikelola dengan menggunakan besaran SBKU yang berlaku pada satuan kerja vertikal, sepanjang tidak duplikasi dengan alokasi pada RO yang sama pada satker anggaran dibawahnya.
 - c. SBKU yang menggunakan satuan selain layanan, menggunakan volume sesuai kebutuhan.
7. Untuk komponen/tahapan dalam pencapaian suatu Keluaran (*output*) pada SBKU dapat menggambarkan pelaksanaan fungsi manajemen yang terdiri dari:
 - a. perencanaan (*planning*);
 - b. pengorganisasian (*organizing*);
 - c. pelaksanaan (*actuating*); dan

- d. monitoring, evaluasi, dan pelaporan (*controlling*).

B. Standar Biaya Keluaran Umum

1. SBK Layanan Perencanaan dan Penganggaran

SBK layanan perencanaan dan penganggaran merupakan besaran biaya yang ditetapkan untuk layanan perencanaan dan penganggaran untuk internal Kementerian/Lembaga hanya pada Biro Perencanaan atau unit yang menangani perencanaan dan penganggaran di tingkat Kementerian/Lembaga, termasuk di dalamnya layanan penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja serta Rencana Kerja dan Anggaran pada Kementerian/Lembaga tersebut.

2. SBK Layanan Pelatihan

SBK Layanan pelatihan merupakan besaran biaya yang ditetapkan untuk layanan pelatihan yang diperuntukan bagi SDM aparatur internal K/L. SBK layanan pelatihan meliputi:

a. SBK Layanan Pelatihan Struktural Kepemimpinan

SBK Layanan Pelatihan Struktural Kepemimpinan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pelatihan penjenjangan bagi pejabat/pegawai yang telah menduduki jabatan tertentu yang terdiri dari pelatihan struktural kepemimpinan pratama, pelatihan struktural kepemimpinan administrator, dan pelatihan struktural kepemimpinan pengawas. Satuan biaya ini tidak termasuk:

- 1) biaya perjalanan dinas peserta *on campus*; dan
- 2) biaya perjalanan dinas mentor pada saat seminar rancangan proyek perubahan dan seminar proyek perubahan, dan pajak (PPh Pasal 20).

b. SBK Layanan Pelatihan Dasar/Prajabatan

SBK Layanan Pelatihan Dasar/Prajabatan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pelatihan bagi calon pegawai negeri sipil sebagai syarat pengangkatan sebagai pegawai negeri sipil yang terdiri dari pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil, dan pelatihan prajabatan kategori 1 (satu) dan kategori 2 (dua). Satuan biaya ini tidak termasuk:

- 1) biaya perjalanan dinas peserta *on campus*; dan
- 2) biaya perjalanan dinas mentor pada saat seminar rancangan proyek perubahan dan seminar proyek perubahan, dan pajak (PPh Pasal 20).

Pelatihan dengan *blended learning* dilakukan dengan memadukan proses pembelajaran tatap muka di dalam kelas dengan proses pembelajaran secara daring.

3. SBK Layanan Audit Internal

SBK layanan audit internal merupakan penyusunan kebijakan dan SOP pengawasan internal, pelaksanaan audit, tindak lanjut audit, reviu, pembinaan pengawasan kinerja dan penyusunan laporan. Penggunaan SBK ini mengacu pada ketentuan sebagai berikut:

a. SBK Layanan Audit Internal Dalam Perkantoran yang Sama

SBK Layanan Audit Internal dalam perkantoran yang sama merupakan besaran biaya yang ditetapkan untuk pelaksanaan audit internal atas objek pemeriksaan yang berlokasi pada perkantoran yang sama dengan satuan kerja penyelenggara audit.

b. SBK Layanan Audit Internal Dalam Kota

SBK Layanan Audit Internal Dalam Kota merupakan besaran biaya yang ditetapkan untuk pelaksanaan audit internal atas objek pemeriksaan yang berlokasi dalam kota yang sama dengan satuan kerja penyelenggara audit.

c. SBK Layanan Audit Internal Luar Provinsi

SBK Layanan Audit Internal Luar Provinsi merupakan besaran biaya yang ditetapkan untuk pelaksanaan audit internal atas objek pemeriksaan yang berlokasi di provinsi yang berbeda dengan satuan kerja penyelenggara audit.

4. SBK Pemantauan dan Evaluasi

SBK Pemantauan dan Evaluasi merupakan besaran biaya yang digunakan untuk pemantauan, pengamatan, pencatatan, pemonitoran, penilaian serta pelaporan atas pelaksanaan fungsi dan tugas pemerintahan. Penggunaan SBK ini mengacu pada ketentuan sebagai berikut:

a. SBK Layanan Pemantauan dan Evaluasi untuk Satker Koordinator

SBK Layanan Pemantauan dan Evaluasi untuk Satker Koordinator merupakan SBK Layanan Pemantauan dan Evaluasi yang digunakan oleh satker unit organisasi lini kementerian/lembaga setingkat yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran dan dipimpin oleh pejabat eselon I/settingkat pada Program Dukungan Manajemen.

b. SBK Layanan Pemantauan dan Evaluasi untuk Satker Vertikal

SBK Layanan Pemantauan dan Evaluasi untuk satker vertikal merupakan SBK Layanan Pemantauan dan Evaluasi yang digunakan oleh satker vertikal pada Program Dukungan Manajemen.

c. SBK Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan

SBK Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan merujuk pada layanan pemantauan, pengamatan, pencatatan, pemonitoran, penilaian serta pelaporan dalam rangka menjalankan fungsi dan tugas pemerintahan pada Program Teknis dan Program Lintas.

5. SBK Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi

SBK Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi merupakan besaran biaya yang digunakan untuk layanan yang berkaitan dengan: 1) Perumusan kebijakan di bidang hubungan masyarakat dan informasi; 2) Pengumpulan data dan informasi mengenai pendapat, sikap, dan kegiatan masyarakat terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah; 3) Publikasi dan dokumentasi kebijakan pemerintah; 4) Pelayanan

informasi kebijakan dan kegiatan pemerintah. Penggunaan SBK ini mengacu pada ketentuan sebagai berikut:

- a. SBK Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi untuk Satker Koordinator

SBK layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi untuk Satker Koordinator merupakan SBK Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi yang digunakan oleh satker unit organisasi lini kementerian/lembaga setingkat yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran dan dipimpin oleh pejabat eselon I/settingkat.

- b. SBK Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi untuk Satker Vertikal

SBK Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi untuk satker vertikal merupakan SBK Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi yang digunakan oleh satker vertikal.

6. SBK Layanan Bantuan Hukum

SBK Layanan Bantuan Hukum merupakan besaran biaya yang digunakan untuk layanan dalam menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/ atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum yang diberikan kepada Internal K/L. Penggunaan SBK ini mengacu pada ketentuan sebagai berikut:

- a. SBK Layanan Bantuan Hukum Pegawai

SBK Layanan Bantuan Hukum Pegawai merupakan SBK Layanan Bantuan Hukum yang diberikan kepada pegawai.

- b. SBK Layanan Bantuan Hukum Institusi

SBK Layanan Bantuan Hukum Institusi merupakan SBK Layanan Bantuan Hukum yang diberikan kepada institusi.

7. SBK Layanan Barang Milik Negara (BMN)

SBK layanan BMN merupakan besaran biaya yang ditetapkan untuk menghasilkan keluaran berupa layanan yang dilaksanakan dalam rangka penatausahaan, penilaian, pengalihan, monitoring dan penyusunan laporan BMN. Penggunaan SBK ini mengacu pada ketentuan sebagai berikut:

- a. SBK Layanan BMN untuk Satker Koordinator

SBK layanan BMN untuk Satker Koordinator merupakan SBK Layanan BMN yang digunakan oleh satker unit organisasi lini kementerian/lembaga setingkat yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran dan dipimpin oleh pejabat eselon I/settingkat.

- b. SBK Layanan BMN untuk Satker Vertikal

SBK Layanan BMN untuk satker vertikal merupakan SBK Layanan BMN yang digunakan oleh satker vertikal.

8. SBK Layanan Manajemen Kinerja

SBK Layanan Manajemen Kinerja merupakan besaran biaya yang digunakan untuk menghasilkan keluaran berupa Layanan manajemen kinerja organisasi serta penyusunan laporan kinerja yang bersifat reguler/rutin. Penggunaan SBK ini mengacu pada ketentuan sebagai berikut:

a. SBK Layanan Manajemen Kinerja untuk Satker Koordinator

SBK Layanan Manajemen Kinerja untuk Satker Koordinator merupakan SBK Layanan Manajemen Kinerja untuk digunakan oleh satker unit organisasi lini kementerian/lembaga yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran dan dipimpin oleh pejabat Eselon I/Setingkat.

b. SBK Layanan Manajemen Kinerja untuk Satker Vertikal

SBK Layanan Manajemen Kinerja untuk satker vertikal merupakan SBK Layanan Manajemen Kinerja untuk digunakan oleh satker vertikal.

9. SBK Layanan Manajemen Keuangan

SBK Layanan Manajemen Keuangan merupakan besaran biaya yang digunakan untuk menghasilkan keluaran berupa Layanan Manajemen Keuangan adalah layanan yang merujuk pada pengelolaan atas fungsi-fungsi keuangan meliputi namun tidak terbatas pada kegiatan perencanaan, penganggaran, pemeriksaan, pengelolaan, pengendalian, pencarian dan penyimpanan dana yang dimiliki oleh organisasi. Penggunaan SBK ini mengacu pada ketentuan sebagai berikut:

a. SBK Layanan Manajemen Keuangan untuk Satker Koordinator

SBK layanan manajemen keuangan untuk Satker Koordinator merupakan SBK Layanan Manajemen Keuangan yang digunakan oleh satker unit organisasi lini kementerian/lembaga yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran dan dipimpin oleh pejabat eselon I/setingkat.

b. SBK Layanan Manajemen Keuangan untuk Satker Vertikal

SBK Layanan Manajemen Keuangan untuk Satker Vertikal merupakan SBK Layanan Manajemen Keuangan yang digunakan oleh satker vertikal.

10. SBK Layanan Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM)

SBK Layanan Manajemen SDM merupakan besaran biaya yang ditetapkan untuk menghasilkan keluaran berupa layanan pengelolaan SDM, meliputi perencanaan kebutuhan SDM dan karir, pengembangan sistem manajemen SDM, perencanaan dan pelaksanaan pengembangan potensi, kompetensi, dan kapasitas pegawai, serta administrasi kepegawaian. Penggunaan SBK ini mengacu ketentuan sebagai berikut:

a. SBK Layanan Manajemen SDM lingkup Kementerian/Lembaga Tanpa Satker Vertikal di Daerah dan Tanpa UPT

SBK Layanan Manajemen SDM lingkup kementerian/Lembaga tanpa satker vertikal dan tanpa UPT merupakan SBK Layanan Manajemen

SDM untuk pemanfaatan pada kementerian/lembaga tanpa satker vertikal dan tanpa UPT.

- b. SBK Layanan Manajemen SDM lingkup kementerian/lembaga yang memiliki satker vertikal/ memiliki UPT di daerah Kategori Kecil

SBK Layanan Manajemen SDM lingkup kementerian/lembaga yang memiliki satker vertikal/ memiliki UPT di daerah Kategori Kecil merupakan SBK Layanan Manajemen SDM untuk pemanfaatan pada Kementerian/Lembaga dengan jumlah pegawai s.d 3.000 orang yang memiliki satker vertikal/ memiliki UPT di daerah (termasuk mutasi pegawai).

- c. SBK Layanan Manajemen SDM lingkup kementerian/lembaga yang memiliki satker vertikal/ memiliki UPT di daerah Kategori Sedang

SBK Layanan Manajemen SDM lingkup kementerian/lembaga yang memiliki satker vertikal/ memiliki UPT di daerah Kategori Sedang merupakan SBK Layanan Manajemen SDM untuk pemanfaatan pada Kementerian/Lembaga dengan jumlah pegawai 3.000 s.d 10.000 orang yang memiliki satker vertikal/ memiliki UPT di daerah (termasuk mutasi pegawai).

- d. SBK Layanan Manajemen SDM lingkup kementerian/lembaga yang memiliki satker vertikal/ memiliki UPT di daerah Kategori Besar

SBK Layanan Manajemen SDM lingkup kementerian/lembaga yang memiliki satker vertikal/ memiliki UPT di daerah Kategori Besar merupakan SBK Layanan Manajemen SDM untuk pemanfaatan pada Kementerian/Lembaga dengan jumlah pegawai lebih dari 10.000 orang yang memiliki satker vertikal/ memiliki UPT di daerah (termasuk mutasi pegawai).

Besaran alokasi pagu RO Layanan Manajemen Sumber Daya Manusia ditetapkan berdasarkan hasil perkalian antara jumlah pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN)/anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI)/anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dikelola oleh unit atau satuan kerja pengelola anggaran sumber daya manusia, dengan indeks Standar Biaya Keluaran Umum sebagaimana rincian diatas.

11. SBK Layanan Hukum

SBK Layanan Hukum merupakan besaran biaya yang ditetapkan untuk menghasilkan layanan yang merujuk pada keluaran rangkaian kegiatan berupa koordinasi penelaahan dan penyusunan peraturan perundang-undangan hanya pada Biro Hukum atau unit setingkat yang mengoordinasikan dan melaksanakan dukungan perumusan peraturan perundang-undangan di tingkat Kementerian/Lembaga.

12. SBK Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal

SBK Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal merupakan besaran biaya yang ditetapkan untuk menghasilkan Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal merujuk pada layanan yang berkaitan manajemen organisasi, kelembagaan dan tata laksana tingkat Kementerian/Lembaga, hanya pada Biro Organisasi dan Tata Laksana atau unit setingkat yang mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan dan penataan organisasi, kelembagaan dan tata laksana tingkat Kementerian/Lembaga.

13. SBK Layanan Penyelenggaraan Kearsipan

SBK Layanan Penyelenggaraan Kearsipan merupakan besaran biaya yang ditetapkan untuk menghasilkan layanan yang berkaitan dengan kearsipan yaitu rekaman atau dokumentasi kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan. Penggunaan SBK ini mengacu pada ketentuan sebagai berikut:

a. SBK Layanan Penyelenggaraan Kearsipan untuk Satker Koordinator

SBK Layanan Penyelenggaraan Kearsipan untuk Satker Koordinator merupakan SBK Layanan Penyelenggaraan Kearsipan yang digunakan oleh satker unit organisasi lini kementerian/lembaga yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran dan dipimpin oleh pejabat eselon I/settingkat.

b. SBK Layanan Penyelenggaraan Kearsipan untuk Satker Vertikal

SBK Layanan Penyelenggaraan Kearsipan untuk Satker Vertikal merupakan SBK Layanan Penyelenggaraan Kearsipan yang digunakan oleh satker vertikal.

14. SBK Layanan Reformasi Kinerja

SBK Layanan Reformasi Kinerja merupakan besaran biaya yang ditetapkan untuk menghasilkan layanan pelaksanaan reformasi birokrasi, pemantauan dan evaluasi birokrasi dan penyusunan laporan. Penggunaan SBK ini mengacu pada ketentuan sebagai berikut:

a. SBK Layanan Reformasi Kinerja untuk Satker Koordinator

SBK Layanan Reformasi Kinerja untuk Satker Koordinator merupakan SBK Layanan Reformasi Kinerja yang digunakan oleh satker unit organisasi lini kementerian negara/lembaga yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran dan dipimpin oleh pejabat eselon I/settingkat.

b. SBK Layanan Reformasi Kinerja untuk Satker Vertikal

SBK Layanan Reformasi Kinerja untuk Satker Vertikal merupakan SBK Layanan Reformasi Kinerja yang digunakan oleh satker vertikal.

15. SBK Rancangan Standar Nasional Indonesia 3 (RSNI3)

SBK RSNI3 merupakan besaran biaya yang digunakan untuk menghasilkan keluaran berupa Produk RSNI3 yang dihasilkan pada tahap penyusunan, pembahasan konsep sampai dengan tahap konsensus dari Komite Teknis Perumusan Standar Nasional Indonesia (SNI) tingkat kementerian negara/lembaga. Penggunaan SBK ini mengacu pada ketentuan sebagai berikut:

a. RSNI3 yang disusun dengan metode pengembangan sendiri yaitu metode perumusan RSNI3 dengan cara penyusunan sendiri berdasarkan data/hasil penelitian dan menggunakan referensi dokumen acuan yang tertelusur.

- b. RSNI3 yang disusun dengan metode adopsi modifikasi yaitu metode perumusan RSNI3 dengan mengadopsi standar atau publikasi internasional secara modifikasi dengan cara publikasi ulang menggunakan terjemahan bahasa Indonesia mengacu pada bahasa asli standar atau publikasi internasional yang diadopsi.
- c. RSNI3 yang disusun dengan metode adopsi identik terjemahan yaitu metode perumusan RSNI3 dengan mengadopsi standar atau publikasi internasional secara identik dengan cara publikasi ulang menggunakan terjemahan bahasa Indonesia mengacu pada bahasa asli standar atau publikasi internasional yang diadopsi.
- d. RSNI3 yang disusun dengan metode adopsi republikasi-*reprint* yaitu metode perumusan RSNI3 dengan mengadopsi standar atau publikasi internasional secara identik dengan cara publikasi ulang menggunakan bahasa asli standar atau publikasi internasional yang diadopsi.

Dalam penyusunan RSNI3, besaran biaya ditentukan oleh keluaran akhir berupa Produk RSNI3 dan metode perumusan RSNI3 yang dipilih.

16. SBK Riset dan Inovasi

SBK Riset dan Inovasi merupakan besaran biaya yang digunakan untuk kegiatan riset dan inovasi. Riset adalah kegiatan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan/atau penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi. Inovasi adalah hasil pemikiran, penelitian, pengembangan, pengkajian, dan/atau penerapan yang mengandung unsur kebaruan dan telah diterapkan serta memberikan kemanfaatan ekonomi dan/atau sosial. SBK ini meliputi persiapan, penyusunan, seleksi dan penetapan proposal, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, pelaporan dan penilaian keluaran/hasil atas suatu kegiatan riset dan inovasi. SBK riset dan inovasi terdiri dari:

a. Kekayaan Intelektual Hasil Riset dan Inovasi

SBK ini digunakan untuk aktivitas riset dan inovasi dengan output berupa Kekayaan Intelektual. Kekayaan intelektual berupa hak cipta atau *copyright*, paten (*patent*), desain industri (*industrial design*), merek (*trademark*), perlindungan varietas tanaman/ *PVT* (*plant variety protection*)/galur hewan yang dilepaskan, desain tata letak sirkuit terpadu (*layout design of integrated circuit*) dan rahasia dagang (*trade secret*), serta indikasi geografis. Tata cara pemenuhan *output* ditetapkan oleh pimpinan Kementerian Negara/ Lembaga.

b. Purwarupa Hasil Riset dan Inovasi

SBK ini digunakan untuk aktivitas riset dan inovasi dengan output berupa purwarupa. Purwarupa adalah hasil kegiatan riset dan inovasi yang dapat menjadi hasil akhir atau bagian dari hasil akhir sebagai proses pembuktian fungsi yang direncanakan, seperti material untuk produk biologi, material/ spesimen/ jenis kekayaan hayati penambah, material/ spesimen/ jenis kekayaan hayati baru, galur perbaikan, purwarupa laik industri, jenis fauna penangkaran, domestikasi, breeding, temuan senyawa/ *sequence DNA* penambah, temuan senyawa/ *sequence DNA* baru, protokol riset keanekaragaman hayati, jenis benih/ bibit/ varietas/ strain unggul hasil propagasi, domestikasi, breeding, ekstrak temuan baru, alat kesehatan, test kit,

hasil uji produk yang dilakukan di Laboratorium yang sudah terstandardisasi, protokol uji klinis, dataset hasil riset dan inovasi, atau jenis/ bentuk rupa awal (pertama) dari hasil riset dan inovasi yang ditetapkan oleh pimpinan lembaga negara yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang riset dan inovasi. Tata cara pemenuhan output ditetapkan oleh pimpinan Kementerian Negara/Lembaga.

c. Model Hasil Riset dan Inovasi

SBK ini digunakan untuk aktivitas riset dan inovasi dengan *output* berupa Model. Model yang dimaksud di sini dapat berupa konsep, pendekatan, model, kerangka pikir, metode, sistem, strategi, perspektif, peta jalan (*road map*), inovasi sosial tertentu, buku referensi, karya seni monumental, atau jenis/ bentuk lain dari Model dari hasil riset dan inovasi yang ditetapkan oleh pimpinan lembaga negara yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang riset dan inovasi. Tata cara pemenuhan *output* ditetapkan oleh pimpinan Kementerian Negara/Lembaga

d. Publikasi Bereputasi Global Hasil Riset dan Inovasi

SBK ini digunakan untuk aktivitas riset dan inovasi dengan output berupa publikasi bereputasi global. Publikasi bereputasi global adalah publikasi yang diterbitkan/ disebarluaskan dan terindeks global. Ketentuan terindeks global ditetapkan oleh pimpinan lembaga negara yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang riset dan inovasi. Tata cara pemenuhan output ditetapkan oleh pimpinan Kementerian/ Lembaga.

e. Publikasi Bereputasi Nasional Hasil Riset dan Inovasi

SBK ini digunakan untuk aktivitas riset dan inovasi dengan output berupa publikasi bereputasi nasional. Publikasi bereputasi nasional adalah publikasi yang diterbitkan/ disebarluaskan dan terindeks nasional. Ketentuan terindeks secara nasional ditetapkan oleh pimpinan lembaga negara yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang riset dan inovasi. Tata cara pemenuhan *output* ditetapkan oleh pimpinan Kementerian Negara/ Lembaga

f. Naskah Kebijakan Hasil Riset dan Inovasi

SBK ini digunakan untuk menghasilkan keluaran naskah kebijakan dari kegiatan riset terkait dengan hasil akhir berupa naskah kebijakan (Naskah Akademik, Naskah Urgensi, Monograf Kebijakan, Model Kebijakan, atau bentuk lain dari naskah kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan lembaga negara yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang riset dan inovasi). Tata cara pemenuhan *output* ditetapkan oleh pimpinan Kementerian Negara/ Lembaga.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan anggaran penelitian mengacu pada ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pembayaran dan pertanggungjawaban anggaran penelitian atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara.

17. SBK Naskah/Rekomendasi Kebijakan Aktual Strategis

SBK Naskah/Rekomendasi Kebijakan Aktual Strategis merupakan besaran biaya yang digunakan untuk menghasilkan keluaran berupa rekomendasi Kebijakan Bidang tertentu yang merujuk pada kebijakan,

termasuk rekomendasi solusi atau alternatif solusi yang komprehensif dalam menghadapi isu terkait bidang tertentu.

18. SBK Peraturan Menteri/Pimpinan Lembaga

SBK peraturan menteri/pimpinan lembaga merupakan besaran biaya yang digunakan untuk menghasilkan keluaran berupa peraturan yang ditetapkan oleh menteri/kepala badan/kepala lembaga berdasarkan materi muatan dalam rangka penyelenggaraan urusan tertentu dalam pemerintahan. Penggunaan SBK ini mengacu pada ketentuan sebagai berikut:

a. SBK Peraturan Menteri/Pimpinan Lembaga yang Bersifat Internal

SBK peraturan menteri/pimpinan lembaga yang bersifat internal merupakan SBK yang digunakan dalam rangka menghasilkan peraturan menteri/pimpinan lembaga yang penetapannya bersifat mengatur dan mengikat hanya ke dalam kementerian negara/lembaga berkenaan.

b. SBK Peraturan Menteri/Pimpinan Lembaga yang Bersifat Eksternal

SBK peraturan menteri/pimpinan lembaga yang bersifat eksternal merupakan SBK yang digunakan dalam rangka menghasilkan peraturan menteri/pimpinan lembaga yang penetapannya bersifat mengatur dan mengikat ke luar kementerian negara/lembaga berkenaan.

19. SBK Peraturan Presiden

SBK Peraturan Presiden merupakan besaran biaya yang digunakan untuk menghasilkan keluaran berupa peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan perintah Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan, termasuk di dalamnya rancangan peraturan presiden. Dalam hal SBK Peraturan Presiden diselesaikan lebih dari satu tahun anggaran maka besaran SBK ini merupakan akumulasi dari waktu pelaksanaan penyelesaian Peraturan Presiden. Penggunaan SBK ini mengacu pada ketentuan sebagai berikut:

a. SBK Peraturan Presiden yang Bersifat Sederhana

SBK Peraturan Presiden yang bersifat sederhana merupakan SBK yang digunakan dalam rangka menghasilkan Peraturan Presiden yang jumlah pasalnya tidak lebih dari 25 (dua puluh lima) pasal dan/atau melibatkan tidak lebih dari 5 (lima) kementerian negara/lembaga/instansi.

b. SBK Peraturan Presiden yang Bersifat Kompleks

SBK Peraturan Presiden yang bersifat kompleks merupakan SBK yang digunakan dalam rangka menghasilkan Peraturan Presiden yang jumlah pasalnya lebih dari 25 (dua puluh lima) pasal dan melibatkan lebih dari 5 (lima) kementerian negara/lembaga/instansi.

20. SBK Peraturan Pemerintah

SBK Peraturan Pemerintah merupakan besaran biaya yang digunakan untuk menghasilkan keluaran berupa Peraturan Perundangundangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan Undang-Undang

sebagaimana mestinya, termasuk di dalamnya rancangan peraturan presiden, dan tidak termasuk di dalamnya naskah akademis dalam rangka penyusunan peraturan pemerintah. Dalam hal SBK Peraturan Pemerintah diselesaikan lebih dari satu tahun anggaran maka besaran SBK ini merupakan akumulasi dari waktu pelaksanaan penyelesaian Peraturan Pemerintah. Penggunaan SBK ini mengacu pada ketentuan sebagai berikut:

a. SBK Peraturan Pemerintah yang Bersifat Sederhana

SBK Peraturan Pemerintah yang bersifat sederhana merupakan SBK yang digunakan dalam rangka menghasilkan Peraturan Pemerintah yang jumlah pasalnya tidak lebih dari 25 (dua puluh lima) pasal dan/atau melibatkan tidak lebih dari 5 (lima) kementerian negara/lembaga/instansi.

b. SBK Peraturan Pemerintah yang Bersifat Kompleks

SBK Peraturan Pemerintah yang bersifat kompleks merupakan SBK yang digunakan dalam rangka menghasilkan Peraturan Pemerintah yang jumlah pasalnya lebih dari 25 (dua puluh lima) pasal dan melibatkan lebih dari 5 (lima) kementerian negara/lembaga/instansi.

21. SBK Rancangan Undang-Undang

SBK Rancangan Undang-Undang merupakan besaran biaya yang ditetapkan untuk menghasilkan keluaran berupa Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden, termasuk di dalamnya Rancangan Undang-Undang, namun tidak termasuk Naskah Akademis dalam rangka penyusunan Undang-Undang. Dalam hal penyelesaian Rancangan Undang-Undang memerlukan waktu lebih dari satu tahun anggaran, besaran SBK sebagaimana dimaksud merupakan akumulasi dari keseluruhan waktu pelaksanaan penyelesaian Rancangan Undang-Undang tersebut. Penggunaan SBK ini mengacu pada ketentuan sebagai berikut:

a. SBK Rancangan Undang-Undang yang Bersifat Sederhana

SBK rancangan Undang-Undang yang bersifat sederhana merupakan SBK yang digunakan dalam rangka menghasilkan rancangan Undang-Undang yang jumlah pasalnya tidak lebih dari 50 (lima puluh) dan/atau melibatkan tidak lebih dari 5 (lima) kementerian negara/lembaga/instansi.

b. SBK Rancangan Undang-Undang yang Bersifat Kompleks

SBK rancangan Undang-Undang yang bersifat kompleks merupakan SBK yang digunakan dalam rangka menghasilkan rancangan Undang-Undang yang jumlah pasalnya lebih dari 50 (lima puluh) dan melibatkan lebih dari 5 (lima) kementerian negara/lembaga/instansi.

22. SBK Peraturan Lainnya

SBK Peraturan Lainnya merupakan besaran biaya yang ditetapkan untuk menghasilkan keluaran berupa peraturan yang ditetapkan oleh Pejabat Tinggi Madya Kementerian Negara/Lembaga sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangannya, serta keputusan yang ditetapkan oleh Pejabat Pemerintahan sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangannya, serta bersifat mengatur dan mengikat ke luar kementerian negara/lembaga

yang bersangkutan. Peraturan sejenis yang hanya mengikat ke dalam kementerian negara/lembaga tidak memerlukan alokasi anggaran tersendiri, dan apabila diperlukan biaya, dibebankan pada alokasi belanja operasional yang tersedia

23. SBK Sosialisasi dan Diseminasi

SBK Sosialisasi dan Diseminasi adalah besaran biaya yang digunakan untuk menghasilkan keluaran berupa jumlah orang yang mengikuti sosialisasi dan/atau diseminasi informasi secara luring (*offline*) kepada pihak-pihak terkait, dengan tujuan penyebarluasan informasi terkait suatu kebijakan atau arahan tertentu kepada masyarakat, lembaga maupun badan usaha dengan tujuan meningkatkan kesadaran bagi masyarakat untuk menerima, dan mengaplikasikan informasi tersebut, dengan penerima manfaat *output* adalah eksternal K/L atau publik. Kegiatan ini mencakup seluruh tahapan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga penyusunan laporan hasil kegiatan, dengan jumlah peserta paling sedikit 50 (lima puluh) orang.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PURBAYA YUDHI SADEWA

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2026
TENTANG STANDAR BIAYA KELUARAN DALAM
PENGANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

1. Kementerian Negara/Lembaga: Majelis Permusyawaratan Rakyat (001)

| Kode | No | Uraian |
|-----------------|-----------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| 001.02 | | Deputi Bidang Pengkajian dan Pemasyarakatan Konstitusi |
| 5003.ABC | | Kebijakan Bidang Politik |
| | 1 | Kebijakan Sistem Ketatanegaraan dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta pelaksananya oleh Badan Pengkajian |
| | 2 | Kebijakan Penyerapan Aspirasi Masyarakat, Daerah dan Lembaga |
| | 3 | Kebijakan Sistem Ketatanegaraan, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta Pelaksanaannya oleh Komisi Kajian Ketatanegaraan |
| 6487.AEB | | Forum |
| | 4 | Forum Konsultasi Fraksi/Kelompok DPD |
| 6487.BLA | | Persidangan Lembaga Legislatif |
| | 5 | Sidang Paripurna MPR |

2. Kementerian Negara/Lembaga: Dewan Perwakilan Rakyat (002)

| Kode | No | Uraian |
|-----------------|-----------|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 002.02 | | Dewan |
| 5801.ABC | | Kebijakan Bidang Politik |
| | 1 | Program Legislasi Nasional |
| 5807.AEA | | Koordinasi |
| | 2 | Koordinasi Keanggotaan Dewan dan Fraksi |

3. Kementerian Negara/Lembaga: Badan Pemeriksa Keuangan (004)

| Kode | No | Uraian |
|-----------------|-----------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| 004.01 | | Badan Pemeriksa Keuangan |
| 1043.FAF | | Pemeriksaan Keuangan Negara |
| | 1 | LHP atas Bantuan Keuangan Partai Politik pada Ditjen PKN V |
| | 2 | Bahan Perumusan Pendapat Ditjen PKN VIII dan Organisasi Internasional |
| | 3 | Sumbangan IHPS Ditjen PKN VIII dan Organisasi Internasional |
| | 4 | Laporan Profil Entitas Ditjen PKN VIII dan Organisasi Internasional |
| | 5 | Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Ditjen PKN VIII dan Organisasi Internasional |
| | 6 | Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah pada Ditjen PKN VIII dan Organisasi Internasional |
| | 7 | Bahan Perumusan Pendapat Ditjen PKN I |
| | 8 | Bahan Perumusan Pendapat Ditjen PKN II |
| | 9 | Bahan Perumusan Pendapat Ditjen PKN III |
| | 10 | Bahan Perumusan Pendapat Ditjen PKN IV |
| | 11 | Bahan Perumusan Pendapat Ditjen PKN V |
| | 12 | Bahan Perumusan Pendapat Ditjen PKN VI |
| | 13 | Bahan Perumusan Pendapat Ditjen PKN VII |
| | 14 | Sumbangan IHPS Ditjen PKN I |
| | 15 | Sumbangan IHPS Ditjen PKN II |
| | 16 | Sumbangan IHPS Ditjen PKN III |
| | 17 | Sumbangan IHPS Ditjen PKN IV |
| | 18 | Sumbangan IHPS Ditjen PKN V |
| | 19 | Sumbangan IHPS Ditjen PKN VI |
| | 20 | Sumbangan IHPS Ditjen PKN VII |
| | 21 | Laporan Profil Entitas Ditjen PKN I |
| | 22 | Laporan Profil Entitas Ditjen PKN II |
| | 23 | Laporan Profil Entitas Ditjen PKN III |
| | 24 | Laporan Profil Entitas Ditjen PKN IV |
| | 25 | Laporan Profil Entitas Ditjen PKN V |
| | 26 | Laporan Profil Entitas Ditjen PKN VI |
| | 27 | Laporan Profil Entitas Ditjen PKN VII |
| | 28 | Kajian Bidang Keuangan Pemerintah Pusat |
| | 29 | Kajian Bidang Keuangan Pemerintah Daerah |
| | 30 | Kajian Bidang Kekayaan Negara/Daerah yang Dipisahkan |
| | 31 | Kajian Bidang Lingkungan Hidup dan Pembangunan Berkelanjutan |
| | 32 | Kajian Bidang Manajemen Risiko |
| | 33 | Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Ditjen PKN I |
| | 34 | Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Ditjen PKN II |
| | 35 | Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Ditjen PKN III |
| | 36 | Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Ditjen PKN IV |
| | 37 | Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Ditjen PKN V |
| | 38 | Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Ditjen PKN VI |
| | 39 | Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Ditjen PKN VII |
| | 40 | Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah pada Ditjen PKN I |
| | 41 | Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/ Daerah pada Ditjen PKN II |
| | 42 | Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah pada Ditjen PKN III |
| | 43 | Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah pada Ditjen PKN IV |
| | 44 | Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah pada Ditjen PKN V |

| Kode | No | Uraian |
|-------------|-----------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| | 45 | Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah pada Ditjen PKN VI |
| | 46 | Layanan Manajemen Internal pada lingkup tugas Ditjen PKN I |
| | 47 | Layanan Manajemen Internal pada lingkup tugas Ditjen PKN II |
| | 48 | Layanan Manajemen Internal pada lingkup tugas Ditjen PKN III |
| | 49 | Layanan Manajemen Internal pada lingkup tugas Ditjen PKN IV |
| | 50 | Layanan Manajemen Internal pada lingkup tugas Ditjen PKN V |
| | 51 | Layanan Manajemen Internal pada lingkup tugas Ditjen PKN VI |
| | 52 | Layanan Manajemen Internal pada lingkup tugas Ditjen PKN VII |
| | 53 | Layanan Manajemen Internal pada lingkup tugas Ditjen PKN VIII dan Organisasi Internasional |
| | 54 | Layanan Manajemen Internal pada lingkup tugas Ditjen Pemeriksaan Investigasi |
| | 55 | LHP Ditjen PKN I |
| | 56 | LHP Ditjen PKN II |
| | 57 | LHP Ditjen PKN III |
| | 58 | LHP Ditjen PKN IV |
| | 59 | LHP Ditjen PKN V |
| | 60 | LHP Ditjen PKN VI |
| | 61 | LHP Ditjen PKN VII |
| | 62 | LHP BPK Perwakilan Aceh |
| | 63 | LHP BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara |
| | 64 | LHP BPK Perwakilan Provinsi Riau |
| | 65 | LHP BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau |
| | 66 | LHP BPK Perwakilan Provinsi Jambi |
| | 67 | LHP BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat |
| | 68 | LHP BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan |
| | 69 | LHP BPK Perwakilan Provinsi Lampung |
| | 70 | LHP BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu |
| | 71 | LHP BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung |
| | 72 | LHP BPK Perwakilan Provinsi Banten |
| | 73 | LHP BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat |
| | 74 | LHP BPK Perwakilan Provinsi Daerah Khusus Jakarta |
| | 75 | LHP BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah |
| | 76 | LHP BPK Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta |
| | 77 | LHP BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur |
| | 78 | LHP BPK Perwakilan Provinsi Bali |
| | 79 | LHP BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat |
| | 80 | LHP BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur |
| | 81 | LHP BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat |
| | 82 | LHP BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah |
| | 83 | LHP BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan |
| | 84 | LHP BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur |
| | 85 | LHP BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara |
| | 86 | LHP BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo |
| | 87 | LHP BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat |
| | 88 | LHP BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan |
| | 89 | LHP BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah |
| | 90 | LHP BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara |
| | 91 | LHP BPK Perwakilan Provinsi Maluku |
| | 92 | LHP BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara |
| | 93 | LHP BPK Perwakilan Provinsi Papua |
| | 94 | LHP BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat |
| | 95 | LHP BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara |

| Kode | No | Uraian |
|-----------------|-----------|---|
| 1 | 2 | 3 |
| | 96 | LHP LKPP |
| | 97 | LHP BPK Perwakilan Provinsi Papua Tengah |
| | 98 | LHP BPK Perwakilan Provinsi Papua Selatan |
| | 99 | LHP BPK Perwakilan Provinsi Papua Pegunungan |
| | 100 | LHP BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat Daya |
| | 101 | LHP Ditjen PKN VIII dan Organisasi Internasional |
| | 102 | LHP Tematik Ditjen PKN I |
| | 103 | LHP Tematik Ditjen PKN II |
| | 104 | LHP Tematik Ditjen PKN III |
| | 105 | LHP Tematik Ditjen PKN IV |
| | 106 | LHP Tematik Ditjen PKN V |
| | 107 | LHP Tematik Ditjen PKN VI |
| | 108 | LHP Tematik Ditjen PKN VII |
| | 109 | LHP Investigasi |
| | 110 | Laporan Penelaahan Informasi Awal |
| | 111 | Laporan Pemberian Keterangan Ahli |
| 1153.FAF | | Pemeriksaan Keuangan Negara |
| | 112 | Laporan Hasil Reviu Inspektorat |
| | 113 | Laporan Hasil Pertimbangan Inspektorat |
| | 114 | Layanan Manajemen Internal Inspektorat PIMK |
| | 115 | Layanan Manajemen Internal Inspektorat PKMP |
| | 116 | Layanan Manajemen Internal Inspektorat Penegakan Integritas |
| 1167.FAF | | Pemeriksaan Keuangan Negara |
| | 117 | Kurikulum dan Silabus Diklat |
| | 118 | Bahan Ajar Diklat |
| | 119 | Layanan Manajemen Internal Pusat Akademik dan Teknologi Pembelajaran |
| | 120 | Diklat Jabatan Fungsional Pemeriksa |
| | 121 | Perencanaan Diklat |
| | 122 | Layanan Manajemen Internal Pusat Perencanaan dan Penyelenggaraan Diklat |
| | 123 | Layanan Manajemen Internal Pusat Sertifikasi dan Pengembangan Diklat |
| 6830.FAF | | Pemeriksaan Keuangan Negara |
| | 124 | Layanan Manajemen Internal Pusat LPBH |
| | 125 | Layanan Manajemen Internal Pusat KHKKN |
| 6831.FAF | | Pemeriksaan Keuangan Negara |
| | 126 | Layanan Manajemen Internal Pusat PSMK |
| | 127 | Layanan Manajemen Internal Pusat Analisis Kebijakan PKN |
| | 128 | Layanan Manajemen Internal Pusat EPP |
| 6832.EBA | | Layanan Dukungan Manajemen Internal |
| | 129 | Layanan Manajemen Internal Biro Humas |
| | 130 | Layanan Manajemen Internal Biro SDM |
| | 131 | Layanan Manajemen Internal Biro Keuangan |
| | 132 | Layanan Manajemen Internal Biro Umum |
| | 133 | Layanan Manajemen Internal Biro Sekretariat Pimpinan |
| | 134 | Layanan Manajemen Internal Biro Teknologi Informasi |
| | 135 | Layanan Manajemen Internal Biro Ortala |

4. Kementerian Negara/Lembaga: Mahkamah Agung (005)

| Kode | No | Uraian |
|-----------------|-----------|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 005.02 | | Kepaniteraan |
| 1044.BCA | | Perkara Hukum Perseorangan |
| | 1 | Putusan Perkara Pidana |
| | 2 | Putusan Perkara Pidana Militer |
| | 3 | Penyesiahan Perkara PHI yang nilai gugatannya dibawah 150jt |
| 005.03 | | Ditjen Badan Peradilan Umum |
| 1049.BCA | | Perkara Hukum Perseorangan |
| | 4 | Perkara Pidana Yang Diselesaikan di Tingkat Banding di wilayah Barat |
| | 5 | Perkara Pidana Korupsi yang Diselesaikan Ditingkat Banding di wilayah Barat |
| | 6 | Perkara Pidana yang Diselesaikan Ditingkat Pertama di wilayah Barat |
| | 7 | Perkara Pidana Korupsi yang Diselesaikan Ditingkat Pertama di Wilayah Barat |
| | 8 | Perkara PHI (dibawah 150 juta) yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di wilayah Barat |
| | 9 | Perkara Pidana Yang Diselesaikan di Tingkat Banding di Wilayah Tengah |
| | 10 | Perkara Pidana Korupsi yang Diselesaikan Ditingkat Banding di Wilayah Tengah |
| | 11 | Perkara Pidana yang Diselesaikan Ditingkat Pertama di Wilayah Tengah |
| | 12 | Perkara Pidana Korupsi yang Diselesaikan Ditingkat Pertama di Wilayah Tengah |
| | 13 | Perkara PHI (dibawah 150 juta) yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Tengah |
| | 14 | Perkara Pidana Yang Diselesaikan di Tingkat Banding di Wilayah Timur |
| | 15 | Perkara Pidana Korupsi yang Diselesaikan Ditingkat Banding di Wilayah Timur |
| | 16 | Perkara Pidana yang Diselesaikan Ditingkat Pertama di Wilayah Timur |
| | 17 | Perkara Pidana Korupsi yang Diselesaikan Ditingkat Pertama di Wilayah Timur |
| | 18 | Perkara PHI (dibawah 150 juta) yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Timur |
| 005.04 | | Ditjen Badan Peradilan Agama |
| 1053.AEA | | Koordinasi |
| | 19 | Koordinasi dan Pemantauan Layanan Pengadilan Wilayah Barat |
| | 20 | Koordinasi dan Pemantauan Layanan Pengadilan Wilayah Tengah |
| | 21 | Koordinasi dan Pemantauan Layanan Pengadilan Wilayah Timur |
| 1053.QBA | | Layanan Bantuan Hukum Perseorangan |
| | 22 | Layanan Pos Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Agama |
| 005.05 | | Ditjen Badan Peradilan Militer Dan Peradilan Tata Usaha Negara (Tun) |
| 1058.BCA | | Perkara Hukum Perseorangan |
| | 23 | Perkara Perbedaan Pendapat yang Diselesaikan di Pengadilan Militer Utama |
| | 24 | Perkara Pidana Tingkat Banding yang Diselesaikan di Lingkungan Peradilan Militer |
| | 25 | Perkara Pidana Tingkat Pertama yang Diselesaikan di Lingkungan Peradilan Militer diluar Wilayah Papua |
| | 26 | Perkara Pidana Tingkat Pertama yang Diselesaikan di Lingkungan Peradilan Militer Wilayah Papua |
| | 27 | Perkara Pelanggaran Lalu Lintas yang Diselesaikan di Lingkungan Peradilan Militer |
| 1059.QBA | | Layanan Bantuan Hukum Perseorangan |
| | 28 | Layanan Pos Bantuan Hukum di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara |

5. Kementerian Negara/Lembaga: Kejaksaan Agung (006)

| Kode | No | Uraian |
|-----------------|-----------|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 006.01 | | Kejaksaan Republik Indonesia |
| 1097.EBD | | Layanan Manajemen Kinerja Internal |
| | 1 | Laporan pengaduan yang ditindaklanjuti melalui klarifikasi pada Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri yang terdapat Cabang Kejaksaan Negeri |
| | 2 | Laporan pengaduan yang ditindaklanjuti melalui inspeksi kasus pada Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri yang terdapat Cabang Kejaksaan Negeri |
| 1100.EBA | | Layanan Dukungan Manajemen Internal |
| | 3 | Kegiatan Produksi Intelijen |
| 1102.AEG | | Konferensi dan Event |
| | 4 | Kampanye Anti Korupsi di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri |
| 1102.BHB | | Operasi Bidang Keamanan |
| | 5 | Operasi Pencarian Buron Tindak Pidana/DPO |
| | 6 | Operasi Intelijen Penyelidikan, Pengamanan dan Penggalangan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri |
| | 7 | Operasi Intelijen melalui Posko Intelijen di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri |
| | 8 | Operasi Penelusuran Aset di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri |
| 1102.FAE | | Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan |
| | 9 | Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat Di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri |
| 1102.FAG | | Pengawasan Pembangunan |
| | 10 | Pengawasan Pembangunan Strategis di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri |
| 1103.BAA | | Pelayanan Publik kepada masyarakat |
| | 11 | Layanan Penerangan Hukum di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri |
| 6581.BAB | | Pelayanan Publik kepada lembaga |
| | 12 | Layanan Pertimbangan Hukum yang dilakukan di Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara |
| 6581.BCE | | Penanganan Perkara |
| | 13 | Perkara Perdata yang diselesaikan di Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara |
| | 14 | Layanan Bantuan Hukum Litigasi yang diselesaikan di Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara |
| | 15 | Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi yang diselesaikan di Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara |
| 6582.BAA | | Pelayanan Publik kepada masyarakat |
| | 16 | Layanan Laporan dan Pengaduan Perkara Koneksitas di Kejaksaan Tinggi |
| 6582.BCE | | Penanganan Perkara |
| | 17 | Layanan Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara yang diselesaikan di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri |
| | 18 | Layanan Pertimbangan Hukum/Pendampingan Hukum/Bantuan Hukum yang dilakukan di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri |
| | 19 | Layanan Restorative Justice Perkara Tindak Pidana Umum di Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri |
| | 20 | Layanan Penyelidikan Perkara Koneksitas di Kejaksaan Tinggi |
| | 21 | Layanan Penyidikan Perkara Koneksitas di Kejaksaan Tinggi |
| | 22 | Layanan Pra Penuntutan dan Penuntutan Perkara Koneksitas di Kejaksaan Tinggi |
| | 23 | Layanan Eksekusi Perkara Koneksitas di Kejaksaan Tinggi |
| | 24 | Layanan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang Pada Tahap Penyelidikan Kategori A |
| | 25 | Layanan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang Pada Tahap Penyelidikan Kategori B |
| | 26 | Layanan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang Pada Tahap Penyelidikan Kategori C |

| Kode | No | Uraian |
|-------------|-----------|---|
| 1 | 2 | 3 |
| | 27 | Layanan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang Pada Tahap Penyelidikan Kategori D |
| | 28 | Layanan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang pada Tahap Penyidikan Kategori A |
| | 29 | Layanan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang pada Tahap Penyidikan Kategori B |
| | 30 | Layanan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang pada Tahap Penyidikan Kategori C |
| | 31 | Layanan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang pada Tahap Penyidikan Kategori D |
| | 32 | Layanan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya pada Tahap Pra Penuntutan di Kejaksaaan Tinggi Wilayah 1 |
| | 33 | Layanan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya pada Tahap Pra Penuntutan di Kejaksaaan Tinggi Wilayah 2 jauh dengan Kejaksaaan Negeri dengan transportasi darat |
| | 34 | Layanan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya pada Tahap Pra Penuntutan di Kejaksaaan Tinggi Wilayah 3 jauh dengan Kejaksaaan Negeri dengan transportasi darat |
| | 35 | Layanan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya pada Tahap Pra Penuntutan di Kejaksaaan Tinggi Wilayah 4 jauh dengan Kejaksaaan Negeri dengan transportasi laut |
| | 36 | Layanan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya pada Tahap Pra Penuntutan di Kejaksaaan Tinggi Wilayah 5 jauh dengan Kejaksaaan Negeri dengan transportasi udara |
| | 37 | Layanan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya pada Tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan Wilayah 1A Satker dekat dari Pengadilan Tipikor |
| | 38 | Layanan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya pada Tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan Wilayah 1B Satker dekat dari Pengadilan Tipikor |
| | 39 | Layanan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya pada Tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan Wilayah 2A Satker jauh dari Pengadilan Tipikor dengan transportasi darat dan tidak menginap |
| | 40 | Layanan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya pada Tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan Wilayah 2B Satker jauh dari Pengadilan Tipikor dengan transportasi darat dan tidak menginap |
| | 41 | Layanan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya pada Tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan Wilayah 3A Satker jauh dari Pengadilan Tipikor dengan transportasi darat dan menginap |
| | 42 | Layanan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya pada Tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan Wilayah 3B Satker jauh dari Pengadilan Tipikor dengan transportasi darat dan menginap |
| | 43 | Layanan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya pada Tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan Wilayah 3C Satker jauh dari Pengadilan Tipikor dengan transportasi darat dan menginap |
| | 44 | Layanan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya pada Tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan Wilayah 3D Satker jauh dari Pengadilan Tipikor dengan transportasi darat dan menginap |
| | 45 | Layanan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya pada Tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan Wilayah 3E Satker jauh dari Pengadilan Tipikor dengan transportasi darat dan menginap |
| | 46 | Layanan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya pada Tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan Wilayah 3F Satker jauh dari Pengadilan Tipikor dengan transportasi darat dan menginap |
| | 47 | Layanan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya pada Tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan Wilayah 3G Satker jauh dari Pengadilan Tipikor dengan transportasi darat dan menginap |
| | 48 | Layanan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya pada Tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan Wilayah 3H Satker jauh dari Pengadilan Tipikor dengan transportasi darat dan menginap |
| | 49 | Layanan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya pada Tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan Wilayah 4A Satker jauh dari Pengadilan Tipikor dengan transportasi laut dan menginap |

| Kode | No | Uraian |
|-------------|-----------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| | 50 | Layanan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya pada Tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan di Wilayah 4B Satker jauh dari Pengadilan Tipikor dengan transportasi laut dan menginap |
| | 51 | Layanan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya pada Tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan di Wilayah 4C Satker jauh dari Pengadilan Tipikor dengan transportasi laut dan menginap |
| | 52 | Layanan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya pada Tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan di Wilayah 4D Satker jauh dari Pengadilan Tipikor dengan transportasi laut dan menginap |
| | 53 | Layanan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya pada Tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan di Wilayah 5A Satker jauh dari Pengadilan Tipikor dengan transportasi udara dan menginap |
| | 54 | Layanan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya pada Tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan di Wilayah 5B Satker jauh dari Pengadilan Tipikor dengan transportasi udara dan menginap |
| | 55 | Layanan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya pada Tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan di Wilayah 5C Satker jauh dari Pengadilan Tipikor dengan transportasi udara dan menginap |
| | 56 | Layanan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya pada Tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan di Wilayah 5D Satker jauh dari Pengadilan Tipikor dengan transportasi udara dan menginap |
| | 57 | Layanan Pelaksanaan eksekusi perkara Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Khusus Lainnya terpidana ditahan dalam Rumah tahanan Wilayah 1A Satker dekat dari LP |
| | 58 | Layanan Pelaksanaan eksekusi perkara Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Khusus Lainnya terpidana ditahan dalam Rumah tahanan Wilayah 1B Satker dekat dari LP |
| | 59 | Layanan Pelaksanaan eksekusi perkara Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Khusus Lainnya terpidana ditahan dalam Rumah tahanan Wilayah 2A Satker jauh dari LP dengan transportasi darat |
| | 60 | Layanan Pelaksanaan eksekusi perkara Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Khusus Lainnya terpidana ditahan dalam Rumah tahanan Wilayah 3A Satker jauh dari LP dengan transportasi darat |
| | 61 | Layanan Pelaksanaan eksekusi perkara Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Khusus Lainnya terpidana ditahan dalam Rumah tahanan Wilayah 3B Satker jauh dari LP dengan transportasi darat |
| | 62 | Layanan Pelaksanaan eksekusi perkara Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Khusus Lainnya terpidana ditahan dalam Rumah tahanan Wilayah 4A Satker jauh dari LP dengan transportasi laut |
| | 63 | Layanan Pelaksanaan eksekusi perkara Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Khusus Lainnya terpidana ditahan dalam Rumah tahanan Wilayah 4B Satker jauh dari LP dengan transportasi laut |
| | 64 | Layanan Pelaksanaan eksekusi perkara Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Khusus Lainnya terpidana ditahan dalam Rumah tahanan Wilayah 5A Satker jauh dari LP dengan transportasi udara |
| | 65 | Layanan Pelaksanaan eksekusi perkara Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Khusus Lainnya terpidana ditahan dalam Rumah tahanan Wilayah 5B Satker jauh dari LP dengan transportasi udara |
| | 66 | Layanan Pelaksanaan Eksekusi Perkara Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Khusus Lainnya terpidana tidak ditahan dalam rumah tahanan |

6. Kementerian Negara/Lembaga: Kementerian Sekretariat Negara (007)

| Kode | No | Uraian |
|-----------------|-----------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| 007.01 | | Sekretariat Negara |
| 1126.EBA | | Layanan Dukungan Manajemen Internal |
| | 1 | Layanan Manajemen Ketatalaksanaan |
| 1148.BAH | | Pelayanan Publik Lainnya |
| | 2 | Layanan Administrasi Perjalanan Dinas Luar Negeri |
| 5958.ABN | | Kebijakan Bidang Sosial |
| | 3 | Analisis Kebijakan di Bidang Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan |
| 5959.ABC | | Kebijakan Bidang Politik |
| | 4 | Analisis Kebijakan di Bidang Pemerintahan dan Wawasan Kebangsaan |
| 6430.ABM | | Kebijakan Bidang Pelayanan Publik |
| | 5 | Analisis Pengaduan Masyarakat |
| | 6 | Analisis Hubungan Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintah |
| | 7 | Analisis Hubungan Lembaga Non Pemerintah |
| | 8 | Analisis Bahan Kebijakan |
| 6431.ABD | | Kebijakan Bidang Hukum dan HAM |
| | 9 | Analisis RPUU Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan |
| | 10 | Analisis RPUU Bidang Pemerintahan Dalam Negeri dan Otonomi Daerah |
| | 11 | Analisis RPUU Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan |
| | 12 | Analisis RPUU Bidang Perekonomian |
| | 13 | Analisis dan administrasi penyelesaian hukum dan PUU |
| 6432.BAH | | Pelayanan Publik Lainnya |
| | 14 | Layanan Administrasi Pejabat Pemerintahan dan Pejabat Lainnya |
| 6433.BEI | | Bantuan Lembaga |
| | 15 | Pemberian Bantuan Pemerintah |
| 6433.FAA | | Kearsipan |
| | 16 | Layanan Kearsipan Kepresidenan |
| 6434.AAE | | Keputusan Presiden |
| | 17 | Rancangan Keputusan Presiden tentang pengangkatan, kenaikan pangkat dan pemberhentian Personel TNI dan Polri |
| | 18 | Rancangan Keputusan Presiden tentang Pemberian Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan |
| 6434.BAA | | Pelayanan Publik kepada masyarakat |
| | 19 | Layanan Penganugerahan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan |
| 007.06 | | Pasukan Pengamanan Presiden |
| 5965.BHB | | Operasi Bidang Keamanan |
| | 20 | Operasi Pengamanan Kediaman Presiden, Wakil Presiden dan Keluarganya serta Mantan Presiden dan Mantan Wakil Presiden |
| 007.07 | | Dewan Pertimbangan Presiden |
| 5966.BAH | | Pelayanan Publik Lainnya |
| | 21 | Layanan Perumusan Nasihat dan Pertimbangan |
| 007.10 | | Kantor Staf Presiden |
| 5969.ABC | | Kebijakan Bidang Politik |
| | 22 | Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Program-Program Prioritas Nasional |

7. Kementerian Negara/Lembaga: Kementerian Dalam Negeri RI (010)

| Kode | No | Uraian |
|-----------------|-----------|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 010.01 | | Sekretariat Jenderal |
| 6086.ADG | | Standarisasi Profesi dan SDM |
| | 1 | Penilaian Kompetensi Jabatan Pelaksana di Lingkungan Kemendagri |
| | 2 | Penilaian Kompetensi Jabatan administrator, pengawas dan fungsional di Lingkungan Kemendagri |
| | 3 | Penilaian Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi di Lingkungan Kemendagri |
| 010.09 | | Ditjen Bina Keuangan Daerah |
| 6141.BMA | | Data dan Informasi Publik |
| | 4 | Data dan Informasi Publik Bidang Perencanaan Anggaran Daerah |
| | 5 | Data dan Informasi Publik Bidang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah |
| | 6 | Data dan Informasi Publik Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah |
| 010.12 | | Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| 1285.ADI | | Sertifikasi Profesi dan SDM |
| | 7 | Aparatur yang Mengikuti Sertifikasi Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri |
| 6144.FAC | | Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara |
| | 8 | Aparatur yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi Bidang Pemerintahan Dalam Negeri Lingkup Regional |
| | 9 | Aparatur yang mengikuti Pengembangan Kompetensi 5 hari bidang Standarisasi dan Sertifikasi |
| | 10 | Aparatur yang mengikuti Pengembangan Kompetensi 6 hari bidang Standarisasi dan Sertifikasi |
| | 11 | Aparatur yang mengikuti Pengembangan Kompetensi 5 hari Bidang Pemerintahan Dalam Negeri |
| | 12 | Aparatur yang mengikuti Pengembangan Kompetensi 5 hari Bidang Manajemen Kepemimpinan |
| | 13 | Aparatur yang mengikuti Pengembangan Kompetensi 5 hari Bidang Fungsional dan Teknis |
| | 14 | Aparatur yang mengikuti Pengembangan Kompetensi 12 hari Bidang Fungsional dan Teknis |
| | 15 | Aparatur yang mengikuti Pengembangan Kompetensi 14 hari Bidang Fungsional dan Teknis |

8. Kementerian Negara/Lembaga: Kementerian Luar Negeri RI (011)

| Kode | No | Uraian |
|-----------------|----|--|
| 1 | 2 | 3 |
| 011.07 | | Ditjen Hukum Dan Perjanjian Internasional |
| 6030.AEC | | Kerja sama |
| | 1 | Kesepakatan Hukum dan Perjanjian di Bidang Ekonomi |
| 011.08 | | Ditjen Protokol Dan Konsuler |
| 6029.BAB | | Pelayanan Publik kepada lembaga |
| | 2 | Pelayanan Fasilitas Diplomatik |
| 011.11 | | Badan Strategi Kebijakan Luar Negeri |
| 6027.ABC | | Kebijakan Bidang Politik |
| | 3 | Rekomendasi Strategi Kebijakan Multilateral |
| | 4 | Rekomendasi Strategi Kebijakan Kawasan Asia Pasifik dan Afrika |
| | 5 | Rekomendasi Strategi Kebijakan Kawasan Amerika dan Eropa |

9. Kementerian Negara/Lembaga: Kementerian Pertahanan (012)

| Kode | No | Uraian |
|-----------------|-----------|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 012.01 | | Kementerian Pertahanan |
| 1386.DBA | | Pendidikan Tinggi |
| | 1 | Prodi Sarjana Pendidikan Kedokteran Prajurit Kadet |
| | 2 | Prodi Sarjana Pendidikan Kedokteran Kopral Kadet |
| | 3 | Prodi Sarjana Pendidikan Kedokteran Sersan Kadet |
| | 4 | Prodi Sarjana Pendidikan Kedokteran Sersan Mayor Dua Kadet |
| | 5 | Prodi Sarjana Pendidikan Kedokteran Sersan Mayor Satu Kadet |
| | 6 | Prodi Sarjana Farmasi Prajurit Kadet |
| | 7 | Prodi Sarjana Farmasi Kopral Kadet |
| | 8 | Prodi Sarjana Farmasi Sersan Kadet |
| | 9 | Prodi Sarjana Farmasi Sersan Mayor Dua Kadet |
| | 10 | Prodi Sarjana Farmasi Sersan Mayor Satu Kadet |
| | 11 | Prodi Sarjana Matematika Prajurit Kadet |
| | 12 | Prodi Sarjana Matematika Kopral Kadet |
| | 13 | Prodi Sarjana Matematika Sersan Kadet |
| | 14 | Prodi Sarjana Matematika Sersan Mayor Dua Kadet |
| | 15 | Prodi Sarjana Matematika Sersan Mayor Satu Kadet |
| | 16 | Prodi Sarjana Biologi Prajurit Kadet |
| | 17 | Prodi Sarjana Biologi Kopral Kadet |
| | 18 | Prodi Sarjana Biologi Sersan Kadet |
| | 19 | Prodi Sarjana Biologi Sersan Mayor Dua Kadet |
| | 20 | Prodi Sarjana Biologi Sersan Mayor Satu Kadet |
| | 21 | Prodi Sarjana Fisika Prajurit Kadet |
| | 22 | Prodi Sarjana Fisika Kopral Kadet |
| | 23 | Prodi Sarjana Fisika Sersan Kadet |
| | 24 | Prodi Sarjana Fisika Sersan Mayor Dua Kadet |
| | 25 | Prodi Sarjana Fisika Sersan Mayor Satu Kadet |
| | 26 | Prodi Sarjana Kimia Prajurit Kadet |
| | 27 | Prodi Sarjana Kimia Kopral Kadet |
| | 28 | Prodi Sarjana Kimia Sersan Kadet |
| | 29 | Prodi Sarjana Kimia Sersan Mayor Dua Kadet |
| | 30 | Prodi Sarjana Kimia Sersan Mayor Satu Kadet |
| | 31 | Prodi Sarjana Teknik Informatika Prajurit Kadet |
| | 32 | Prodi Sarjana Teknik Informatika Kopral Kadet |
| | 33 | Prodi Sarjana Teknik Informatika Sersan Kadet |
| | 34 | Prodi Sarjana Teknik Informatika Sesan Mayor Dua Kadet |
| | 35 | Prodi Sarjana teknik Informatika Sersan Mayor Satu Kadet |
| | 36 | Prodi Sarjana Teknik Sipil Prajurit Kadet |
| | 37 | Prodi Sarjana Teknik Sipil Kopral Kadet |
| | 38 | Prodi Sarjana Teknik Sipil Sersan Kadet |
| | 39 | Prodi Sarjana Teknik Sipil Sersan Mayor Dua Kadet |
| | 40 | Prodi Sarjana Teknik Sipil Sersan Mayor Satu Kadet |
| | 41 | Prodi Sarjana Teknik Elektro Prajurit Kadet |
| | 42 | Prodi Sarjana Teknik Elektro Kopral Kadet |
| | 43 | Prodi Sarjana Teknik Elektro Sersan Kadet |
| | 44 | Prodi Sarjana Teknik Elektro Sersan Mayor Dua Kadet |
| | 45 | Prodi Sarjana Teknik Elektro Sersan Mayor Satu Kadet |
| | 46 | Prodi Sarjana Teknik Mesin Prajurit Kadet |
| | 47 | Prodi Sarjana Teknik Mesin Kopral Kadet |
| | 48 | Prodi Sarjana Teknik Mesin Sersan Kadet |
| | 49 | Prodi Sarjana Teknik Mesin Sersan Mayor Dua Kadet |

| Kode | No | Uraian |
|-----------------|-----------|---|
| 1 | 2 | 3 |
| | 50 | Prodi Sarjana Teknik Mesin Sersan Mayor Satu Kadet |
| | 51 | Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru S-1 |
| 6549.BBA | | Layanan Bantuan Hukum Perseorangan |
| | 52 | Bantuan dan Nasihat Hukum di Luar Pengadilan (Non Litigasi) |
| 6549.BCA | | Perkara Hukum Perseorangan |
| | 53 | Pendapat dan Saran Hukum (Legal Opinion) |
| 6549.BCB | | Perkara Hukum Lembaga |
| | 54 | Laporan dan Nasehat Hukum Perkara Perdata/TUN Tergugat Tk-I Rayon 1 |
| | 55 | Laporan dan Nasehat Hukum Perkara Perdata/TUN Tergugat Tk-I Rayon 2 |
| | 56 | Laporan Dan Nasehat Hukum Perkara Perdata/TUN Terbanding Tk-Banding Rayon 1 |
| | 57 | Laporan Dan Nasehat Hukum Perkara Perdata/TUN Terbanding Tk-Banding Rayon 2 |
| | 58 | Laporan Dan Nasehat Hukum Perkara Perdata/TUN Terbanding Tk-Banding Rayon 4 |
| | 59 | Laporan dan Nasehat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk-Kasasi Rayon 1 |
| | 60 | Laporan dan Nasehat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk-Kasasi Rayon 2 |
| | 61 | Laporan dan Nasehat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk-Pk Rayon 1 |
| 6551.DCG | | Pelatihan Bidang Pertahanan dan Keamanan |
| | 62 | Kursus Intensif Bahasa Inggris Gelombang 1 |
| | 63 | Kursus Intensif Bahasa Inggris Gelombang 2 |
| | 64 | Kursus Dasar Instruktur Bahasa Inggris |
| | 65 | Kursus Intensif Bahasa Indonesia Gelombang 1 |
| | 66 | Kursus Intensif Bahasa Indonesia Gelombang 2 |
| | 67 | Kursus Intensif Bahasa Arab |
| | 68 | Kursus Intensif Bahasa Jepang |
| | 69 | Kursus Intensif Bahasa Jerman |
| | 70 | Kursus Intensif Bahasa Korea |
| | 71 | Kursus Intensif Bahasa Mandarin |
| | 72 | Kursus Intensif Bahasa Prancis |
| | 73 | Kursus Intensif Bahasa Rusia |
| | 74 | Kursus Kepemimpinan dan Manajemen Pertahanan |
| | 75 | Kursus Manajemen Perencanaan Strategis Pertahanan |
| | 76 | Kursus Manajemen Perencanaan dan Penganggaran Pertahanan |
| | 77 | Kursus Manajemen Penelitian dan Pengembangan Pertahanan Tingkat Muda |
| | 78 | Kursus Dasar Manajemen Pertahanan |
| | 79 | Kursus Manajemen Pengadaan Barang dan Jasa Pertahanan |
| | 80 | Kursus Manajemen Penatausahaan Barang Milik Negara Pertahanan |
| | 81 | Kursus Manajemen Penelitian dan Pengembangan Pertahanan Tingkat Pertama |
| | 82 | Pelatihan <i>Cyber Defence</i> |
| | 83 | Pelatihan Administrasi Umum |
| | 84 | Pelatihan Alih Golongan Bagi PNS |
| | 85 | Pelatihan Pembinaan Kesadaran Bela Negara Lingkup Masyarakat bagi Organisasi Kepemudaan dan Kemahasiswaan 2 Gelombang |
| | 86 | Pelatihan Pembinaan Kesadaran Bela Negara Lingkup Masyarakat (Gabungan Ormas) 2 Gelombang |
| 6554.DCG | | Pelatihan Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan |
| | 87 | Perekrutan Komcad Golongan Perwira, Bintara dan Tamtama Rayon I |
| | 88 | Perekrutan Komcad Golongan Perwira, Bintara dan Tamtama Rayon II |
| | 89 | Perekrutan Komcad Golongan Perwira, Bintara dan Tamtama Rayon III |
| | 90 | Perekrutan Komcad Golongan Perwira, Bintara dan Tamtama Rayon IV |
| | 91 | Perekrutan Komcad Golongan Perwira, Bintara dan Tamtama Rayon V |
| | 92 | Latihan Dasar Militer Komcad Golongan Perwira, Bintara dan Tamtama Rayon I |
| | 93 | Latihan Dasar Militer Komcad Golongan Perwira, Bintara dan Tamtama Rayon II |

| Kode | No | Uraian |
|-----------------|-----------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| | 94 | Latihan Dasar Militer Komcad Golongan Perwira, Bintara dan Tamtama Rayon III |
| | 95 | Latihan Dasar Militer Komcad Golongan Perwira, Bintara dan Tamtama Rayon IV |
| | 96 | Latihan Dasar Militer Komcad Golongan Perwira, Bintara dan Tamtama Rayon V |
| | 97 | Latihan Penyegaran Komcad Golongan Perwira, Bintara dan Tamtama Rayon I |
| | 98 | Latihan Penyegaran Komcad Golongan Perwira, Bintara dan Tamtama Rayon II |
| | 99 | Latihan Penyegaran Komcad Golongan Perwira, Bintara dan Tamtama Rayon III |
| | 100 | Latihan Penyegaran Komcad Golongan Perwira, Bintara dan Tamtama Rayon IV |
| | 101 | Latihan Penyegaran Komcad Golongan Perwira, Bintara dan Tamtama Rayon V |
| 012.21 | | Markas Besar TNI |
| 6527.EBA | | Layanan Dukungan Manajemen Internal |
| | 102 | Forum Komuniti Hukum |
| 6530.BBA | | Layanan Bantuan Hukum Perseorangan |
| | 103 | Pembinaan Napi Prajurit TNI Rayon 1 |
| | 104 | Pembinaan Napi Prajurit TNI Rayon 2 |
| | 105 | Pembinaan Napi Prajurit TNI Rayon 3 |
| | 106 | Pembinaan Napi Prajurit TNI Rayon 4 |
| | 107 | Pembinaan Napi Prajurit TNI Rayon 5 |
| | 108 | Petunjuk Pembinaan Napi Prajurit |
| 6530.BCA | | Perkara Hukum Perseorangan |
| | 109 | Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer TK. I Luar Kota |
| | 110 | Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum TK. I Luar Kota |
| | 111 | Penuntutan dan Pengolahan Perkara Pidana Militer Rayon 1 |
| | 112 | Penuntutan dan Pengolahan Perkara Pidana Militer Rayon 2 |
| | 113 | Penuntutan dan Pengolahan Perkara Pidana Militer Rayon 3 |
| | 114 | Penuntutan dan Pengolahan Perkara Pidana Militer Rayon 4 |
| | 115 | Penuntutan dan Pengolahan Perkara Pidana Militer Rayon 5 |
| | 116 | Penuntutan dan Pengolahan Perkara Pidana Militer di Otmilti Rayon 1 |
| | 117 | Penuntutan dan Pengolahan Perkara Pidana Militer di Otmilti Rayon 2 |
| | 118 | Penuntutan dan Pengolahan Perkara Pidana Militer di Otmilti Rayon 3 |
| | 119 | Penuntutan dan Pengolahan Perkara Pidana Militer di Otmilti Rayon 4 |
| | 120 | Penuntutan dan Pengolahan Perkara Pidana Militer di Otmilti Rayon 5 |
| | 121 | Penuntutan dan Pengolahan Upaya Banding Perkara Pidana Militer |
| | 122 | Penuntutan dan Pengolahan Upaya Kasasi Perkara Pidana Militer Rayon 1 |
| | 123 | Penuntutan dan Pengolahan Upaya Kasasi Perkara Pidana Militer Rayon 2 |
| | 124 | Penuntutan dan Pengolahan Upaya Kasasi Perkara Pidana Militer Rayon 3 |
| | 125 | Penuntutan dan Pengolahan Upaya Kasasi Perkara Pidana Militer Rayon 4 |
| | 126 | Penuntutan dan Pengolahan Upaya Kasasi Perkara Pidana Militer Rayon 5 |
| | 127 | Penuntutan dan Pengolahan Peninjauan Kembali Perkara Pidana Militer |
| | 128 | Penuntutan dan Pengolahan Perkara Pelanggaran Pidana Militer Rayon 1 |
| | 129 | Penuntutan dan Pengolahan Perkara Pelanggaran Pidana Militer Rayon 2 |
| | 130 | Penuntutan dan Pengolahan Perkara Pelanggaran Pidana Militer Rayon 3 |
| | 131 | Penuntutan dan Pengolahan Perkara Pelanggaran Pidana Militer Rayon 4 |
| | 132 | Penuntutan dan Pengolahan Perkara Pelanggaran Pidana Militer Rayon 5 |
| | 133 | Petunjuk Penyelesaian Perkara Pidana |
| | 134 | Lelang Sita Rampasan |
| | 135 | Eksekusi Orang/Barang |
| | 136 | Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer Tk.I |
| | 137 | Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer Tk. Banding |
| | 138 | Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer Tk. Kasasi |
| | 139 | Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer Tk. PK |
| | 140 | Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum Tk.I |
| | 141 | Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum Tk. Banding |
| | 142 | Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum Tk. Kasasi |

| Kode | No | Uraian |
|-----------------|-----------|---|
| 1 | 2 | 3 |
| | 143 | Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum Tk. PK |
| | 144 | Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Penggugat Tk I |
| | 145 | Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pembanding Tk. Banding |
| | 146 | Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. Kasasi |
| | 147 | Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. PK |
| | 148 | Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Tergugat TK I |
| | 149 | Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Terbanding Tk. Banding |
| | 150 | Bantuan dan Nasehat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. Kasasi |
| | 151 | Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. PK |
| | 152 | Bantuan dan Nasihat Hukum Non Litigasi |
| | 153 | Pendapat dan Saran Hukum |
| | 154 | Penyidikan Perkara Pidana Prajurit |
| | 155 | Penyelesaian Perkara Pelanggaran Prajurit |
| | 156 | Penyelidikan Kriminal Perkara Pidana |
| | 157 | Pengolahan dan Penyelesaian Perkara Koneksitas |
| | 158 | Harmonisasi Perpang TNI |
| | 159 | Pengawasan Teknis Penyelesaian Perkara |
| | 160 | Pengamanan Barang Bukti |
| | 161 | Penelusuran Asset Perkara Pidana |
| | 162 | Asistensi Penyelesaian Perkara |
| | 163 | Eksaminasi Perkara |
| | 164 | Sertifikasi Oditur Militer |
| | 165 | Pengurusan Tahanan Sementara |
| | 166 | Penyidikan Perkara Koneksitas |
| | 167 | Penyidikan Perkara di Luar Negeri |
| 6537.BHA | | Operasi Bidang Pertahanan |
| | 168 | Peserta Penggelaran Satgas Operasi Intelijen Taktis TNI |
| | 169 | Perbatasan/Pulau Terluar/Ambalat Rayon I |
| | 170 | Perbatasan/Pulau Terluar/Ambalat Rayon II |
| | 171 | Perbatasan/Pulau Terluar/Ambalat Rayon III |
| | 172 | Perbatasan/Pulau Terluar/Ambalat Rayon IV |
| | 173 | Perbatasan/Pulau Terluar/Ambalat Rayon V (Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua Tengah) |
| | 174 | Rahwan Rayon I |
| | 175 | Rahwan Rayon II |
| | 176 | Rahwan Rayon III |
| | 177 | Rahwan Rayon IV |
| | 178 | Rahwan Rayon V (Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua Tengah) |
| | 179 | Pembentukan Satgas Yonmek UNIFIL |
| | 180 | Kegiatan Satgas Yonmek UNIFIL |
| | 181 | Purna Tugas Satgas Yonmek UNIFIL YONIF RK 114/SM, DAM IM ACEH |
| | 182 | Pembentukan 5 Satgas UNIFIL |
| | 183 | Kegiatan Gabungan 5 Satgas UNIFIL |
| | 184 | Kegiatan Satgas MPU UNIFIL |
| | 185 | Kegiatan Satgas FHQSU UNIFIL |
| | 186 | Kegiatan Satgas MCOU UNIFIL |
| | 187 | Kegiatan Satgas CIMIC UNIFIL |
| | 188 | Kegiatan Satgas Level II Hospital UNIFIL |
| | 189 | Gabungan Gelar Siap dan Rotasi 5 Satgas UNIFIL |
| | 190 | Gabungan Purna Tugas 5 Satgas UNIFIL |
| | 191 | Pembentukan Satgas MTF |
| | 192 | Kegiatan Satgas MTF |

| Kode | No | Uraian |
|-------------|-----------|---|
| 1 | 2 | 3 |
| | 193 | Purna Tugas Satgas MTF |
| | 194 | Pembentukan Satgas Yon RDB MONUSCO |
| | 195 | Kegiatan Satgas Yon RDB MONUSCO |
| | 196 | Purna Tugas Satgas Yon RDB MONUSCO |
| | 197 | Pembentukan Satgas Yon KIZI MONUSCO YONZIKON 1/DD, MEDAN SUMATRA UTARA |
| | 198 | Kegiatan Satgas Yon KIZI MONUSCO |
| | 199 | Gelar Siap dan Rotasi Satgas KIZI MONUSCO |
| | 200 | Purna Tugas Satgas KIZI MONUSCO |
| | 201 | Pembentukan Satgas Kizi Minusca Car YONZIPUR 10/JP/2/, KOSTRAD PROBOLINGGO, JATIM |
| | 202 | Kegiatan Satgas Minusca Car |
| | 203 | Purna Tugas Satgas Kizi Minusca Car |
| | 204 | Pembentukan Military Expert On Mission |
| | 205 | Kegiatan Military Expert On Mission |
| | 206 | Peserta Operasi Rutin Integratif Rayon I |
| | 207 | Peserta Operasi Rutin Integratif Rayon II |
| | 208 | Peserta Operasi Rutin Integratif Rayon III |
| | 209 | Peserta Operasi Intelijen Rutin Rayon I |
| | 210 | Peserta Operasi Intelijen Rutin Rayon II |
| | 211 | Peserta Operasi Intelijen Rutin Rayon III |
| | 212 | Peserta Operasi Intelijen Rutin Rayon IV |
| | 213 | Peserta Operasi Intelijen Rutin Rayon V |
| | 214 | Peserta Operasi Teritorial Integratif Giat Tahwil Rayon I |
| | 215 | Peserta Operasi Teritorial Integratif Giat Tahwil Rayon II |
| | 216 | Peserta Operasi Teritorial Integratif Giat Tahwil Rayon III |
| | 217 | Peserta Operasi Teritorial Integratif Giat Tahwil Rayon IV |
| | 218 | Peserta Operasi Teritorial Integratif Giat Tahwil Rayon V |
| | 219 | Peserta Operasi Teritorial Integratif Giat Komsos TNI Terpusat |
| | 220 | Peserta Operasi Teritorial Integratif Giat Komsos TNI Rayon I |
| | 221 | Peserta Operasi Teritorial Integratif Giat Komsos TNI Rayon II |
| | 222 | Peserta Operasi Teritorial Integratif Giat Komsos TNI Rayon III |
| | 223 | Peserta Operasi Teritorial Integratif Giat Komsos TNI Rayon IV |
| | 224 | Peserta Operasi Teritorial Integratif Giat Komsos TNI Rayon V |
| | 225 | Peserta Operasi Teritorial Integratif Giat Operasi Teritorial Rayon I |
| | 226 | Peserta Operasi Teritorial Integratif Giat Operasi Teritorial Rayon II |
| | 227 | Peserta Operasi Teritorial Integratif Giat Operasi Teritorial Rayon III |
| | 228 | Peserta Operasi Teritorial Integratif Giat Operasi Teritorial Rayon IV |
| | 229 | Peserta Operasi Teritorial Integratif Giat Operasi Teritorial Rayon V |
| | 230 | Peserta Operasi Teritorial Integratif Giat Karya Bakti di Daerah Rayon I |
| | 231 | Peserta Operasi Teritorial Integratif Giat Karya Bakti di Daerah Rayon II |
| | 232 | Peserta Operasi Teritorial Integratif Giat Karya Bakti di Daerah Rayon III |
| | 233 | Peserta Operasi Teritorial Integratif Giat Karya Bakti di Daerah Rayon IV |
| | 234 | Peserta Operasi Teritorial Integratif Giat Karya Bakti di Daerah Rayon V |
| | 235 | Peserta Operasi Teritorial Integratif Giat Pamtas, Pam Rahwan dan Pam Puter |
| | 236 | Penggelaran Satgas Ops Intelijen Strategis TNI |
| | 237 | Peserta Operasi Siber TNI |
| | 238 | Peserta Operasi Rutin Integratif Rayon IV |
| | 239 | Peserta Operasi Rutin Integratif Rayon V |
| | 240 | Penggelaran Satgas Operasi Penerangan TNI |
| | 241 | Perbatasan/Pulau Terluar/Ambalat Rayon V (Papua Selatan) |
| | 242 | Perbatasan/Pulau Terluar/Ambalat Rayon V (Papua Pagunungan) |
| | 243 | Rahwan Rayon V (Papua Selatan) |

| Kode | No | Uraian |
|-----------------|-----------|---|
| 1 | 2 | 3 |
| | 244 | Rahwan Rayon V (Papua Pegunungan) |
| | 245 | PEMBENTUKAN SATGAS TONZIHOR UNIFIL |
| | 246 | LATPRATUGAS TONZIHOR UNIFIL |
| | 247 | PURNA TUGAS TONZIHOR UNIFIL |
| 6537.BHB | | Operasi Bidang Keamanan |
| | 248 | Penggelaran Satgas Operasi Perbantuan TNI kepada Polri Wilayah I |
| | 249 | Penggelaran Satgas Operasi Perbantuan TNI kepada Polri Wilayah II |
| | 250 | Penggelaran Satgas Operasi Perbantuan TNI kepada Polri Wilayah III |
| | 251 | Penggelaran Satgas Operasi Perbantuan TNI kepada Polri Wilayah IV |
| | 252 | Penggelaran Satgas Operasi Perbantuan TNI kepada Polri Wilayah V |
| 6538.DCG | | Pelatihan Bidang Pertahanan dan Keamanan |
| | 253 | Seleksi Penerimaan (Werving) Calon Pa PK TNI |
| | 254 | Seleksi Penerimaan (Werving) Calon Pa PSDP Pnb TNI |
| | 255 | Seleksi Penerimaan (Werving) Mahasiswa Beasiswa TNI Calon Pa PK TNI |
| | 256 | Penerimaan CPNS UO Mabes TNI |
| | 257 | Diklat Alih PNS |
| | 258 | Pendidikan Dasar (Diksar) Integratif Capratar Akademi TNI |
| | 259 | Seleksi Penerimaan (Werving) Calon Taruna/Taruni Akademi TNI |
| | 260 | Kursus Perwira Panitera TNI |
| | 261 | Pendidikan Pertama Pa PSDP Pnb TNI |
| | 262 | Pendidikan Lanjutan Pa PSDP PNB TNI |
| | 263 | Pendidikan Pertama (Dikma) Pa PK Pria TNI |
| | 264 | Pendidikan Pertama PA PK Wanita TNI |
| | 265 | Seleksi Casis Dikreg Sesko TNI |
| | 266 | Lulusan Sesko TNI |
| | 267 | Kursus Perwira Penerangan TNI |
| | 268 | Kursus Tenaga Pendidik TNI |
| | 269 | Pendidikan Pengembangan Khusus/Spesialisasi Perwira |
| | 270 | Pendidikan Pengembangan Khusus/Spesialisasi Bintara |
| | 271 | Pendidikan Sekolah Instruktur Penerbang TNI |
| | 272 | Kursus Jabatan Hakim Militer TNI |
| | 273 | Kursus Jabatan Oditor Militer TNI |
| | 274 | Kursus Tenaga Inti Pembinaan Mental TNI |
| | 275 | Pendidikan SAR TNI |
| | 276 | Pendidikan Susjemen Penanggulangan Bencana TNI |
| | 277 | Kursus Dasar Perwira Intelijen |
| | 278 | Kursus Perwira Kontra Intelijen |
| | 279 | Kursus Perwira Intelijen Strategis |
| | 280 | Kursus Perwira Sandi Dan Intelijen |
| | 281 | Kursus Bintara Sandi Dan Intelijen |
| | 282 | Kursus Dasar Bintara Intelijen |
| | 283 | Kursus Perwira Intelijen Siber |
| | 284 | Kursus Bintara Intelijen Siber |
| | 285 | Kursus Perwira Intelijen Medis |
| | 286 | Kursus Perwira Intelijen Ekonomi |
| | 287 | Pembekalan Intelijen |
| | 288 | Kursus Perwira Interogator |
| | 289 | Kursus Bintara Interogator |
| | 290 | Seleksi Asisten Atase Pertahanan RI |
| | 291 | Kursus Bahasa Inggris Asisten Atase Pertahanan RI |
| | 292 | Kursus Komputer Asisten Atase Pertahanan RI |
| | 293 | Kursus Sandi Asisten Atase Pertahanan RI |
| | 294 | Seleksi Atase Pertahanan RI |

| Kode | No | Uraian |
|-----------------|-----------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| | 295 | Seleksi Kursus Perwira Intelijen |
| | 296 | Seleksi Kursus Bintara Intelijen |
| | 297 | Penataran/Latihan Gabungan Bangspes |
| | 298 | Penataran/Latihan PA Bangspes |
| | 299 | Penataran/Latihan BA Bangspes |
| | 300 | Penataran/Latihan TA Bangspes |
| | 301 | Sekolah Manajemen Dan Analisis Intelijen (SMAI) |
| | 302 | Kursus Perwira Intelijen Teknik |
| | 303 | Kursus Bintara Intelijen Teknik |
| | 304 | Kursus Perwira Intelijen Strategis Atase Pertahanan RI |
| | 305 | Kursus Perwira Penggalangan |
| | 306 | Kursus Perwira PCI |
| | 307 | Kursus Perwira Litpers |
| | 308 | Kursus Atase Pertahanan RI |
| | 309 | Penataran Istri Atase Pertahanan RI |
| | 310 | Kursus Dasar Perwira Intelijen Teritorial |
| | 311 | Kursus Dasar Bintara Intelijen Teritorial |
| | 312 | Pendidikan Sekbang Terpadu TNI |
| | 313 | Kursus Sandi Atase Pertahanan RI |
| | 314 | Kursus Perwira Intelijen Strategis Asisten Atase Pertahanan RI |
| | 315 | Kursus Asisten Atase Pertahanan RI |
| | 316 | Penataran Istri Asisten Atase Pertahanan RI |
| | 317 | Kursus Bahasa Inggris Atase Pertahanan RI |
| | 318 | Kursus Komputer Atase Pertahanan RI |
| | 319 | Pendidikan Suspa Cyber TNI |
| | 320 | Seleksi Sus Jab Oditor Militer |
| | 321 | Seleksi Sus Jab Hakim Militer |
| | 322 | Pendidikan Susjemen Pengadaan Barang/Jasa TNI |
| | 323 | Pendidikan Susjemen Auditor Ahli Pertama TNI |
| | 324 | Pendidikan Susjemen Rengar TNI |
| | 325 | Kursus Perwira Administrasi Keuangan |
| | 326 | Pendidikan Sistem Pertahanan Udara Nasional TNI |
| | 327 | Kursus Perwira Perang Elektronika Pertahanan Udara |
| | 328 | Kursus Perwira Pertahanan Udara Pasif |
| | 329 | Pendidikan Pertama (Dikma) Pa PK Panselinda Khusus Pria TNI |
| | 330 | Pendidikan Pertama (Dikma) Pa PK Panselinda Khusus Wanita TNI |
| | 331 | Pendidikan Pertama Pa PSDP Pertanian Pria TNI |
| | 332 | Pendidikan Pertama Pa PSDP Pertanian Wanita TNI |
| | 333 | Pendidikan Pertama Siber Pria TNI |
| | 334 | Pendidikan Pertama Siber Wanita TNI |
| | 335 | Pendidikan Kursus Dasar Operator Pesawat Terbang Tanpa Awak (PTTA) TNI |
| | 336 | Pendidikan Kursus Perwira Sejarah TNI |
| | 337 | Pendidikan Kursus Perwira Administrasi Pemilah Perkara TNI |
| 6539.DCG | | Pelatihan Bidang Pertahanan dan Keamanan |
| | 338 | Peserta Latihan Bersama Internasional di Luar Negeri |
| | 339 | Peserta Latihan Bersama Internasional di Dalam Negeri |
| | 340 | Peserta Latihan Kesiapsiagaan Operasi Wilayah I |
| | 341 | Peserta Latihan Kesiapsiagaan Operasi Wilayah II |
| | 342 | Peserta Latihan Kesiapsiagaan Operasi Wilayah III |
| | 343 | Peserta Latihan Kesiapsiagaan Operasi Wilayah IV |
| | 344 | Peserta Latihan Kesiapsiagaan Operasi Wilayah V |
| | 345 | Peserta Latihan Menembak Senjata Ringan Balakpus TNI |
| | 346 | Peserta Latihan Fungsi Teknis Balakpus TNI |

| Kode | No | Uraian |
|-----------------|-----------|---|
| 1 | 2 | 3 |
| | 347 | Peserta Latihan Pratugas Operasi Pamtas/Rahwan (Wilayah I) |
| | 348 | Peserta Latihan Pratugas Operasi Pamtas/Rahwan (Wilayah II) |
| | 349 | Peserta Latihan Pratugas Operasi Pamtas/Rahwan (Wilayah III) |
| | 350 | Peserta Latihan Pratugas Operasi Pamtas/Rahwan (Wilayah IV) |
| | 351 | Peserta Latihan Pratugas Operasi Pamtas/Rahwan (Wilayah V) (Maluku, Maluku Utara , Papua, Papua Barat, Papua Barat Daya,Papua Tengah) |
| | 352 | Peserta Latihan Pratugas Operasi Pam Ambalat/Puter (Wilayah I) |
| | 353 | Peserta Latihan Pratugas Operasi Pam Ambalat/Puter (Wilayah II) |
| | 354 | Peserta Latihan Pratugas Operasi Satgas Intel |
| | 355 | Peserta Latihan Pratugas Operasi Pamtas/Rahwan (Wilayah V) (Papua Selatan) |
| | 356 | Peserta Latihan Pratugas Operasi Pamtas/Rahwan (Wilayah V) (Papua Pegunungan) |
| | 357 | Peserta Latihan Pratugas Operasi Pam Ambalat/Puter (Wilayah III) |
| | 358 | Peserta Latihan Pratugas Operasi Pam Ambalat/Puter (Wilayah IV) |
| | 359 | Peserta Latihan Pratugas Operasi Pam Ambalat/Puter (Wilayah V) (Maluku, Maluku Utara , Papua, Papua Barat, Papua Barat Daya,Papua Tengah) |
| | 360 | Peserta Latihan Pratugas Operasi Pam Ambalat/Puter (Wilayah V) (Papua Selatan) |
| | 361 | Peserta Latihan Pratugas Operasi Pam Ambalat/Puter (Wilayah V) (Papua Pegunungan) |
| 012.22 | | Marksas Besar TNI AD |
| 1466.DCG | | Pelatihan Bidang Pertahanan dan Keamanan |
| | 362 | Latihan Perorangan Matra Darat Rayon I (Tingkat Kompi BS Dan Detasemen) |
| | 363 | Latihan Perorangan Matra Darat Rayon II (Tingkat Kompi BS Dan Detasemen) |
| | 364 | Latihan Perorangan Matra Darat Rayon III (Tingkat Kompi BS Dan Detasemen) |
| | 365 | Latihan Perorangan Matra Darat Rayon IV (Tingkat Kompi BS Dan Detasemen) |
| | 366 | Latihan Perorangan Matra Darat Rayon V (Tingkat Kompi BS Dan Detasemen) |
| | 367 | Latihan Perorangan Matra Darat Rayon I (Batalyon Terpusat) |
| | 368 | Latihan Perorangan Matra Darat Rayon II (Batalyon Terpusat) |
| | 369 | Latihan Perorangan Matra Darat Rayon III (Batalyon Terpusat) |
| | 370 | Latihan Perorangan Matra Darat Rayon IV (Batalyon Terpusat) |
| | 371 | Latihan Perorangan Matra Darat Rayon V (Batalyon Terpusat) |
| | 372 | Latihan Perorangan Matra Darat Rayon I (Batalyon Tersebar) |
| | 373 | Latihan Perorangan Matra Darat Rayon II (Batalyon Tersebar) |
| | 374 | Latihan Perorangan Matra Darat Rayon III (Batalyon Tersebar) |
| | 375 | Latihan Perorangan Matra Darat Rayon IV (Batalyon Tersebar) |
| | 376 | Latihan Perorangan Matra Darat Rayon V (Batalyon Tersebar) |
| | 377 | Latihan Perorangan Matra Darat Rayon I (Batalyon Tersebar Jauh) |
| | 378 | Latihan Perorangan Matra Darat Rayon II (Batalyon Tersebar Jauh) |
| | 379 | Latihan Perorangan Matra Darat Rayon III (Batalyon Tersebar Jauh) |
| | 380 | Latihan Perorangan Matra Darat Rayon IV (Batalyon Tersebar Jauh) |
| | 381 | Latihan Perorangan Matra Darat Rayon V (Batalyon Tersebar Jauh) |
| | 382 | Latihan Perorangan Matra Darat Rayon I (Balakpus, Balakdam Dan Balak Aju) |
| | 383 | Latihan Perorangan Matra Darat Rayon II (Balakpus, Balakdam Dan Balak Aju) |
| | 384 | Latihan Perorangan Matra Darat Rayon III (Balakpus, Balakdam Dan Balak Aju) |
| | 385 | Latihan Perorangan Matra Darat Rayon IV (Balakpus, Balakdam Dan Balak Aju) |
| | 386 | Latihan Perorangan Matra Darat Rayon V (Balakpus, Balakdam Dan Balak Aju) |
| | 387 | Latihan Perorangan Matra Darat Rayon I (Satuan Korem Materi Latorsar Ter) |
| | 388 | Latihan Perorangan Matra Darat Rayon II (Satuan Korem Materi Latorsar Ter) |
| | 389 | Latihan Perorangan Matra Darat Rayon III (Satuan Korem Materi Latorsar Ter) |
| | 390 | Latihan Perorangan Matra Darat Rayon IV (Satuan Korem Materi Latorsar Ter) |
| | 391 | Latihan Perorangan Matra Darat Rayon V (Satuan Korem Materi Latorsar Ter) |
| | 392 | Latihan Perorangan Matra Darat Rayon I (Satuan Korem Materi Latorsar Intel) |
| | 393 | Latihan Perorangan Matra Darat Rayon II (Satuan Korem Materi Latorsar Intel) |
| | 394 | Latihan Perorangan Matra Darat Rayon III (Satuan Korem Materi Latorsar Intel) |
| | 395 | Latihan Perorangan Matra Darat Rayon IV (Satuan Korem Materi Latorsar Intel) |

| Kode | No | Uraian |
|-----------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 |
| | 396 | Latihan Perorangan Matra Darat Rayon V (Satuan Korem Materi Latorsar Intel) |
| | 397 | Latihan Perorangan Matra Darat Rayon I (Satuan Kodim Mudah Terjangkau Materi Latorsar Ter) |
| | 398 | Latihan Perorangan Matra Darat Rayon II (Satuan Kodim Mudah Terjangkau Materi Latorsar Ter) |
| | 399 | Latihan Perorangan Matra Darat Rayon III (Satuan Kodim Mudah Terjangkau Materi Latorsar Ter) |
| | 400 | Latihan Perorangan Matra Darat Rayon IV (Satuan Kodim Mudah Terjangkau Materi Latorsar Ter) |
| | 401 | Latihan Perorangan Matra Darat Rayon V (Satuan Kodim Mudah Terjangkau Materi Latorsar Ter) |
| | 402 | Latihan Perorangan Matra Darat Rayon I (Satuan Kodim Sulit Terjangkau Materi Latorsar Ter) |
| | 403 | Latihan Perorangan Matra Darat Rayon II (Satuan Kodim Sulit Terjangkau Materi Latorsar Ter) |
| | 404 | Latihan Perorangan Matra Darat Rayon III (Satuan Kodim Sulit Terjangkau Materi Latorsar Ter) |
| | 405 | Latihan Perorangan Matra Darat Rayon IV (Satuan Kodim Sulit Terjangkau Materi Latorsar Ter) |
| | 406 | Latihan Perorangan Matra Darat Rayon V (Satuan Kodim Sulit Terjangkau Materi Latorsar Ter) |
| | 407 | Latihan Perorangan Matra Darat Rayon I (Satuan Kodim Materi Latorsar Intel) |
| | 408 | Latihan Perorangan Matra Darat Rayon II (Satuan Kodim Materi Latorsar Intel) |
| | 409 | Latihan Perorangan Matra Darat Rayon III (Satuan Kodim Materi Latorsar Intel) |
| | 410 | Latihan Perorangan Matra Darat Rayon IV (Satuan Kodim Materi Latorsar Intel) |
| | 411 | Latihan Perorangan Matra Darat Rayon V (Satuan Kodim Materi Latorsar Intel) |
| 6501.BBA | Layanan Bantuan Hukum Perseorangan | |
| | 412 | Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer Tk. I Rayon I |
| | 413 | Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer Tk. I Rayon II |
| | 414 | Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer Tk. I Rayon III |
| | 415 | Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer Tk. I Rayon IV |
| | 416 | Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer Tk. I Rayon V |
| | 417 | Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer Tk. Banding |
| | 418 | Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer Tk. Kasasi |
| | 419 | Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer Tk. PK |
| | 420 | Pendapat dan Saran Hukum Pidana (PSH Pidana) |
| | 421 | Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum Tk. I Rayon I |
| | 422 | Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum Tk. I Rayon II |
| | 423 | Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum Tk. I Rayon III |
| | 424 | Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum Tk. I Rayon IV |
| | 425 | Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum Tk. I Rayon V |
| | 426 | Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum Tk. Banding |
| | 427 | Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum Tk. Kasasi |
| | 428 | Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum Tk. PK |
| | 429 | Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Penggugat Tk. I Rayon I |
| | 430 | Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Penggugat Tk. I Rayon II |
| | 431 | Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Penggugat Tk. I Rayon III |
| | 432 | Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Penggugat Tk. I Rayon IV |
| | 433 | Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Penggugat Tk. I Rayon V |
| | 434 | Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pembanding Tk. Banding Rayon I |
| | 435 | Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pembanding Tk. Banding Rayon II |
| | 436 | Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pembanding Tk. Banding Rayon III |
| | 437 | Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pembanding Tk. Banding Rayon IV |

| Kode | No | Uraian |
|-----------------|-----------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| | 438 | Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pembanding Tk. Banding Rayon V |
| | 439 | Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. Kasasi Rayon I |
| | 440 | Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. Kasasi Rayon II |
| | 441 | Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. Kasasi Rayon III |
| | 442 | Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. Kasasi Rayon IV |
| | 443 | Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. Kasasi Rayon V |
| | 444 | Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. PK Rayon I |
| | 445 | Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. PK Rayon II |
| | 446 | Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. PK Rayon III |
| | 447 | Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. PK Rayon IV |
| | 448 | Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. PK Rayon V |
| | 449 | Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Tergugat Tk. I Rayon I |
| | 450 | Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Tergugat Tk. I Rayon II |
| | 451 | Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Tergugat Tk. I Rayon III |
| | 452 | Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Tergugat Tk. I Rayon IV |
| | 453 | Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Tergugat Tk. I Rayon V |
| | 454 | Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Terbanding Tk. Banding Rayon I |
| | 455 | Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Terbanding Tk. Banding Rayon II |
| | 456 | Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Terbanding Tk. Banding Rayon III |
| | 457 | Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Terbanding Tk. Banding Rayon IV |
| | 458 | Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Terbanding Tk. Banding Rayon V |
| | 459 | Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. Kasasi Rayon I |
| | 460 | Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. Kasasi Rayon II |
| | 461 | Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. Kasasi Rayon III |
| | 462 | Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. Kasasi Rayon IV |
| | 463 | Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. Kasasi Rayon V |
| | 464 | Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. PK Rayon I |
| | 465 | Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. PK Rayon II |
| | 466 | Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. PK Rayon III |
| | 467 | Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. PK Rayon IV |
| | 468 | Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. PK Rayon V |
| | 469 | Pendapat dan Saran Hukum Perdata (PSH Perdata) |
| | 470 | Bantuan Hukum (Non Litigasi) Rayon I |
| | 471 | Bantuan Hukum (Non Litigasi) Rayon II |
| | 472 | Bantuan Hukum (Non Litigasi) Rayon III |
| | 473 | Bantuan Hukum (Non Litigasi) Rayon IV |
| | 474 | Bantuan Hukum (Non Litigasi) Rayon V |
| 6501.BCA | Perkara Hukum Perseorangan | |
| | 475 | Penyidikan Perkara Pidana Prajurit Rayon I |
| | 476 | Penyidikan Perkara Pidana Prajurit Rayon II |
| | 477 | Penyidikan Perkara Pidana Prajurit Rayon III |
| | 478 | Penyidikan Perkara Pidana Prajurit Rayon IV |
| | 479 | Penyidikan Perkara Pidana Prajurit Rayon V |
| | 480 | Penyelidikan Kriminal Perkara Pidana Rayon I |
| | 481 | Penyelidikan Kriminal Perkara Pidana Rayon II |
| | 482 | Penyelidikan Kriminal Perkara Pidana Rayon III |
| | 483 | Penyelidikan Kriminal Perkara Pidana Rayon IV |
| | 484 | Penyelidikan Kriminal Perkara Pidana Rayon V |
| | 485 | Penyidikan Perkara Pelanggaran Prajurit Rayon I |

| Kode | No | Uraian |
|-----------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 |
| | 486 | Penyidikan Perkara Pelanggaran Prajurit Rayon II |
| | 487 | Penyidikan Perkara Pelanggaran Prajurit Rayon III |
| | 488 | Penyidikan Perkara Pelanggaran Prajurit Rayon IV |
| | 489 | Penyidikan Perkara Pelanggaran Prajurit Rayon V |
| | 490 | Pengurusan Tahanan Sementara Rayon I |
| | 491 | Pengurusan Tahanan Sementara Rayon II |
| | 492 | Pengurusan Tahanan Sementara Rayon III |
| | 493 | Pengurusan Tahanan Sementara Rayon IV |
| | 494 | Pengurusan Tahanan Sementara Rayon V |
| | 495 | Pengurusan Tahanan Dalam Proses Penuntutan Rayon I |
| | 496 | Pengurusan Tahanan Dalam Proses Penuntutan Rayon II |
| | 497 | Pengurusan Tahanan Dalam Proses Penuntutan Rayon III |
| | 498 | Pengurusan Tahanan Dalam Proses Penuntutan Rayon IV |
| | 499 | Pengurusan Tahanan Dalam Proses Penuntutan Rayon V |
| | 500 | Penyidikan Perkara Pidana Berat Prajurit Rayon I |
| | 501 | Penyidikan Perkara Pidana Berat Prajurit Rayon II |
| | 502 | Penyidikan Perkara Pidana Berat Prajurit Rayon III |
| | 503 | Penyidikan Perkara Pidana Berat Prajurit Rayon IV |
| | 504 | Penyidikan Perkara Pidana Berat Prajurit Rayon V |
| | 505 | Pengurusan Tahanan Hukuman Disiplin Rayon I |
| | 506 | Pengurusan Tahanan Hukuman Disiplin Rayon II |
| | 507 | Pengurusan Tahanan Hukuman Disiplin Rayon III |
| | 508 | Pengurusan Tahanan Hukuman Disiplin Rayon IV |
| | 509 | Pengurusan Tahanan Hukuman Disiplin Rayon V |
| | 510 | Pengawalan Polisi Militer Rayon I |
| | 511 | Pengawalan Polisi Militer Rayon II |
| | 512 | Pengawalan Polisi Militer Rayon III |
| | 513 | Pengawalan Polisi Militer Rayon IV |
| | 514 | Pengawalan Polisi Militer Rayon V |
| 6501.EBA | Layanan Dukungan Manajemen Internal | |
| | 515 | Bankum Non Litigasi Penyuluhan Hukum |
| | 516 | Bankum Non Litigasi Pembekalan Hukum |
| | 517 | Perjanjian Kerjasama |
| | 518 | Sinkronisasi dan Harmonisasi Perundang-Undangan |
| 6505.DCG | Pelatihan Bidang Pertahanan dan Keamanan | |
| | 519 | Koptar Pria |
| | 520 | Koptar Wanita |
| | 521 | Sersan Taruna Pria |
| | 522 | Sersan Taruna Wanita |
| | 523 | Sermadatar Pria |
| | 524 | Sermadatar Wanita |
| | 525 | Sermatar Pria |
| | 526 | Sermatar Wanita |
| | 527 | Dikmaba Pria Rayon I |
| | 528 | Dikmaba Pria Rayon II |
| | 529 | Dikmaba Pria Rayon III |
| | 530 | Dikmaba Pria Rayon IV |
| | 531 | Dikmaba Pria Rayon V |
| | 532 | Dikmaba Wanita |
| | 533 | Dikmata Rayon I |
| | 534 | Dikmata Rayon II |
| | 535 | Dikmata Rayon III |
| | 536 | Dikmata Rayon IV |

| Kode | No | Uraian |
|-------------|-----------|---|
| 1 | 2 | 3 |
| | 537 | Dikmata Rayon V |
| | 538 | Werving Taruna Matra Darat |
| | 539 | Werving Bintara Umum Matra Darat |
| | 540 | Werving Tamtama Matra Darat Umum |
| | 541 | Diktukpa Reg/Sus |
| | 542 | Lulusan Diktukba Reg/Sus Rayon I |
| | 543 | Lulusan Diktukba Reg/Sus Rayon II |
| | 544 | Lulusan Diktukba Reg/Sus Rayon III |
| | 545 | Lulusan Diktukba Reg/Sus Rayon IV |
| | 546 | Lulusan Diktukba Reg/Sus Rayon V |
| | 547 | Peserta Diktukpa Reg/Sus Rayon I |
| | 548 | Peserta Diktukpa Reg/Sus Rayon II |
| | 549 | Peserta Diktukpa Reg/Sus Rayon III |
| | 550 | Peserta Diktukpa Reg/Sus Rayon IV |
| | 551 | Peserta Diktukpa Reg/Sus Rayon V |
| | 552 | Peserta Diktukba Reg/Sus Rayon I |
| | 553 | Peserta Diktukba Reg/Sus Rayon II |
| | 554 | Peserta Diktukba Reg/Sus Rayon III |
| | 555 | Peserta Diktukba Reg/Sus Rayon IV |
| | 556 | Peserta Diktukba Reg/Sus Rayon V |
| | 557 | Diklat Alih Golongan dari Gol II ke Gol III PNS Rayon I |
| | 558 | Diklat Alih Golongan dari Gol II ke Gol III PNS Rayon II |
| | 559 | Diklat Alih Golongan dari Gol II ke Gol III PNS Rayon III |
| | 560 | Diklat Alih Golongan dari Gol II ke Gol III PNS Rayon IV |
| | 561 | Diklat Alih Golongan dari Gol II ke Gol III PNS Rayon V |
| | 562 | Pendidikan Seskoad |
| | 563 | Diklapa I Cab Satpur/Banpur |
| | 564 | Diklapa I Cab Banmin |
| | 565 | Peserta Seskoad/Sesko TNI/Lemhannas Rayon I |
| | 566 | Peserta Seskoad/Sesko TNI/Lemhannas Rayon II |
| | 567 | Peserta Seskoad/Sesko TNI/Lemhannas Rayon III |
| | 568 | Peserta Seskoad/Sesko TNI/Lemhannas Rayon IV |
| | 569 | Peserta Seskoad/Sesko TNI/Lemhannas Rayon V |
| | 570 | Peserta Diklapa I/Diklapa II Rayon I |
| | 571 | Peserta Diklapa I/Diklapa II Rayon II |
| | 572 | Peserta Diklapa I/Diklapa II Rayon III |
| | 573 | Peserta Diklapa I/Diklapa II Rayon IV |
| | 574 | Peserta Diklapa I/Diklapa II Rayon V |
| | 575 | Pelatihan Kepemimpinan Pengawas |
| | 576 | Dikbangspespa Cab Satpur/Banpur |
| | 577 | Dikbangspespa Cab Banmin |
| | 578 | Dikcab Perwira Satpur/Banpur |
| | 579 | Dikcab Perwira Banmin |
| | 580 | Dikbangspesba Rayon I |
| | 581 | Dikbangspesba Rayon II |
| | 582 | Dikbangspesba Rayon III |
| | 583 | Dikbangspesba Rayon IV |
| | 584 | Dikbangspesba Rayon V |
| | 585 | Dikjur Bintara Rayon I |
| | 586 | Dikjur Bintara Rayon II |
| | 587 | Dikjur Bintara Rayon III |
| | 588 | Dikjur Bintara Rayon IV |
| | 589 | Dikjur Bintara Rayon V |

| Kode | No | Uraian |
|-----------------|-----------|---|
| 1 | 2 | 3 |
| | 590 | Diklatnis PNS |
| | 591 | Dikbangspesta Rayon I |
| | 592 | Dikbangspesta Rayon II |
| | 593 | Dikbangspesta Rayon III |
| | 594 | Dikbangspesta Rayon IV |
| | 595 | Dikbangspesta Rayon V |
| | 596 | Dikjur Tamtama Rayon I |
| | 597 | Dikjur Tamtama Rayon II |
| | 598 | Dikjur Tamtama Rayon III |
| | 599 | Dikjur Tamtama Rayon IV |
| | 600 | Dikjur Tamtama Rayon V |
| | 601 | Peserta Dikbangspes Pa/Ba/Ta Rayon I |
| | 602 | Peserta Dikbangspes Pa/Ba/Ta Rayon II |
| | 603 | Peserta Dikbangspes Pa/Ba/Ta Rayon III |
| | 604 | Peserta Dikbangspes Pa/Ba/Ta Rayon IV |
| | 605 | Peserta Dikbangspes Pa/Ba/Ta Rayon V |
| | 606 | Pendidikan Keahlian Rayon I |
| | 607 | Pendidikan Keahlian Rayon II |
| | 608 | Pendidikan Keahlian Rayon III |
| | 609 | Pendidikan Keahlian Rayon IV |
| | 610 | Pendidikan Keahlian Rayon V |
| | 611 | Pendidikan Komando dan Gultor |
| | 612 | Pendidikan Spesialisasi Pasukan Khusus |
| | 613 | Dik Iptek S-1 |
| | 614 | Dik Iptek D-3 Rayon I |
| | 615 | Dik Iptek D-3 Rayon II |
| | 616 | Dik Iptek D-3 Rayon III |
| | 617 | Dik Iptek D-3 Rayon IV |
| | 618 | Dik Iptek D-3 Rayon V |
| | 619 | Dik Iptek SMK Rayon I |
| | 620 | Dik Iptek SMK Rayon II |
| | 621 | Dik Iptek SMK Rayon III |
| | 622 | Dik Iptek SMK Rayon IV |
| | 623 | Dik Iptek SMK Rayon V |
| | 624 | Dik Iptek D4 Matra Darat |
| | 625 | Peserta Dik Keahlian dan Iptek Rayon I |
| | 626 | Peserta Dik Keahlian dan Iptek Rayon II |
| | 627 | Peserta Dik Keahlian dan Iptek Rayon III |
| | 628 | Peserta Dik Keahlian dan Iptek Rayon IV |
| | 629 | Peserta Dik Keahlian dan Iptek Rayon V |
| | 630 | Diklapa II Cab Satpur/Banpur |
| | 631 | Diklapa II Cab Banmin |
| | 632 | Latsar CPNS |
| | 633 | Pratar Pria |
| | 634 | Pratar Wanita |
| 012.23 | | Markas Besar TNI AL |
| 1506.DCG | | Pelatihan Bidang Pertahanan dan Keamanan |
| | 635 | Latihan Kematraan Rayon I |
| | 636 | Latihan Pasukan Khusus TNI AL Rayon I |
| | 637 | Latihan Satuan Rayon I |
| | 638 | Latihan Bersama Internasional Di Luar Negeri |
| | 639 | Latihan Bersama Internasional Di Dalam Negeri Rayon I |
| | 640 | Latihan Perorangan Marinir Rayon I |

| Kode | No | Uraian |
|-----------------|-----------|---|
| 1 | 2 | 3 |
| | 641 | Latihan Satuan Marinir Rayon I |
| | 642 | Latihan Perorangan Taifib-Denjaka Rayon I |
| | 643 | Latihan Satuan Taifib-Denjaka Rayon I |
| | 644 | Latihan Kematraan Rayon II |
| | 645 | Latihan Kematraan Rayon III |
| | 646 | Latihan Intelejen TNI AL RAYON I |
| | 647 | Latihan Kematraan Rayon IV |
| | 648 | Latihan Kematraan Rayon V |
| | 649 | Latihan Pasukan Khusus TNI AL Rayon II |
| | 650 | Latihan Pasukan Khusus TNI AL Rayon III |
| | 651 | Latihan Pasukan Khusus TNI AL Rayon IV |
| | 652 | Latihan Pasukan Khusus TNI AL Rayon V |
| | 653 | Latihan Satuan Rayon II |
| | 654 | Latihan Satuan Rayon III |
| | 655 | Latihan Satuan Rayon IV |
| | 656 | Latihan Satuan Rayon V |
| | 657 | Latihan Bersama Internasional Di Dalam Negeri Rayon II |
| | 658 | Latihan Bersama Internasional Di Dalam Negeri Rayon III |
| | 659 | Latihan Bersama Internasional Di Dalam Negeri Rayon IV |
| | 660 | Latihan Bersama Internasional Di Dalam Negeri Rayon V |
| | 661 | Latihan Satuan Marinir Rayon II |
| | 662 | Latihan Satuan Marinir Rayon III |
| | 663 | Latihan Satuan Marinir Rayon IV |
| | 664 | Latihan Satuan Marinir Rayon V |
| | 665 | Latihan Satuan Taifib-Denjaka Rayon V |
| | 666 | Latihan Perorangan Taifib-Denjaka V |
| | 667 | Latihan Perorangan Marinir Rayon II |
| | 668 | Latihan Perorangan Marinir Rayon III |
| | 669 | Latihan Perorangan Marinir Rayon IV |
| | 670 | Latihan Perorangan Marinir Rayon V |
| | 671 | Latihan Intelijen TNI AL Rayon II |
| | 672 | Latihan Intelijen TNI AL Rayon III |
| | 673 | Latihan Intelijen TNI AL Rayon IV |
| | 674 | Latihan Intelijen TNI AL Rayon V |
| 6525.BBA | | Layanan Bantuan Hukum Perseorangan |
| | 675 | Penyidikan Perkara Pidana Prajurit Rayon 1 |
| | 676 | Penyidikan Perkara Pidana Prajurit Rayon 2 |
| | 677 | Penyidikan Perkara Pidana Prajurit Rayon 3 |
| | 678 | Penyidikan Perkara Pidana Prajurit Rayon 4 |
| | 679 | Penyidikan Perkara Pidana Prajurit Rayon 5 |
| | 680 | Penyelidikan Kriminal Perkara Pidana Rayon 1 |
| | 681 | Penyelidikan Kriminal Perkara Pidana Rayon 2 |
| | 682 | Penyelidikan Kriminal Perkara Pidana Rayon 3 |
| | 683 | Penyelidikan Kriminal Perkara Pidana Rayon 4 |
| | 684 | Penyelidikan Kriminal Perkara Pidana Rayon 5 |
| | 685 | Penyidikan Perkara Pelanggaran Prajurit Rayon 1 |
| | 686 | Penyidikan Perkara Pelanggaran Prajurit Rayon 2 |
| | 687 | Penyidikan Perkara Pelanggaran Prajurit Rayon 3 |
| | 688 | Penyidikan Perkara Pelanggaran Prajurit Rayon 4 |
| | 689 | Penyidikan Perkara Pelanggaran Prajurit Rayon 5 |
| | 690 | Pengurusan Tahanan Sementara Rayon 1 |
| | 691 | Pengurusan Tahanan Sementara Rayon 2 |
| | 692 | Pengurusan Tahanan Sementara Rayon 3 |

| Kode | No | Uraian |
|-----------------|-----------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| | 693 | Pengurusan Tahanan Sementara Rayon 4 |
| | 694 | Pengurusan Tahanan Sementara Rayon 5 |
| | 695 | Penyidikan Perkara Pidana Berat Prajurit Rayon 1 |
| | 696 | Penyidikan Perkara Pidana Berat Prajurit Rayon 2 |
| | 697 | Penyidikan Perkara Pidana Berat Prajurit Rayon 3 |
| | 698 | Penyidikan Perkara Pidana Berat Prajurit Rayon 3 |
| | 699 | Penyidikan Perkara Pidana Berat Prajurit Rayon 5 |
| | 700 | Pengurusan Tahanan Dalam Proses Penuntutan Rayon 1 |
| | 701 | Pengurusan Tahanan Dalam Proses Penuntutan Rayon 2 |
| | 702 | Pengurusan Tahanan Dalam Proses Penuntutan Rayon 3 |
| | 703 | Pengurusan Tahanan Dalam Proses Penuntutan Rayon 4 |
| | 704 | Pengurusan Tahanan Dalam Proses Penuntutan Rayon 5 |
| | 705 | Pengurusan Tahanan Hukuman Disiplin Rayon 1 |
| | 706 | Pengurusan Tahanan Hukuman Disiplin Rayon 2 |
| | 707 | Pengurusan Tahanan Hukuman Disiplin Rayon 3 |
| | 708 | Pengurusan Tahanan Hukuman Disiplin Rayon 4 |
| | 709 | Pengurusan Tahanan Hukuman Disiplin Rayon 5 |
| 6525.BCA | | Perkara Hukum Perseorangan |
| | 710 | Penyidikan Tindak Pidana Tertentu Di Laut |
| | 711 | Pendapat Dan Saran Hukum Tindak Pidana Tertentu Di Laut |
| | 712 | Bantuan Dan Nasehat Hukum Perkara Pidana Militer Tk. I Rayon 1 |
| | 713 | Bantuan Dan Nasehat Hukum Perkara Pidana Militer Tk. I Rayon 2 |
| | 714 | Bantuan Dan Nasehat Hukum Perkara Pidana Militer Tk. I Rayon 3 |
| | 715 | Bantuan Dan Nasehat Hukum Perkara Pidana Militer Tk. I Rayon 4 |
| | 716 | Bantuan Dan Nasehat Hukum Perkara Pidana Militer Tk. I Rayon 5 |
| | 717 | Bantuan Dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer Tk. Banding |
| | 718 | Bantuan Dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer Tk. Kasasi |
| | 719 | Bantuan Dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer Tk. PK |
| | 720 | Pendapat dan Saran Hukum Pidana Militer |
| | 721 | Bantuan Dan Nasehat Hukum Perkara Pidana Umum Tk. I Rayon 1 |
| | 722 | Bantuan Dan Nasehat Hukum Perkara Pidana Umum Tk. I Rayon 2 |
| | 723 | Bantuan Dan Nasehat Hukum Perkara Pidana Umum Tk. I Rayon 3 |
| | 724 | Bantuan Dan Nasehat Hukum Perkara Pidana Umum Tk. I Rayon 4 |
| | 725 | Bantuan Dan Nasehat Hukum Perkara Pidana Umum Tk. I Rayon 5 |
| | 726 | Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum Tk. Banding |
| | 727 | Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum Tk. Kasasi |
| | 728 | Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum Tk. PK |
| | 729 | Pendapat dan Saran Hukum Pidana Umum |
| | 730 | Bantuan dan Nasihat hukum Perkara Perdata/TUN Penggugat Tk. I Rayon 1 |
| | 731 | Bantuan dan Nasihat hukum Perkara Perdata/TUN Penggugat Tk. I Rayon 2 |
| | 732 | Bantuan dan Nasihat hukum Perkara Perdata/TUN Penggugat Tk. I Rayon 3 |
| | 733 | Bantuan dan Nasihat hukum Perkara Perdata/TUN Penggugat Tk. I Rayon 4 |
| | 734 | Bantuan dan Nasihat hukum Perkara Perdata/TUN Penggugat Tk. I Rayon 5 |
| | 735 | Bantuan dan Nasihat hukum Perkara Perdata/TUN Pembanding Rayon 1 |
| | 736 | Bantuan dan Nasihat hukum Perkara Perdata/TUN Pembanding Rayon 2 |
| | 737 | Bantuan dan Nasihat hukum Perkara Perdata/TUN Pembanding Rayon 3 |
| | 738 | Bantuan dan Nasihat hukum Perkara Perdata/TUN Pembanding Rayon 4 |
| | 739 | Bantuan dan Nasihat hukum Perkara Perdata/TUN Pembanding Rayon 5 |
| | 740 | Bantuan dan Nasihat hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. Kasasi Rayon 1 |
| | 741 | Bantuan dan Nasihat hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. Kasasi Rayon 2 |
| | 742 | Bantuan dan Nasihat hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. Kasasi Rayon 3 |
| | 743 | Bantuan dan Nasihat hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. Kasasi Rayon 4 |
| | 744 | Bantuan dan Nasihat hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. Kasasi Rayon 5 |

| Kode | No | Uraian |
|-----------------|-----------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| | 745 | Bantuan dan Nasihat hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. PK Rayon 1 |
| | 746 | Bantuan dan Nasihat hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. PK Rayon 2 |
| | 747 | Bantuan dan Nasihat hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. PK Rayon 3 |
| | 748 | Bantuan dan Nasihat hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. PK Rayon 4 |
| | 749 | Bantuan dan Nasihat hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. PK Rayon 5 |
| | 750 | Bantuan dan Nasihat hukum Perkara Perdata/TUN Tergugat Tk. I Rayon 1 |
| | 751 | Bantuan dan Nasihat hukum Perkara Perdata/TUN Tergugat Tk. I Rayon 2 |
| | 752 | Bantuan dan Nasihat hukum Perkara Perdata/TUN Tergugat Tk. I Rayon 3 |
| | 753 | Bantuan dan Nasihat hukum Perkara Perdata/TUN Tergugat Tk. I Rayon 4 |
| | 754 | Bantuan dan Nasihat hukum Perkara Perdata/TUN Tergugat Tk. I Rayon 5 |
| | 755 | Bantuan dan Nasihat hukum Perkara Perdata/TUN Terbanding Tk. Banding Rayon 1 |
| | 756 | Bantuan dan Nasihat hukum Perkara Perdata/TUN Terbanding Tk. Banding Rayon 2 |
| | 757 | Bantuan dan Nasihat hukum Perkara Perdata/TUN Terbanding Tk. Banding Rayon 3 |
| | 758 | Bantuan dan Nasihat hukum Perkara Perdata/TUN Terbanding Tk. Banding Rayon 4 |
| | 759 | Bantuan dan Nasihat hukum Perkara Perdata/TUN Terbanding Tk. Banding Rayon 5 |
| | 760 | Bantuan dan Nasihat hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. Kasasi Rayon 1 |
| | 761 | Bantuan dan Nasihat hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. Kasasi Rayon 2 |
| | 762 | Bantuan dan Nasihat hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. Kasasi Rayon 3 |
| | 763 | Bantuan dan Nasihat hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. Kasasi Rayon 4 |
| | 764 | Bantuan dan Nasihat hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. Kasasi Rayon 5 |
| | 765 | Bantuan dan Nasihat hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. PK Rayon 1 |
| | 766 | Bantuan dan Nasihat hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. PK Rayon 2 |
| | 767 | Bantuan dan Nasihat hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. PK Rayon 3 |
| | 768 | Bantuan dan Nasihat hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. PK Rayon 4 |
| | 769 | Bantuan dan Nasihat hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. PK Rayon 5 |
| | 770 | Bantuan Hukum Non Litigasi Rayon 1 |
| | 771 | Bantuan Hukum Non Litigasi Rayon 2 |
| | 772 | Bantuan Hukum Non Litigasi Rayon 3 |
| | 773 | Bantuan Hukum Non Litigasi Rayon 4 |
| | 774 | Bantuan Hukum Non Litigasi Rayon 5 |
| | 775 | Pendapat dan Saran Hukum Perdata/Tun Penggugat |
| | 776 | Pendapat dan Saran Hukum Perdata/Tun Tergugat |
| 6557.DCG | | Pelatihan Bidang Pertahanan dan Keamanan |
| | 777 | Werving Calon Bintara Matra Laut |
| | 778 | Werving Calon Tamtama Matra Laut |
| | 779 | Peserta Diklapa |
| | 780 | Peserta Diktukpa Reguler dan Singkat |
| | 781 | Peserta Diktukba Reguler dan Singkat |
| | 782 | Peserta Kursus Manajemen Strategik |
| | 783 | Peserta Seskoal |
| | 784 | Seleksi Dik D-3 STTAL dan Kesehatan |
| | 785 | Seleksi Dik S-1 STTAL |
| | 786 | Seleksi Dik S-2 STTAL |
| | 787 | Peserta Dikspespa |
| | 788 | Peserta Dikspesba |
| | 789 | Peserta Dik Brevet |
| | 790 | Peserta Penerbang TNI AL |
| | 791 | DIKMA KOPTAR PRIA |
| | 792 | Dik D-3 Kodiklatlal |
| | 793 | DIKMA SERTAR PRIA |
| | 794 | Pendidikan Dasar Lanjutan Vokasi (Pria) |
| | 795 | Pendidikan Dasar Lanjutan Vokasi (Wanita) |
| | 796 | DIKMA SERMATAR Pria |

| Kode | No | Uraian |
|-----------------|-----------|---|
| 1 | 2 | 3 |
| | 797 | DIKMA SERMATAR Wanita |
| | 798 | Diksargolan Perwira/PA PK Matra Laut |
| | 799 | Dikma Bintara Pria Matra Laut |
| | 800 | Diksargolan Bintara Matra Laut |
| | 801 | Dikma Tamtama Matra Laut |
| | 802 | Diksargolan Tamtama Matra Laut |
| | 803 | Dik Seskoal |
| | 804 | Diklapa Matra Laut |
| | 805 | Diktukpa Matra Laut |
| | 806 | Diktukba Matra Laut |
| | 807 | Dikbangsus Perwira Matra Laut |
| | 808 | Dikbangsus Bintara Matra Laut |
| | 809 | Dikbangsus Tamtama Matra Laut |
| | 810 | Diksus Manajemen Strategik Matra Laut |
| | 811 | Diksus Penerbang Matra Laut |
| | 812 | Diksus Brevet Matra Laut |
| | 813 | Dik STTAL D-3 |
| | 814 | Dik STTAL S-1 |
| | 815 | Dik S-2 STTAL |
| | 816 | Dikma Bintara Matra Laut di Tanjung Uban |
| | 817 | Diksargolan Bintara Matra Laut di Tanjung Uban |
| | 818 | Dikma Tamtama Matra Laut di Tanjung Uban |
| | 819 | Diksargolan Tamtama Matra Laut di Tanjung Uban |
| | 820 | Dikma Bintara Matra Laut di Makassar |
| | 821 | Diksargolan Bintara Matra Laut di Makassar |
| | 822 | Dikma Tamtama Matra Laut di Makassar |
| | 823 | Diksargolan Tamtama Matra Laut di Makassar |
| | 824 | Dikma Bintara Matra Laut di Sorong |
| | 825 | Diksargolan Bintara Matra Laut di Sorong |
| | 826 | Dikma Tamtama Matra Laut di Sorong |
| | 827 | Diksargolan Tamtama Matra Laut di Sorong |
| | 828 | Peserta Dikspesta |
| | 829 | Dikma Bintara Matra Laut Di Manado |
| | 830 | Diksargolan Bintara Matra Laut di Manado |
| | 831 | Dikma Tamtama Matra Laut di Manado |
| | 832 | Diksargolan Tamtama Matra Laut di Manado |
| | 833 | Peserta Lemhanas |
| | 834 | Peserta Sesko TNI (TNI AL) |
| | 835 | Peserta Sus PTAL (Penanggulangan Teror Aspek Laut) |
| | 836 | Peserta Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) |
| | 837 | DIKMA PRATAR PRIA |
| 012.24 | | Markas Besar TNI AU |
| 1536.DCG | | Pelatihan Bidang Pertahanan dan Keamanan |
| | 838 | Peserta Latihan Kematraan Rayon I |
| | 839 | Peserta Latihan Bersama Internasional Di Luar Negeri |
| | 840 | Peserta Latihan Bersama Internasional di Dalam Negeri |
| | 841 | Peserta Latihan Kematraan Rayon 2 |
| | 842 | Peserta Latihan Kematraan Rayon 3 |
| | 843 | Peserta Latihan Kematraan Rayon 4 |
| | 844 | Peserta Latihan Kematraan Rayon 5 |
| 1537.DCG | | Pelatihan Bidang Pertahanan dan Keamanan |
| | 845 | Werving Bintara Matra Udara |
| | 846 | Werving Tamtama Matra Udara |

| Kode | No | Uraian |
|-----------------|-----------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 |
| | 847 | Peserta Seskoau dan Sessau Matra Udara |
| | 848 | Seleksi Sekkau dan Suspajemen Matra Udara |
| | 849 | Peserta Setukpa Matra Udara |
| | 850 | Peserta Setukba Matra Udara |
| | 851 | Sertar Pria |
| | 852 | Sertar Wanita |
| | 853 | Pendidikan Sermatar Pria |
| | 854 | Pendidikan Sermatar Wanita |
| | 855 | Lulusan Diksargolan Perwira Matra Udara |
| | 856 | Pendidikan Pertama Secaba Pria Matra Udara |
| | 857 | Pendidikan Pertama Secaba Wanita Matra Udara |
| | 858 | Lulusan Diksargolan Bintara Matra Udara Non ISD |
| | 859 | Lulusan Diksargolan Bintara Matra Udara ISD |
| | 860 | Pendidikan Pertama Secatam Pria Matra Udara |
| | 861 | Lulusan Diksargolan Tamtama Matra Udara |
| | 862 | Pendidikan Sekbang/Seknav Matra Udara |
| | 863 | Pendidikan Sekbang/Seknav Matra Udara Lanjutan |
| | 864 | Pendidikan SIP/SIN Matra Udara |
| | 865 | Pendidikan Seskoau |
| | 866 | Pendidikan Sessau |
| | 867 | Pendidikan Sekkau |
| | 868 | Pendidikan Suspajemen |
| | 869 | Pendidikan Setukpa |
| | 870 | Pendidikan Setukba |
| | 871 | Dikbangspes Perwira Matra Udara |
| | 872 | Dikbangspes Bintara Matra Udara |
| | 873 | Dikbangspes Tamtama Matra Udara |
| | 874 | Seleksi Dikbangspes Perwira Matra Udara |
| | 875 | Seleksi Dikbangspes Ba/Ta Matra Udara |
| | 876 | Koptar Pria |
| | 877 | Koptar Wanita |
| | 878 | Prajurit Taruna Pria |
| | 879 | Prajurit Taruna Wanita |
| 6544.BCA | Perkara Hukum Perseorangan | |
| | 880 | Penyidikan Perkara Pidana Prajurit Rayon 1 |
| | 881 | Penyidikan Perkara Pidana Prajurit Rayon 2 |
| | 882 | Penyidikan Perkara Pidana Prajurit Rayon 3 |
| | 883 | Penyidikan Perkara Pidana Prajurit Rayon 4 |
| | 884 | Penyidikan Perkara Pidana Prajurit Rayon 5 |
| | 885 | Penyelidikan Kriminal Perkara Pidana Rayon 1 |
| | 886 | Penyelidikan Kriminal Perkara Pidana Rayon 2 |
| | 887 | Penyelidikan Kriminal Perkara Pidana Rayon 3 |
| | 888 | Penyelidikan Kriminal Perkara Pidana Rayon 4 |
| | 889 | Penyelidikan Kriminal Perkara Pidana Rayon 5 |
| | 890 | Penyidikan Perkara Pelanggaran Prajurit Rayon 1 |
| | 891 | Penyidikan Perkara Pelanggaran Prajurit Rayon 2 |
| | 892 | Penyidikan Perkara Pelanggaran Prajurit Rayon 3 |
| | 893 | Penyidikan Perkara Pelanggaran Prajurit Rayon 4 |
| | 894 | Penyidikan Perkara Pelanggaran Prajurit Rayon 5 |
| | 895 | Pengurusan Tahanan Sementara Rayon 1 |
| | 896 | Pengurusan Tahanan Sementara Rayon 2 |
| | 897 | Pengurusan Tahanan Sementara Rayon 3 |
| | 898 | Pengurusan Tahanan Sementara Rayon 4 |

| Kode | No | Uraian |
|-------------|-----------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| | 899 | Pengurusan Tahanan Sementara Rayon 5 |
| | 900 | Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer TK. I Rayon 1 |
| | 901 | Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer TK. I Rayon 2 |
| | 902 | Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer TK. I Rayon 3 |
| | 903 | Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer TK. I Rayon 4 |
| | 904 | Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer TK. I Rayon 5 |
| | 905 | Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer TK. Banding |
| | 906 | Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer TK. Kasasi |
| | 907 | Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer TK. PK |
| | 908 | Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum Tk. I Rayon 1 |
| | 909 | Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum Tk. I Rayon 2 |
| | 910 | Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum Tk. I Rayon 3 |
| | 911 | Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum Tk. I Rayon 4 |
| | 912 | Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum Tk. I Rayon 5 |
| | 913 | Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum Tk. Banding |
| | 914 | Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum Tk. Kasasi |
| | 915 | Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum Tk. PK |
| | 916 | Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Penggugat TK. I Rayon 1 |
| | 917 | Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Penggugat TK. I Rayon 2 |
| | 918 | Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Penggugat TK. I Rayon 3 |
| | 919 | Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Penggugat TK. I Rayon 4 |
| | 920 | Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Penggugat TK. I Rayon 5 |
| | 921 | Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pembanding TK. Banding Rayon 1 |
| | 922 | Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pembanding TK. Banding Rayon 2 |
| | 923 | Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pembanding TK. Banding Rayon 3 |
| | 924 | Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pembanding TK. Banding Rayon 4 |
| | 925 | Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pembanding TK. Banding Rayon 5 |
| | 926 | Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. Kasasi Rayon 1 |
| | 927 | Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. Kasasi Rayon 2 |
| | 928 | Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. Kasasi Rayon 3 |
| | 929 | Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. Kasasi Rayon 4 |
| | 930 | Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. Kasasi Rayon 5 |
| | 931 | Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. PK Rayon 1 |
| | 932 | Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. PK Rayon 2 |
| | 933 | Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. PK Rayon 3 |
| | 934 | Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. PK Rayon 4 |
| | 935 | Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. PK Rayon 5 |
| | 936 | Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Tergugat Tk. I Rayon 1 |
| | 937 | Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Tergugat Tk. I Rayon 2 |
| | 938 | Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Tergugat Tk. I Rayon 3 |
| | 939 | Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Tergugat Tk. I Rayon 4 |
| | 940 | Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Tergugat Tk. I Rayon 5 |
| | 941 | Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Terbanding Tk. Banding Rayon 1 |
| | 942 | Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Terbanding Tk. Banding Rayon 2 |
| | 943 | Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Terbanding Tk. Banding Rayon 3 |
| | 944 | Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Terbanding Tk. Banding Rayon 4 |

| Kode | No | Uraian |
|-----------------|-----------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| | 945 | Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Terbanding Tk. Banding Rayon 5 |
| | 946 | Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. Kasasi Rayon 1 |
| | 947 | Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. Kasasi Rayon 2 |
| | 948 | Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. Kasasi Rayon 3 |
| | 949 | Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. Kasasi Rayon 4 |
| | 950 | Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. Kasasi Rayon 5 |
| | 951 | Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. PK Rayon 1 |
| | 952 | Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. PK Rayon 2 |
| | 953 | Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. PK Rayon 3 |
| | 954 | Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. PK Rayon 4 |
| | 955 | Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. PK Rayon 5 |
| | 956 | Pendapat dan Saran Hukum (PSH) |
| | 957 | Bantuan Hukum (Non Litigasi) Rayon 1 |
| | 958 | Bantuan Hukum (Non Litigasi) Rayon 2 |
| | 959 | Bantuan Hukum (Non Litigasi) Rayon 3 |
| | 960 | Bantuan Hukum (Non Litigasi) Rayon 4 |
| | 961 | Bantuan Hukum (Non Litigasi) Rayon 5 |
| | 962 | Penyidikan Perkara Pidana Berat Prajurit Rayon 1 |
| | 963 | Penyidikan Perkara Pidana Berat Prajurit Rayon 2 |
| | 964 | Penyidikan Perkara Pidana Berat Prajurit Rayon 3 |
| | 965 | Penyidikan Perkara Pidana Berat Prajurit Rayon 4 |
| | 966 | Penyidikan Perkara Pidana Berat Prajurit Rayon 5 |
| | 967 | Pengurusan Tahanan Hukuman Disiplin Rayon 1 |
| | 968 | Pengurusan Tahanan Hukuman Disiplin Rayon 2 |
| | 969 | Pengurusan Tahanan Hukuman Disiplin Rayon 3 |
| | 970 | Pengurusan Tahanan Hukuman Disiplin Rayon 4 |
| | 971 | Pengurusan Tahanan Hukuman Disiplin Rayon 5 |
| | 972 | Pengurusan Tahanan Dalam Proses Penuntutan Rayon 1 |
| | 973 | Pengurusan Tahanan Dalam Proses Penuntutan Rayon 2 |
| | 974 | Pengurusan Tahanan Dalam Proses Penuntutan Rayon 3 |
| | 975 | Pengurusan Tahanan Dalam Proses Penuntutan Rayon 4 |
| | 976 | Pengurusan Tahanan Dalam Proses Penuntutan Rayon 5 |
| 6547.BHA | | Operasi Bidang Pertahanan |
| | 977 | Pembinaan Fungsi Intelijen TNI AU |
| | 978 | Operasi Militer Selain Perang |

10. Kementerian Negara/Lembaga: Kementerian Keuangan (015)

| Kode | No | Uraian |
|-----------------|-----------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| 015.01 | | Sekretariat Jenderal |
| 4751.ABA | | Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan |
| | 1 | Kajian/Saran/Usul Rekomendasi Kebijakan Sektor Keuangan |
| | 2 | Rekomendasi/Kajian Perpajakan |
| | 3 | Rekomendasi Arah Kebijakan dan Program Strategis Sektor Ekonomi dan Keuangan Syariah |
| 4751.BCE | | Penanganan Perkara |
| | 4 | Administrasi Persidangan |
| 4751.EBA | | Layanan Dukungan Manajemen Internal |
| | 5 | Layanan Analisis dan Manajerial Menteri dan Wakil Menteri |
| 4752.FAM | | Hasil Kelolaan Dana |
| | 6 | Seleksi Beasiswa |
| | 7 | Penilaian Program dan Penerima Beasiswa |
| | 8 | Persiapan Keberangkatan (PK) Penerima Beasiswa |
| | 9 | Seleksi Riset |
| | 10 | Penilaian Program dan Penerima Riset |
| 4755.BMB | | Komunikasi Publik |
| | 11 | Layanan Kepustakaan |
| | 12 | Pengembangan Contact Center Kemenkeu 134 |
| | 13 | Publikasi Media Cetak |
| | 14 | Publikasi Media Elektronik |
| | 15 | Publikasi Media Website |
| 4757.ABA | | Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan |
| | 16 | Rekomendasi Pengelolaan Manajemen Eksekutif KNEKS |
| 4757.ABL | | Kebijakan Bidang Tata Kelola Pemerintahan |
| | 17 | Rekomendasi Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan UE I |
| 4757.EBA | | Layanan Dukungan Manajemen Internal |
| | 18 | Laporan Pelaksanaan Penguatan Budaya Organisasi |
| | 19 | Asistensi Pembangunan, Penilaian, dan Monev Keberlanjutan ZI/WBK/WBBM kepada Satker Lingkup Kemenkeu |
| 4757.EBC | | Layanan Manajemen SDM Internal |
| | 20 | Pengelolaan Jafung |
| 015.02 | | Inspektorat Jenderal |
| 4738.EBA | | Layanan Manajemen SDM Internal |
| | 21 | Laporan Monitoring dan Analisis Data Temuan dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan |
| 4740.ABL | | Kebijakan Bidang Tata Kelola Pemerintahan |
| | 22 | Rekomendasi Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Unit Eselon I |
| 4741.EBD | | Layanan Manajemen Kinerja Internal |
| | 23 | Rekomendasi Hasil Pengawasan Kebijakan Fiskal |
| | 24 | Rekomendasi Hasil Pengawasan Pengelolaan Penerimaan Negara |
| | 25 | Rekomendasi Hasil Pengawasan Pengelolaan Belanja Negara |
| | 26 | Rekomendasi Hasil Pengawasan Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko |
| | 27 | Rekomendasi Hasil Pengawasan Dukungan Manajemen K/L |
| | 28 | Rekomendasi Hasil Penindakan |
| | 29 | Rekomendasi Hasil Pencegahan KKN |
| | 30 | Rekomendasi Kepatuhan Internal |
| 6885.AAH | | Peraturan lainnya |
| | 31 | Harmonisasi Peraturan/Kebijakan |
| 015.03 | | Ditjen Anggaran |
| 4690.BMB | | Komunikasi Publik |

| Kode | No | Uraian |
|-----------------|-----------|---|
| 1 | 2 | 3 |
| | 32 | Publikasi Media Elektronik |
| 4766.FAD | | Perencanaan dan Penganggaran |
| | 33 | Nota Keuangan APBN/P |
| 4776.FAE | | Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan |
| | 34 | Rekomendasi Hasil Monev Penganggaran Pusat |
| | 35 | Laporan Semester I dan Prognosis Semester II |
| 4777.FAH | | Pengelolaan Keuangan Negara |
| | 36 | Laporan Keuangan BA BUN Pengelolaan Belanja Subsidi (BA 999.07) dan Laporan Keuangan BA BUN Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08) |
| 4778.FAD | | Perencanaan dan Penganggaran |
| | 37 | Pagu Indikatif |
| | 38 | Pagu Anggaran |
| | 39 | Pagu Alokasi |
| | 40 | DIPA |
| 4785.ABA | | Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan |
| | 41 | Joint Program Penerimaan (PU) |
| 4785.FAE | | Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan |
| | 42 | Rekomendasi Pengawasan PNBP (PU) |
| 4786.ABA | | Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan |
| | 43 | Kajian PNBP |
| 4786.FAE | | Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan |
| | 44 | Rekomendasi Monitoring Pengelolaan PNBP |
| 015.04 | | Ditjen Pajak |
| 4708.EBA | | Data dan Informasi Publik |
| | 45 | Rekomendasi Pengelolaan Organisasi |
| 4709.EBD | | Layanan Manajemen Kinerja Internal |
| | 46 | Rekomendasi Kepatuhan Internal |
| 4710.CCL | | OM Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi |
| | 47 | Pemeliharaan Sistem dan Teknologi Informasi Perpajakan |
| 4791.BMA | | Data dan Informasi Publik |
| | 48 | Data dan Informasi Perpajakan |
| | 49 | Laporan Hasil Analisa Data Perpajakan |
| 4792.AEA | | Koordinasi |
| | 50 | Perundingan Pencegahan dan Penanganan Sengketa Perpajakan Internasional |
| | 51 | Pelaksanaan Pertukaran Informasi Perpajakan Internasional |
| | 52 | Inklusi Kesadaran Perpajakan dalam Kurikulum Pendidikan Nasional |
| 4792.AEC | | Kerja sama |
| | 53 | Kerja Sama antara DJP dengan Instansi, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lainnya |
| 4792.AEG | | Konferensi dan Event |
| | 54 | Kemitraan Perpajakan Internasional |
| 4792.BMA | | Data dan Informasi Publik |
| | 55 | Survei Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan dan Kehumasan DJP |
| 4792.BMB | | Komunikasi Publik |
| | 56 | Manajemen Perubahan Reformasi Perpajakan |
| | 57 | Layanan dan Konsultasi Perpajakan |
| | 58 | Layanan Informasi dan Pengaduan Perpajakan |
| | 59 | Layanan Kepustakaan |
| | 60 | Pembinaan/Edukasi Publik |
| 4794.BIG | | Pemeriksaan dan Audit Penerimaan |
| | 61 | Laporan Analisis Risiko Manual Wajib Pajak |
| | 62 | Laporan Hasil Intelijen Perpajakan |
| | 63 | Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan (LPBP) |
| 4794.FAJ | | Benda Meterai dan Cukai |

| Kode | No | Uraian |
|-----------------|-----------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| | 64 | Benda Meterai |
| 4795.ABA | | Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan |
| | 65 | Kajian Dampak Kebijakan makroekonomi, Kebijakan perpajakan, dan Kebijakan umum |
| | 66 | Kebijakan terkait Bidang Kerjasama dan Dukungan Pemeriksaan |
| | 67 | Kebijakan di Bidang Penagihan Pajak |
| | 68 | Kebijakan terkait perencanaan pemeriksaan Wajib Pajak secara nasional |
| | 69 | Kebijakan teknik dan evaluasi kinerja pemeriksaan |
| | 70 | Kebijakan terkait rencana dan strategi pemeriksaan pajak secara nasional |
| | 71 | Kebijakan di Bidang Pemeriksaan Transaksi Khusus |
| | 72 | Kajian di Bidang Intelijen Perpajakan |
| | 73 | Kajian di Bidang Keberatan dan Banding |
| | 74 | Kajian Di Bidang Penegakan Hukum Perpajakan |
| 6209.BCE | | Penanganan Perkara |
| | 75 | Dokumen Penyelesaian Banding DJP |
| | 76 | SK Keberatan/Non Keberatan |
| | 77 | Dokumen Peninjauan Kembali DJP |
| 015.05 | | Ditjen Bea Dan Cukai |
| 4696.BMB | | Komunikasi Publik |
| | 78 | Layanan Kepustakaan |
| | 79 | Contact Center |
| | 80 | Pameran/Eksibisi |
| | 81 | Publikasi Media Cetak |
| | 82 | Publikasi Media Elektronik |
| | 83 | Implementasi PUG |
| 4697.ABL | | Kebijakan Bidang Tata Kelola Pemerintahan |
| | 84 | Rekomendasi Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan |
| 4697.EBA | | Layanan Dukungan Manajemen Internal |
| | 85 | Hasil Survei/Rekomendasi Kepuasan Pengguna Layanan |
| | 86 | Penilaian Unit ZI WBBM |
| | 87 | Standar Mutu Layanan - ISO Mutu Layanan |
| | 88 | Rekomendasi Pengelolaan Organisasi |
| 4699.CCL | | OM Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi |
| | 89 | Pemeliharaan Sistem dan Teknologi Informasi Kepabeanan dan Cukai |
| 4768.ABA | | Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan |
| | 90 | Perumusan ASEAN Harmonized Tariff Nomenclatures (PU) |
| 4768.AEB | | Forum |
| | 91 | Keketuaan Dalam Perundingan/Forum Kerja Sama Internasional (PU) |
| 4768.AEC | | Kerja sama |
| | 92 | Rekomendasi Kerja Sama Internasional Di Bidang Kepabeanan dan Cukai |
| | 93 | Rekomendasi Kerja Sama Perdagangan Bebas |
| 4769.EBC | | Layanan Manajemen SDM Internal |
| | 94 | Asistensi Kerja Sama Internasional Kepabeanan dan Cukai |
| 4770.ABA | | Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan |
| | 95 | Rekomendasi Dampak Ekonomi Pemberian Fasilitas Kepabeanan |
| 4787.BIG | | Pemeriksaan dan Audit Penerimaan |
| | 96 | Pemeriksaan Kepabeanan dan Cukai |
| | 97 | Hasil Pengujian Laboratorium dan Identifikasi Barang |
| 4787.EBC | | Layanan Manajemen SDM Internal |
| | 98 | Asistensi Di Bidang Cukai |
| | 99 | Asistensi Di Bidang Fasilitas Kepabeanan |
| | 100 | Asistensi Di Bidang Teknis Kepabeanan |
| | 101 | Asistensi Di Bidang Pengelolaan Penerimaan |

| Kode | No | Uraian |
|-----------------|-----------|---|
| 1 | 2 | 3 |
| | 102 | Asistensi Di Bidang Keberatan, Banding dan Upaya Hukum |
| | 103 | Asistensi di bidang pengawasan kepabeanan dan cukai |
| | 104 | Asistensi di bidang audit kepabeanan dan cukai |
| 4787.FAE | | Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan |
| | 105 | Sertifikasi AEO/MITA |
| | 106 | Pengembangan Transformasi TPB Berkelanjutan (PU) |
| 4787.QAE | | Pelayanan Publik kepada UMKM |
| | 107 | Promosi Ekspor UMKM (PN) |
| 4788.BCE | | Penanganan Perkara |
| | 108 | Putusan Penanganan Perkara |
| | 109 | Pendampingan Penanganan Perkara Kepabeanan dan Cukai |
| 4789.BHB | | Operasi Bidang Keamanan |
| | 110 | Pemberantasan Narkotika |
| | 111 | Penyiapan Unit Anjing Pelacak (K-9) |
| | 112 | Patroli Laut |
| | 113 | Pengoperasian Kapal Patroli |
| 4789.BIG | | Pemeriksaan dan Audit Penerimaan |
| | 114 | Laporan Hasil Audit (LHA) |
| | 115 | Analysis Targetting |
| | 116 | Laporan Hasil Intelijen, Penindakan, dan Penyidikan |
| 4789.QHB | | Operasi Bidang Keamanan |
| | 117 | Joint Task Force On Illegal Goods (PN) |
| 015.06 | | Ditjen Perimbangan Keuangan |
| 4729.BMB | | Komunikasi Publik |
| | 118 | Layanan Kepustakaan |
| | 119 | Publikasi Media Cetak |
| | 120 | Publikasi Media Elektronik |
| 4730.ABL | | Kebijakan Bidang Tata Kelola Pemerintahan |
| | 121 | Rekomendasi Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Unit Eselon I |
| 4772.ABA | | Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan |
| | 122 | Rekomendasi terkait Pembayaran Subsidi Bunga Pinjaman Daerah Dalam Rangka Mendukung Program PEN |
| | 123 | Rekomendasi Pelaksanaan Perjanjian kerja sama Pajak Pusat dan Daerah |
| | 124 | Rekomendasi Penyusunan Risiko Fiskal Daerah (PU) |
| | 125 | ALCO Regional (PU) |
| | 126 | Rekomendasi Pembiayaan dan Pendanaan Daerah (PU) |
| 4779.FAC | | Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara |
| | 127 | Pelatihan pengelolaan dan pemanfaatan potensi Dana Desa |
| 4779.UBB | | Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Desa |
| | 128 | Bimtek BUMDes (PN) |
| 4780.FAE | | Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan |
| | 129 | Kajian Perkembangan Ekonomi dan Fiskal Daerah |
| | 130 | Rekomendasi Kebijakan TKD yang Responsif Gender (PU) |
| | 131 | Rekomendasi Tingkat Kematangan Pengelolaan Keuangan Daerah (PU) |
| 4781.FAH | | Pengelolaan Keuangan Negara |
| | 132 | Laporan Keuangan TKD dan Hibah |
| 6609-AAH | | Peraturan lainnya |
| | 133 | Harmonisasi Peraturan/Kebijakan |
| 7789.BMA | | Data dan Informasi Publik |
| | 134 | Data Non Keuangan Daerah |
| 015.07 | | Ditjen Pengelolaan Pembiayaan Dan Risiko |
| 4807.BMA | | Data dan Informasi Publik |
| | 135 | Laporan Pengelolaan Pinjaman dan Hibah kepada masyarakat |

| Kode | No | Uraian |
|-----------------|-----------|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 4807.FAE | | Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan |
| | 136 | Rekomendasi Strategi Pelaksanaan Hubungan Stakeholder dan Investor |
| 4808.FAE | | Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan |
| | 137 | Rekomendasi Rencana dan Strategi Pembiayaan Utang |
| | 138 | Rekomendasi Pengembangan Pembiayaan dan Risiko |
| 4808.FAL | | Pengelolaan Pelaksanaan Anggaran dan Pembiayaan |
| | 139 | Penyediaan Dukungan Pemerintah untuk Proyek Infrastruktur |
| | 140 | Register Pinjaman dan Hibah |
| | 141 | Setelmen Transaksi Kewajiban pembiayaan |
| | 142 | Rencana Kerja dan Anggaran BA 999.01, dan BA 999.02 |
| | 143 | Penerbitan SBSN |
| | 144 | Pembiayaan proyek yang dibiayai oleh SBSN |
| | 145 | Pendalaman pasar SBSN dan Peningkatan Basis Investor |
| | 146 | Pemasaran kepada Publik dan Pelaku Pasar SBSN |
| | 147 | Perjanjian Pinjaman dan Hibah |
| | 148 | Rencana Penarikan Pinjaman dan Hibah |
| | 149 | Penguatan Hubungan Kelembagaan |
| | 150 | Penerbitan Instrumen Pembiayaan Surat Utang Negara |
| | 151 | Edukasi Investasi Keuangan dan Perluasan Basis Investor |
| | 152 | Rekomendasi Keuangan dan Pasar SUN |
| | 153 | Perjanjian dan Dokumen Hukum Transaksi SUN |
| 4808.PBA | | Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan |
| | 154 | Implementasi Pemberian Dukungan Pemerintah dalam rangka Pendanaan/Pembiayaan Ibu Kota Nusantara (PN) |
| 4809.FAE | | Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan |
| | 155 | Rekomendasi mitigasi risiko Keuangan Negara yang bersumber dari Penjaminan Infrastruktur, Program SJSN, Tuntutan Hukum, dan Penerimaan Negara |
| | 156 | Rekomendasi Mitigasi Risiko Keuangan Negara yang Bersumber dari Badan Usaha Milik Negara |
| | 157 | Rekomendasi Instrumen Mitigasi Risiko dan Rekomendasi Mitigasi Risiko Keuangan Negara yang Bersumber dari Lembaga Keuangan |
| | 158 | Rekomendasi Pengelolaan Risiko Aset dan Kewajiban Negara melalui Penyusunan Neraca Negara |
| | 159 | Rekomendasi Kebijakan, Perencanaan, dan Mitigasi Kewajiban Kontinjenji |
| 4810.FAH | | Pengelolaan Keuangan Negara |
| | 160 | Laporan Statistik Utang, Hibah, dan Pembiayaan Lainnya |
| 6217.FAE | | Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan |
| | 161 | Laporan Pembiayaan Pinjaman, Hibah dan Project Based Sukuk (PBS) |
| 6389.FAM | | Hasil Kelolaan Dana |
| | 162 | Hasil Kelolaan Dana Investasi |
| | 163 | Pelaksanaan Kebijakan Pemberian Hibah/Pinjaman |
| 015.08 | | Ditjen Perbendaharaan |
| 4718.BMB | | Sistem Informasi Pemerintahan |
| | 164 | Implementasi PUG |
| 4725.FAB | | Sistem Informasi Pemerintahan |
| | 165 | Sistem Layanan Platform Pembayaran Pemerintah (PPP) (PU) |
| 6212.FAC | | Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara |
| | 166 | Peningkatan dan Pengembangan Kapasitas Pembina dan Pengelola Keuangan BLU |
| | 167 | Penajaman Metode Analytical BLU |
| 6212.FAH | | Pengelolaan Keuangan Negara |
| | 168 | Komunikasi dan Edukasi Dalam Rangka Penyusunan Government Financial Statistic (GFS) |
| | 169 | Komunikasi dan Edukasi Penyusunan LKKL dan LKBUN |
| 6212.FAL | | Pengelolaan Pelaksanaan Anggaran dan Pembiayaan |

| Kode | No | Uraian |
|-----------------|-----------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| | 170 | Komunikasi dan Edukasi Dalam Rangka Penerimaan dan Pengeluaran Kas |
| | 171 | Konsultasi Pencairan Dana |
| 6213.ABA | | Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan |
| | 172 | Kajian atas Peluang Investasi dan Pinjaman Daerah |
| 6213.FAC | | Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara |
| | 173 | Monev Pengembangan Kompetensi KPA, PPK, PPSPM, Bendahara dan Pengelola Perbendaharaan |
| 6213.FAE | | Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan |
| | 174 | Rekomendasi Peningkatan Efektivitas dan Akuntabilitas Pelaksanaan APBN |
| | 175 | Rekomendasi atas Peningatan Kinerja Keuangan BLU dan Investasi Pemerintah di Daerah |
| | 176 | Rekomendasi Terkait Kemitraan dengan Perbankan |
| | 177 | ALCo Regional |
| 6213.FAH | | Pengelolaan Keuangan Negara |
| | 178 | Rekomendasi atas Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah |
| 6214.FAL | | Pengelolaan Pelaksanaan Anggaran dan Pembiayaan |
| | 179 | Koordinasi dan Rekonsiliasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas |
| 6215.FAH | | Pengelolaan Keuangan Negara |
| | 180 | Laporan Keuangan Pemerintah Pusat |
| 6216.FAE | | Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan |
| | 181 | Masukan Pemerintah terkait Pencetakan Uang oleh Bank Indonesia |
| | 182 | Rekomendasi Tarif Standar Biaya Masukan |
| | 183 | Kajian Peningkatan Efektifitas dan Akuntabilitas Pelaksanaan APBN |
| | 184 | Implementasi Virtual Account Rekening Penerimaan |
| 015.09 | | Ditjen Kekayaan Negara |
| 4702.BMB | | Komunikasi Publik |
| | 185 | Contact Center |
| 4798.ABA | | Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan |
| | 186 | Rekomendasi Nilai BMN yang Diasuransikan |
| 4798.FAC | | Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara |
| | 187 | Pengelolaan Jafung |
| 4798.FAD | | Perencanaan dan Penganggaran |
| | 188 | Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara Kementerian/Lembaga |
| 4798.FAE | | Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan |
| | 189 | Rekomendasi Peningkatan Tata Kelola Perusahaan Balai Lelang |
| | 190 | Peta Tematik BMN (PU) |
| 4799.ABA | | Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan |
| | 191 | Rekomendasi Evaluasi Pelaksanaan Penggantian Biaya dan Margin Investasi Pemerintah PEN |
| 4800.FAH | | Pengelolaan Keuangan Negara |
| | 192 | Laporan Barang Milik Negara |
| 4801.ACD | | Perizinan Lembaga |
| | 193 | Perizinan Balai Lelang |
| 015.11 | | Badan Pendidikan Dan Pelatihan Keuangan |
| 4681.BMB | | Komunikasi Publik |
| | 194 | Jurnal BPPK |
| | 195 | Pameran/Eksibisi |
| 4682.BMB | | Komunikasi Publik |
| | 196 | Jurnal Keuangan Negara |
| 4683.ABA | | Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan |
| | 197 | Kajian Akademis BPPK |
| 4683.CAA | | Sarana Bidang Pendidikan |
| | 198 | Program dan Materi Pembelajaran |
| 4683.DCF | | Pelatihan Bidang Ekonomi dan Keuangan |

| Kode | No | Uraian |
|-----------------|-----------|---|
| 1 | 2 | 3 |
| | 199 | Sertifikasi Kompetensi |
| | 200 | Alat Uji |
| | 201 | Manajemen Pengetahuan |
| | 202 | Regional Training Center |
| 4683.EBA | | Layanan Dukungan Manajemen Internal |
| | 203 | Learning Organization |
| | 204 | Rekomendasi Perencanaan Pelatihan |
| | 205 | AKP Kewilayahhan |
| 4684.DBA | | Pendidikan Tinggi |
| | 206 | Mahasiswa Pendidikan Program Diploma Keuangan |
| | 207 | Program Pengabdian Masyarakat |
| 7062.DBA | | Pendidikan Tinggi |
| | 208 | Pendidikan dan Pelatihan Kerja Sama |
| 015.12 | | Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi Dan Fiskal |
| 7792.AEG | | Konferensi dan Event |
| | 209 | International Tax Forum |
| 015.13 | | Lembaga National Single Window |
| 4746.BMB | | Komunikasi Publik |
| | 210 | Contact Center |
| 4747.EBA | | Layanan Dukungan Manajemen Internal |
| | 211 | Standar Mutu Layanan - ISO Mutu Layanan |
| 4749.CCL | | OM Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi |
| | 212 | Pemeliharaan Infrastruktur Sistem INSW |
| | 213 | Lisensi Sistem INSW |
| 6611.ABA | | Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan |
| | 214 | Harmonisasi dan Sinkronisasi Kebijakan dalam Rangka Implementasi INSW |
| 6611.AED | | Perjanjian |
| | 215 | Perjanjian kerjasama di bidang Single Window |
| 6611.PBA | | Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan |
| | 216 | Rekomendasi Proses Bisnis Ekspor Impor dan Logistik (PN) |
| 015.14 | | Direktorat Jenderal Stabilitas Dan Pengembangan Sektor Keuangan |
| 7794.ABA | | Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan |
| | 217 | Rekomendasi Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim, G20, OECD, dan Multilateral |
| 015.15 | | Badan Teknologi, Informasi, Dan Intelijen Keuangan |
| 7778.ABL | | Kebijakan Bidang Tata Kelola Pemerintahan |
| | 218 | Kebijakan Pengelolaan TIK Kemenkeu |

11. Kementerian Negara/Lembaga: Kementerian Pertanian (018)

| Kode | No | Uraian |
|-----------------|-----------|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 018.01 | | Sekretariat Jenderal |
| 1753.ADC | | Sertifikasi Produk |
| | 1 | Sertifikat Hak Perlindungan Varietas Tanaman Pertanian |
| | 2 | Sertifikat Pendaftaran Varietas Tanaman Pertanian |
| 018.02 | | Inspektorat Jenderal |
| 4578.EBD | | Layanan Manajemen Kinerja Internal |
| | 3 | Laporan Hasil Audit pada Satker Lingkup Mitra Inspektorat I |
| | 4 | Laporan Hasil Pemantauan/Pengawalan Lingkup Mitra Inspektorat I |
| | 5 | Laporan Hasil Evaluasi Lingkup Mitra Inspektorat I |
| | 6 | Laporan Hasil Reviu pada Satker Lingkup Mitra Inspektorat I |
| | 7 | Laporan Hasil Audit pada Satker Lingkup Mitra Inspektorat II |
| | 8 | Laporan Hasil Pemantauan/Pengawalan Lingkup Mitra Inspektorat II |
| | 9 | Laporan Hasil Evaluasi Lingkup Mitra Inspektorat II |
| | 10 | Laporan Hasil Reviu pada Satker Lingkup Mitra Inspektorat II |
| | 11 | Laporan Hasil Audit pada Satker Lingkup Mitra Inspektorat III |
| | 12 | Laporan Hasil Pemantauan/Pengawalan Lingkup Mitra Inspektorat III |
| | 13 | Laporan Hasil Evaluasi Lingkup Mitra Inspektorat III |
| | 14 | Laporan Hasil Reviu pada Satker Lingkup Mitra Inspektorat III |
| | 15 | Laporan Hasil Audit pada Satker Lingkup Mitra Inspektorat IV |
| | 16 | Laporan Hasil Pemantauan/Pengawalan Lingkup Mitra Inspektorat IV |
| | 17 | Laporan Hasil Evaluasi Lingkup Mitra Inspektorat IV |
| | 18 | Laporan Hasil Reviu pada Satker Lingkup Mitra Inspektorat IV |
| | 19 | Laporan Hasil Pengawasan untuk Tujuan Tertentu |
| 018.06 | | Ditjen Peternakan Dan Kesehatan Hewan |
| 1783.AFA | | Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria |
| | 20 | Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria Pakan |
| 1783.QJA | | Penyidikan dan Pengujian Produk |
| | 21 | Hasil Uji Mutu dan Keamanan Pakan |
| 1784.AFA | | Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria |
| | 22 | Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria Kesehatan Hewan |
| 1784.QJA | | Penyidikan dan Pengujian Produk |
| | 23 | Hasil Uji Mutu Obat Hewan |
| 1785.AFA | | Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria |
| | 24 | Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria Perbibitan dan Produksi Ternak |
| 1786.AFA | | Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria |
| | 25 | Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria Kesehatan Masyarakat Veteriner |
| 1786.QJA | | Penyidikan dan Pengujian Produk |
| | 26 | Hasil Uji Keamanan dan Mutu Produk Hewan |
| 5891.AFA | | Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria |
| | 27 | Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan |

12. Kementerian Negara/Lembaga: Kementerian Perindustrian (019)

| Kode | No | Uraian |
|-----------------|-----------|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 019.04 | | Ditjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, Dan Elektronika |
| 6062.PBK | | Kebijakan Bidang Tenaga Kerja, Industri dan UMKM |
| | 1 | Kebijakan Pengembangan Industri Perkapalan |
| | 2 | Rencana Aksi Pengembangan Industri Prioritas dan Strategis Sektor Industri Logam,Mesin,Alat Transportasi, dan Elektronika |
| | 3 | Neraca Penyediaan dan Permintaan Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya Nasional |
| 6062.QDI | | Fasilitasi dan Pembinaan Industri |
| | 4 | Industri Komponen yang terfasilitasi dalam rangka penguatan dan pendalaman struktur |
| | 5 | Industri logam yang terfasilitasi dalam rangka peningkatan daya saing dan produktivitas |
| | 6 | Industri Pemurnian dan Pengolahan Logam Dasar Beserta Turunannya yang Termonitor dan Terevaluasi Perkembangannya |
| | 7 | Industri yang terfasilitasi melalui Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Pendukung Program Nasional IMEI Control |
| | 8 | Industri kedirgantaraan yang terfasilitasi dalam rangka peningkatan daya saing |
| | 9 | Industri Komponen Kereta Api yang terfasilitasi dalam rangka peningkatan daya saing dan produktivitas |
| | 10 | Industri Kendaraan Bermotor yang terfasilitasi dalam rangka peningkatan daya saing |
| | 11 | Industri Logam Dalam Negeri yang terfasilitasi dalam pemenuhan kebutuhan logam infrastruktur untuk IKN |
| | 12 | Industri Semikonduktor Nasional yang terfasilitasi Dalam Rangka Pendalaman Struktur Industri Elektronika |
| | 13 | Industri Mold And Dies yang Terfasilitasi dalam mendukung Fokus Industri RPJMN 2025-2029 |
| | 14 | Industri Baterai Nasional yang Terfasilitasi Dalam Rangka Hilirisasi Sumber Daya Alam |
| | 15 | Industri Energi Baru Terbarukan yang terfasilitasi dalam mendukung Pengembangan Rantai Nilai Sektor Ketenagalistrikan |
| | 16 | Industri Remanufaktur yang Terfasilitasi dalam rangka Ekonomi Sirkular Industri |
| 6063.QDI | | Fasilitasi dan Pembinaan Industri |
| | 17 | Industri yang Terfasilitasi melalui Pembangunan Indonesia Manufacturing Center (One Stop Solution Manufacture) |
| | 18 | Industri Kreatif dan Digital yang Terfasilitasi melalui Pengembangan Pusat Industri Gim dan Animasi Nasional |
| | 19 | Fasilitasi Industri Pengolahan Sisa Hasil Produksi Industri Smelter Logam Bukan Besi dan Turunannya |
| 6068.QDI | | Fasilitasi dan Pembinaan Industri |
| | 20 | Industri yang terfasilitasi dalam rangka peningkatan investasi dan ekspor sektor Maritim, Alat Transportasi dan Alat Pertahanan |
| 6070.QDI | | Fasilitasi dan Pembinaan Industri |
| | 21 | Industri Sektor Elektronika yang terfasilitasi menuju Industri 4.0 melalui Pendampingan |
| | 22 | Industri Sektor Otomotif yang terfasilitasi menuju Industri 4.0 melalui Pendampingan |
| | 23 | Industri Sektor Permesinan dan Alat Mesin Pertanian yang terfasilitasi menuju Industri 4.0 melalui Pendampingan |
| 6966.QDI | | Fasilitasi dan Pembinaan Industri |
| | 24 | Industri KBLBB yang terfasilitasi melalui pengembangan ekosistem |
| 019.05 | | Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, Dan Aneka |
| 6071.QDI | | Fasilitasi dan Pembinaan Industri |
| | 25 | IKM Pangan, Furnitur dan Bahan Bangunan yang Mendapatkan Pendampingan/Fasilitasi Bantuan Mesin/Peralatan |
| | 26 | IKM PFBB yang Mendapatkan Fasilitasi Esmart IKM / Literasi Digital |

| Kode | No | Uraian |
|-----------------|-----------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| | 27 | IKM Pangan, Furnitur dan Bahan Bangunan yang Mendapatkan Fasilitasi Perluasan Akses Pasar |
| | 28 | IKM Pangan, Furnitur dan Bahan Bangunan yang Mengikuti Program Restrukturisasi Mesin/Peralatan |
| | 29 | Industri Kecil dan Menengah Kimia, Sandang, dan Kerajinan yang Mendapatkan Pendampingan/Fasilitasi Bantuan Mesin/Peralatan |
| | 30 | IKM KSK yang Mendapatkan Fasilitasi Esmart IKM / Literasi Digital |
| | 31 | IKM Kimia, Sandang, dan Kerajinan yang Mengikuti Program Restrukturisasi Mesin/Peralatan |
| | 32 | IKM Logam, Mesin, Elektronika dan Alat Angkut yang Mendapatkan Pendampingan/Fasilitasi Bantuan Mesin/Peralatan |
| | 33 | IKM Logam, Mesin, Elektronika dan Alat Angkut yang Mendapatkan Fasilitasi Esmart IKM / Literasi Digital |
| | 34 | IKM Logam, Mesin, Elektronika, dan Alat Angkut yang Mengikuti Program Restrukturisasi Mesin/Peralatan |
| | 35 | Layanan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) |
| 6071.QGA | | Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Ekonomi |
| | 36 | Pembiayaan Lembaga Pengelola Program |
| 019.07 | | Badan Standardisasi Dan Kebijakan Jasa Industri |
| 6077.AEC | | Kerja sama |
| | 37 | Kerja Sama Pemanfaatan Teknologi dan Layanan Teknis |
| 6077.BAD | | Pelayanan Publik kepada industri |
| | 38 | Jasa Pelayanan Teknis Pengujian |
| | 39 | Jasa Penyelenggara Uji Profisiensi |
| | 40 | Jasa Pelayanan Teknis Kalibrasi |
| | 41 | Jasa Pelayanan Teknis Sertifikasi |
| | 42 | Jasa Pelayanan Bimbingan dan Pendampingan Teknis Industri |
| | 43 | Jasa Pelayanan Konsultansi |
| | 44 | Jasa Pelayanan Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Industri |
| | 45 | Jasa Pelayanan Verifikasi |
| | 46 | Jasa Pelayanan Pemeriksa dan Pengujian Produk Halal |
| | 47 | Jasa Pelayanan Inspeksi Teknik |
| 6077.BDI | | Fasilitasi dan Pembinaan Industri |
| | 48 | Pemanfaatan Teknologi Industri |
| 6077.QDI | | Fasilitasi dan Pembinaan Industri |
| | 49 | Perusahaan Industri yang bertransformasi menuju Industri 4.0 |
| 6078.PFA | | Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria |
| | 50 | Perumusan Rancangan Standar Industri Hijau |
| 6078.QDI | | Fasilitasi dan Pembinaan Industri |
| | 51 | Lembaga jasa Industri dan IKM Hijau yang terfasilitasi |
| 6079.PFA | | Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria |
| | 52 | Rancangan SNI, ST dan/atau PTC |
| 6079.QIC | | Pengawasan dan Pengendalian Lembaga |
| | 53 | Hasil Pengawasan Lembaga Penilaian Kesesuaian |

13. Kementerian Negara/Lembaga: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (020)

| Kode | No | Uraian |
|-----------------|-----------|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 020.04 | | Ditjen Minyak Dan Gas Bumi |
| 6348.ABI | | Kebijakan Bidang Energi dan Sumber Daya Alam |
| | 1 | Penilaian dan Penandasahan Tingkat Komponen Dalam Negeri pada Kegiatan Usaha Hulu Migas |
| | 2 | Formulasi Harga Minyak Mentah |
| | 3 | Koordinasi dan Evaluasi usulan dan/atau reviu Harga Jual Gas Bumi Hilir untuk penyediaan tenaga listrik dan industri |
| | 4 | Penerimaan Negara dan PNBP Migas |
| | 5 | Penyiapan Program Minyak dan Gas Bumi |
| | 6 | Alokasi dan Harga Hulu Gas Bumi Indonesia |
| | 7 | Kebijakan terkait Harga Bahan Bakar Migas |
| | 8 | Rekomendasi Kebijakan terkait Subsidi Bahan Bakar Migas |
| | 9 | Perencanaan Kebijakan Kegiatan Hilir Minyak dan Gas Bumi |
| | 10 | Pengawasan Investasi Migas |
| 6348.PBI | | Kebijakan Bidang Energi dan Sumber Daya Alam |
| | 11 | Penyediaan Elpiji 3 kg yang tepat sasaran bagi Masyarakat, Usaha Mikro, Nelayan, dan Petani Sasaran |
| 6348.QIH | | Pengawasan dan Pengendalian Badan Usaha |
| | 12 | Fasilitasi Peningkatan Infrastruktur Kilang Minyak Bumi |
| 020.05 | | Ditjen Ketenagalistrikan |
| 6350.ABI | | Kebijakan Bidang Energi dan Sumber Daya Alam |
| | 13 | Harga Tenaga Listrik |
| 6350.ACD | | Perizinan Lembaga |
| | 14 | Perizinan di Bidang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik dan Pemanfaatan Jaringan Tenaga Listrik untuk Telematika |
| 6350.ADE | | Akkreditasi Lembaga |
| | 15 | Akkreditasi Lembaga Sertifikasi Ketenagalistrikan |
| 6350.BAH | | Pelayanan Publik Lainnya |
| | 16 | Layanan Pengaduan Subsidi Listrik Tepat Sasaran |
| 6350.PBI | | Kebijakan Bidang Energi dan Sumber Daya Alam |
| | 17 | Kebijakan Tarif dan Subsidi Listrik |
| | 18 | Pengendalian Pembangunan Pembangkit Listrik |
| | 19 | Pengendalian Pembangunan Jaringan Transmisi dan Gardu Induk |
| | 20 | Pengendalian Pembangunan Jaringan Distribusi dan Gardu Distribusi |
| | 21 | Penguatan Pemenuhan Akses Listrik pada Masyarakat |
| | 22 | Penerapan Keselamatan Ketenagalistrikan pada Infrastruktur Pengisian Listrik pada Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai/Get NZE |
| 6350.PEC | | Kerja sama |
| | 23 | Monitoring dan Pelaksanaan Kerjasama Sektor Ketenagalistrikan |
| 6350.QEG | | Bantuan Peralatan / Sarana |
| | 24 | Pemasangan Sambungan Baru Listrik bagi Rumah Tangga Belum Berlistrik yang Tidak Mampu atau Berada di Daerah 3T |
| 6350.QIH | | Pengawasan dan Pengendalian Badan Usaha |
| | 25 | Pengawasan dan Pengendalian Efisiensi Penyediaan Tenaga Listrik |
| | 26 | Peningkatan Pasokan Tenaga Listrik 24 jam/hari |
| 020.07 | | Dewan Energi Nasional |
| 6382.ABI | | Kebijakan Bidang Energi dan Sumber Daya Alam |
| | 27 | Rumusan rekomendasi penyiapan kebijakan di bidang energi yang bersifat lintas sektor |

| Kode | No | Uraian |
|-----------------|-----------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| | 28 | Rumusan Rekomendasi Peningkatan Ketahanan Energi Indonesia |
| 6382.BMA | | Data dan Informasi Publik |
| | 29 | Rumusan neraca energi nasional |
| | 30 | Layanan kerja sama luar negeri |
| 020.12 | | Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Esdm |
| 1915.CAN | | Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi |
| | 31 | Jaringan Teknologi Informasi dan Komunikasi PPSDM Geominerba |
| 6344.AEH | | Promosi |
| | 32 | Pengelolaan Pameran dan Promosi Pendidikan Sektor Geominerba |
| 6344.BAH | | Pelayanan Publik Lainnya |
| | 33 | Pelaksanaan IPTEK Bagi Masyarakat Dalam Rangka Pendidikan Tridharma Sektor Migas |
| | 34 | Akreditasi Lembaga PEM Akamigas |
| | 35 | Aktualisasi Dosen PEM Akamigas |
| | 36 | Pengabdian Masyarakat Dalam Rangka Tri Dharma Pendidikan Sektor Geominerba |
| | 37 | Aktualisasi Dosen PEP Bandung |
| | 38 | Penjaminan Mutu Internal PEP Bandung |
| 6344.BMA | | Data dan Informasi Publik |
| | 39 | Publikasi Jurnal dan Buletin Pendidikan Subsektor Migas |
| 6344.SAG | | Pendidikan Vokasi Bidang Industri |
| | 40 | Mahasiswa Pendidikan Vokasi PEM AKAMIGAS |
| | 41 | Mahasiswa Pendidikan Vokasi PEP Bandung |
| 6345.AEC | | Kerja sama |
| | 42 | Kerjasama Pengembangan SDM Subsektor MIGAS |
| | 43 | Kerjasama Pengembangan SDM Subsektor Geominerba |
| | 44 | Kerjasama PPSDM KEBTKE |
| | 45 | Kerja sama BDTBT |
| 6345.AEH | | Promosi |
| | 46 | Promosi, Layanan Diklat dan Sertifikasi Kompetensi Bidang KEBTKE |
| 6345.AFA | | Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria |
| | 47 | NSPK Pengembangan SDM Subsektor MIGAS |
| | 48 | NSPK Pengembangan SDM Subsektor Geominerba |
| | 49 | NSPK Pengembangan Subsektor KEBTKE |
| | 50 | NSPK Pengembangan Sumber Daya Manusia Subsektor Tambang Bawah Tanah |
| 6345.BAH | | Pelayanan Publik Lainnya |
| | 51 | Evaluasi Pelatihan Pengembangan SDM Subsektor MIGAS |
| | 52 | Pengelolaan Sertifikasi dan Akreditasi Sub Sektor Migas |
| 6345.SCB | | Pelatihan Bidang Infrastruktur |
| | 53 | Diklat Masyarakat Bidang KEBTKE |
| 6345.SCH | | Pelatihan Bidang Industri |
| | 54 | Diklat Masyarakat Bidang Minyak Dan Gas Bumi |
| | 55 | Diklat Masyarakat Bidang Geologi, Mineral dan Batubara |
| | 56 | Diklat Masyarakat Bidang Tambang Bawah Tanah |
| 6452.BMA | | Data dan Informasi Publik |
| | 57 | Pengelolaan Data dan Informasi Publik PEP Bandung |
| 6452.CAN | | Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi |
| | 58 | Pengelolaan Sistem Informasi PEM Akamigas |
| 020.13 | | Badan Geologi |
| 6346.ABS | | Kebijakan Bidang Ketahanan bencana dan perubahan iklim |

| Kode | No | Uraian |
|-----------------|-----------|---|
| 1 | 2 | 3 |
| | 59 | Rekomendasi Mitigasi Bencana Gunung Merapi dan Kebencanaan Geologi |
| | 60 | Rekomendasi Teknis Mitigasi Kebencanaan Geologi Kelautan |
| 6346.BMA | | Data dan Informasi Publik |
| | 61 | Data dan Informasi Hasil Penyelidikan Kebencanaan Geologi |
| 6346.BMB | | Komunikasi Publik |
| | 62 | Penyebaran Informasi Mitigasi Bencana Gunung Api |
| | 63 | Penyebaran Informasi Mitigasi Bencana Gempa Bumi dan Tsunami |
| | 64 | Penyebaran Informasi Mitigasi Bencana Gerakan Tanah |
| | 65 | Penyebaran Informasi Mitigasi Bencana Geologi Terpadu |
| 6346.PBS | | Kebijakan Bidang Ketahanan bencana dan perubahan iklim |
| | 66 | Rekomendasi Penyelidikan Geologi Tata Lingkungan untuk Pernataan Ruang dan Infrastruktur |
| | 67 | Rekomendasi Penyelidikan Geologi Lingkungan Untuk Pengembangan Wilayah Kawasan Rawan Bencana |
| 6346.QMA | | Data dan Informasi Publik |
| | 68 | Peta Zona Kerentanan Likuifaksi |
| | 69 | Peta Perubahan Muka Tanah di Kawasan Jabodetabek, Serang, dan Sekitarnya |
| 6346.RCM | | OP Sarana Bidang Pencarian dan Penanggulangan Bencana |
| | 70 | Optimalisasi Peralatan Sistem Mitigasi Bencana Geologi |
| 6347.ABI | | Kebijakan Bidang Energi dan Sumber Daya Alam |
| | 71 | Usulan Wilayah Kerja Panas Bumi |
| | 72 | Usulan Wilayah Pertambangan Batubara |
| | 73 | Usulan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral |
| 6347.BAH | | Pelayanan Publik Lainnya |
| | 74 | Layanan BLU Geologi Kelautan |
| 6347.BMA | | Data dan Informasi Publik |
| | 75 | Layanan Data Konservasi Koleksi Geologi |
| | 76 | Pengelolaan Pelayanan Publik Museum Geologi |
| 6347.PBI | | Kebijakan Bidang Energi dan Sumber Daya Alam |
| | 77 | Rekomendasi Penyelidikan Kawasan Bentang Alam Karst dan Kawasan Cagar Alam Geologi |
| | 78 | Rekomendasi Konservasi dan Pendayagunaan Air Tanah |
| | 79 | Rekomendasi Konservasi Air Tanah di Kawasan Jabodetabek, Serang, dan Sekitarnya |
| | 80 | Rekomendasi Keprospekan Migas |
| | 81 | Rekomendasi Warisan Geologi yang Ditetapkan |
| 6347.QMA | | Data dan Informasi Publik |
| | 82 | Pusat Informasi Geologi |
| | 83 | Pemetaan Sistematik Geologi Skala 1:50.000 |
| | 84 | Pemetaan Tematik Patahan Aktif |
| 020.14 | | Bph Migas |
| 6351-AAH | | Peraturan lainnya |
| | 85 | SK Pemanfaatan Bersama Fasilitas Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa |
| | 86 | Penetapan Tarif Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa |
| 6351.ABI | | Kebijakan Bidang Energi dan Sumber Daya Alam |
| | 87 | Rekomendasi Hasil Pengawasan Pengusahaan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Melalui Pipa |
| 6351.BAC | | Pelayanan Publik kepada badan usaha |
| | 88 | Pelayanan Kepada Badan Usaha Melalui Diklat Operasi SPBU |
| | 89 | Layanan Umum Masyarakat Melalui Pengembangan SDM Badan Usaha Pengangkut dan Badan Usaha Niaga |

| Kode | No | Uraian |
|-----------------|-----------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| 6351.BMA | | Data dan Informasi Publik |
| | 90 | Data Informasi dan Sistem Pengawasan Penyediaan dan Pendistribusian BBM |
| | 91 | Layanan Data dan Informasi Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa |
| 6351.QAC | | Pelayanan Publik kepada badan usaha |
| | 92 | Supervisi Progres Pembangunan Penyalur BBM 1 Harga |
| 6351.QIC | | Pengawasan dan Pengendalian Lembaga |
| | 93 | Pengawasan Pelaksanaan BBM 1 Harga |
| 020.15 | | Ditjen Energi Baru Terbarukan Dan Konservasi Energi |
| 6352.ABI | | Kebijakan Bidang Energi dan Sumber Daya Alam |
| | 94 | Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Biomassa dan Biogas |
| | 95 | Rekomendasi Penambahan Kapasitas Terpasang Pembangkit Listrik Berbasis Bioenergi |
| 6352.AEC | | Kerja sama |
| | 96 | Kerja Sama Bidang Bioenergi |
| 6352.AFA | | Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria |
| | 97 | Rancangan Standar dan Panduan Bidang Bioenergi |
| | 98 | Rancangan Standar dan Panduan Bidang Konservasi Energi |
| 6352.BDH | | Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha |
| | 99 | Investasi Bidang Bioenergi |
| | 100 | Investasi Bidang Panas Bumi |
| 6352.BDI | | Fasilitasi dan Pembinaan Industri |
| | 101 | Pembinaan Pengusahaan Bioenergi, Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati dan Rekomendasi Ekspor Impor Bahan Bakar Nabati |
| | 102 | Investasi di Bidang Konservasi Energi |
| 6352.BIC | | Pengawasan dan Pengendalian Lembaga |
| | 103 | Manajemen Energi Lembaga |
| 6352.BIH | | Pengawasan dan Pengendalian Badan Usaha |
| | 104 | Monitoring dan Evaluasi K3 dan Lingkungan Bioenergi |
| 6352.PBI | | Kebijakan Bidang Energi dan Sumber Daya Alam |
| | 105 | Volume Biofuel untuk Domestik |
| | 106 | Penurunan Intensitas Energi Final |
| | 107 | Penawaran Wilayah Panas Bumi |
| | 108 | Penetapan Wilayah Panas Bumi |
| 6352.PDA | | Standarisasi Produk |
| | 109 | Standar Kinerja Energi Minimum (SKEM) dan Label Hemat Energi pada Peralatan Pemanfaat Energi |
| 6353.FAD | | Perencanaan dan Penganggaran |
| | 110 | Koordinasi dan Sinkronisasi Program Pembangunan Infrastruktur EBTKE |
| 6353.FAE | | Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan |
| | 111 | Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Pembangunan Infrastruktur EBTKE |
| 6353.FAG | | Pengawasan Pembangunan |
| | 112 | Monitoring dan Evaluasi atas Pencapaian pembangunan Infrastruktur Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi |

14. Kementerian Negara/Lembaga: Kementerian Perhubungan (022)

| Kode | No | Uraian |
|-----------------|-----------|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 022.01 | | Sekretariat Jenderal |
| 1940.ABM | | Kebijakan Bidang Pelayanan Publik |
| | 1 | Kebijakan Peningkatan Kualitas Pelayanan Prima Sektor Transportasi |
| 1941.AEB | | Forum |
| | 2 | Forum Komunikasi Sektor Transportasi |
| 5877.AEE | | Kemitraan |
| | 3 | Fasilitasi Kemitraan dan Investasi Sektor Transportasi |
| 022.02 | | Inspektorat Jenderal |
| 4669.AEC | | Kerja sama |
| | 4 | Kerjasama Bidang Pengawasan |
| 022.03 | | Ditjen Perhubungan Darat |
| 4637.BAH | | Pelayanan Publik Lainnya |
| | 5 | Layanan Angkutan Umum Massal Perkotaan Berbasis Jalan di Kota Banyumas |
| 4637.QAH | | Pelayanan Publik Lainnya |
| | 6 | Layanan Angkutan Kawasan Strategis Nasional (KSN) (Prioritas Nasional) |
| | 7 | Layanan Angkutan Barang (Prioritas Nasional) |
| | 8 | Layanan Angkutan Umum Massal Perkotaan (Prioritas Nasional) |
| | 9 | Layanan Angkutan Umum Massal Perkotaan Berbasis Jalan di Kota Balikpapan (Prioritas Nasional) |
| | 10 | Layanan Angkutan Umum Massal Perkotaan Berbasis Jalan di Kota Manado (Prioritas Nasional) |
| 4638.CDP | | OM Prasarana Bidang Konektivitas Darat |
| | 11 | Terminal Penumpang Tipe-A dikelola |
| | 12 | Pelabuhan Sungai, Danau, dan Penyeberangan dikelola |
| 4639.CCC | | OM Sarana Bidang Konektivitas Darat |
| | 13 | Pemeliharaan Alat Uji dan Alat Kalibrasi Kendaraan Bermotor |
| 4639.CDP | | OM Prasarana Bidang Konektivitas Darat |
| | 14 | Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) dikelola |
| 4639.PEH | | Promosi |
| | 15 | Sadar Lalu Lintas Usia Dini (SALUD) (Prioritas Nasional) |
| 022.04 | | Ditjen Perhubungan Laut |
| 4658.CBR | | Dukungan Teknis |
| | 16 | Perencanaan Teknis |
| 4658.CCE | | OM Sarana Bidang Konektivitas Laut |
| | 17 | OM Sarana Bantu Navigasi Pelayaran |
| | 18 | OM Telekomunikasi Pelayaran |
| | 19 | OM Kapal Negara |
| | 20 | OM Pengamatan Laut |
| 4658.CDD | | OM Prasarana Bidang Konektivitas Laut |
| | 21 | OM Fasilitas Pendukung |
| | 22 | OM Bangunan Operasional |
| 4659.QAH | | Pelayanan Publik Lainnya |
| | 23 | Layanan Konektivitas Angkutan Keperintisan |
| | 24 | Layanan Konektivitas Angkutan Barang |
| | 25 | Layanan Konektivitas Angkutan Ternak |
| | 26 | Layanan Konektivitas Angkutan Rede |
| | 27 | Layanan Konektivitas Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru |
| 4660.CBR | | Dukungan Teknis |

| Kode | No | Uraian |
|-----------------|-----------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| | 28 | Perencanaan Teknis |
| 4660.CCE | | OM Sarana Bidang Konektivitas Laut |
| | 29 | OM Peralatan Pendukung Operasional |
| 4660.CDD | | OM Prasarana Bidang Konektivitas Laut |
| | 30 | Laporan Dokumen Lingkungan |
| 4661.AFA | | Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria |
| | 31 | Studi |
| | 32 | Kebijakan |
| 4661.CDS | | OM Prasarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi |
| | 33 | OM Software |
| | 34 | OM Hardware |
| 022.05 | | Ditjen Perhubungan Udara |
| 1960.AFA | | Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria |
| | 35 | Norma, Standar, Prosedur, Kriteria Bidang Angkutan Udara |
| 1960.BIF | | Pengawasan dan Pengendalian Layanan |
| | 36 | Layanan Pengawasan Bidang Angkutan Udara |
| | 37 | Layanan Pengendalian Bidang Angkutan Udara |
| 4614.AEC | | Kerja sama |
| | 38 | Kerjasama Lembaga Penerbangan Internasional |
| 4645.AFA | | Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria |
| | 39 | Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria Bidang Bandar Udara |
| 4645.BIF | | Pengawasan dan Pengendalian Layanan |
| | 40 | Layanan Pengendalian Bidang Bandar Udara |
| 4645.RBE | | Prasarana Bidang Konektivitas Udara |
| | 41 | Pendampingan KPBU lokasi Bandara Singkawang |
| 4646.AFA | | Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria |
| | 42 | Norma, Standar, Prosedur, Kriteria Bidang Keamanan Penerbangan |
| | 43 | Norma, Standar, Prosedur, Kriteria Bidang Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara |
| | 44 | Norma, Standar, Prosedur, Kriteria Kebijakan Bidang Navigasi Penerbangan |
| 4646.BIF | | Pengawasan dan Pengendalian Layanan |
| | 45 | Layanan Pengendalian Bidang Keamanan Penerbangan |
| | 46 | Layanan Pengendalian Bidang Navigasi Penerbangan |
| 4646.CBE | | Prasarana Bidang Konektivitas Udara |
| | 47 | Dokumen Program Keselamatan dan Keamanan Penerbangan |
| 4646.CCD | | OM Sarana Bidang Konektivitas Udara |
| | 48 | Operasional dan Pemeliharaan Peralatan Penunjang Bidang Pengawasan dan Pengendalian Navigasi Penerbangan |
| 4646.CCL | | Prasarana Bidang Konektivitas Udara |
| | 49 | Operasional, Perbaikan dan Pemeliharaan Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi |
| 4647.CBE | | Prasarana Bidang Konektivitas Udara |
| | 50 | Dokumen Pendukung Bandar Udara |
| 4647.CDE | | OM Prasarana Bidang Konektivitas Udara |
| | 51 | Operasional dan Pemeliharaan Prasarana Bandar Udara |
| | 52 | Operasional dan Pemeliharaan Prasarana Penunjang Kebandarudaraan |
| | 53 | Operasional dan Pemeliharaan Prasarana Bandar Udara (PEN) |
| 022.08 | | Ditjen Perkeretaapian |
| 4641.BAH | | Pelayanan Publik Lainnya |
| | 54 | Angkutan Sepeda Motor Melalui Kereta Api |

| Kode | No | Uraian |
|-----------------|-----------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| 4641.QAH | | Pelayanan Publik Lainnya |
| | 55 | Penyelenggaraan Layanan Kereta Api Perintis lintas Muara Satu-Kutablang |
| | 56 | Penyelenggaraan Layanan Kereta Api Perintis lintas Binjai - Besitang - Sei Liput |
| | 57 | Penyelenggaraan Layanan Kereta Api Perintis lintas Lubuk Alung - Kayu Tanam |
| | 58 | Penyelenggaraan Layanan Perintis LRT Sumatera Selatan |
| | 59 | Penyelenggaraan Layanan Kereta Api Perintis lintas Makassar - Parepare |
| | 60 | Penyelenggaraan Layanan Kereta Api Perintis lintas Purwosari - Wonogiri |
| | 61 | Penyelenggaraan Layanan Kereta Api Perintis antara Rantauprapat - Pondok S5 |
| 4642.AFA | | Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria |
| | 62 | Studi Pedoman Teknis Bidang Keselamatan dan Keamanan Perkeretaapian |
| 4642.CCK | | OM Sarana Bidang Konektivitas Perkeretaapian |
| | 63 | Operasi Peralatan Pengujian Sarana Perkeretaapian |
| | 64 | Perawatan Peralatan Pengujian Sarana Perkeretaapian |
| 4642.CDA | | OM Prasarana Bidang Perkeretaapian |
| | 65 | Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian (IMO) |
| | 66 | Perawatan Prasarana Perkeretaapian |
| | 67 | Operasi Prasarana Perkeretaapian |
| 4643.AFA | | Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria |
| | 68 | Pedoman Teknis Bidang Sarana Perkeretaapian |
| 4643.CCK | | OM Sarana Bidang Konektivitas Perkeretaapian |
| | 69 | Operasi Sarana Perkeretaapian |
| | 70 | Perawatan Sarana Perkeretaapian |
| | 71 | Perawatan Peralatan Pengujian Sarana Perkeretaapian |
| 4643.RBA | | Prasarana Bidang Konektivitas Perkeretaapian |
| | 72 | Kewajiban Pembayaran atas Ketersediaan Layanan (Availability Payment) (Dukungan/Pendamping KPBU) |
| 022.11 | | Badan Kebijakan Transportasi |
| 6891.ABF | | Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana |
| | 73 | Rumusan NSPK Transportasi |
| | 74 | Kebijakan Pembangunan Transportasi |
| 022.12 | | Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan |
| 1975.AEC | | Kerja sama |
| | 75 | Kerjasama dan Kemitraan Antar Instansi dan Lembaga Transportasi Darat |
| | 76 | Kerjasama dan Kemitraan Antar Instansi dan Lembaga Transportasi Laut |
| | 77 | Kerjasama dan Kemitraan Antar Instansi dan Lembaga Transportasi Udara |
| 1975.AFA | | Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria |
| | 78 | SKKNI Transportasi Udara |
| | 79 | Kurikulum dan Silabi Berbasis Kompetensi Transportasi Darat |
| | 80 | Kurikulum dan Silabi Berbasis Kompetensi Transportasi Udara |
| | 81 | Standard Rencana Pengembangan Sumber Daya Manusia Transportasi Udara |
| 1975.BMA | | Data dan Informasi Publik |
| | 82 | Sistem Data Informasi Penunjang Diklat Darat |
| | 83 | Sistem Data Informasi Penunjang Diklat Laut |
| | 84 | Sistem Data Informasi Penunjang Diklat Udara |
| 1975.DAB | | Pendidikan Vokasi Bidang Infrastruktur |
| | 85 | Pendidikan Strata II (S-2) Terapan Transportasi Laut |
| 1975.DCB | | Pelatihan Bidang Infrastruktur |
| | 86 | Tenaga Pendidik Bidang Transportasi Darat yang Kompeten |
| | 87 | Tenaga Kependidikan Bidang Transportasi Darat yang Kompeten |

| Kode | No | Uraian |
|-----------------|-----------|---|
| 1 | 2 | 3 |
| | 88 | Tenaga Pendidik Bidang Transportasi Laut yang Kompeten |
| | 89 | Tenaga Pendidik Bidang Transportasi Udara yang Kompeten |
| | 90 | Tenaga Kependidikan Bidang Transportasi Udara yang Kompeten |
| | 91 | Diklat Teknis Pengembangan ASN Transportasi Darat |
| | 92 | Diklat Teknis Pengembangan ASN Transportasi Laut |
| | 93 | Diklat Teknis Pengembangan ASN Transportasi Udara |
| 1979.AEC | | Kerja sama |
| | 94 | Kerja sama (SBK) |
| 3996.AEC | | Kerja sama |
| | 95 | Kerjasama dan Kemitraan Antar Instansi dan Lembaga Transportasi Darat |
| | 96 | Kerjasama dan Kemitraan Antar Instansi dan Lembaga Transportasi Laut |
| | 97 | Kerjasama dan Kemitraan Antar Instansi dan Lembaga Transportasi Udara |
| 3996.AFA | | Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria |
| | 98 | Modul dan bahan ajar Berbasis Kompetensi Transportasi Darat |
| | 99 | Modul dan bahan ajar Berbasis Kompetensi Transportasi Laut |
| | 100 | Modul dan bahan ajar Berbasis Kompetensi Transportasi Udara |
| 3996.BMA | | Data dan Informasi Publik |
| | 101 | Data Peserta dan Penyerapan Lulusan Diklat Transportasi Darat |
| | 102 | Data Peserta dan Penyerapan Lulusan Diklat Transportasi Laut |
| | 103 | Data Peserta dan Penyerapan Lulusan Diklat Transportasi Udara |
| | 104 | Dokumen Hasil Evaluasi Pasca Diklat Transportasi Darat |
| | 105 | Dokumen Hasil Evaluasi Pasca Diklat Transportasi Laut |
| | 106 | Dokumen Hasil Evaluasi Pasca Diklat Transportasi Udara |
| 3996.DAB | | Pendidikan Vokasi Bidang Infrastruktur |
| | 107 | Pendidikan Strata II (S-2) Terapan Transportasi Darat |
| 3996.DCB | | Pelatihan Bidang Infrastruktur |
| | 108 | Diklat Peningkatan Kompetensi Penjenjangan Transportasi Darat |
| | 109 | Diklat Peningkatan Kompetensi Penjenjangan Transportasi Laut |
| | 110 | Diklat Peningkatan Kompetensi Pemutakhiran Transportasi Laut |
| | 111 | Diklat Peningkatan Kompetensi Penyegaran Transportasi Laut |
| | 112 | Diklat Peningkatan Kompetensi Penjenjangan Transportasi Udara |
| | 113 | Diklat Teknis Bidang Transportasi Darat |
| | 114 | Diklat Teknis Bidang Transportasi Laut |
| | 115 | Diklat Teknis Bidang Transportasi Udara |
| 3996.SAB | | Pendidikan Vokasi Bidang Infrastruktur |
| | 116 | Diklat Pembentukan Reguler (non Pola Pembibitan) Transportasi Laut (Prioritas Nasional) |
| 3996.SCB | | Pelatihan Bidang Infrastruktur |
| | 117 | Diklat Pemberdayaan Masyarakat bidang Transportasi Darat (Prioritas Nasional) |
| | 118 | Diklat Pemberdayaan Masyarakat bidang Transportasi Laut(Prioritas Nasional) |
| | 119 | Diklat Pemberdayaan Masyarakat bidang Transportasi Udara (Prioritas Nasional) |

15. Kementerian Negara/Lembaga: Kementerian Kesehatan (024)

| Kode | No | Uraian |
|-----------------|-----------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| 024.02 | | Inspektorat Jenderal |
| 2052.EBD | | Layanan Manajemen Kinerja Internal |
| | 1 | Pelaksanaan Pengawasan Program Transformasi Sistem Kesehatan/ Program Strategis Kementerian Kesehatan |
| | 2 | Layanan Audit Kinerja Dalam Kota Lingkup Mitra Strategis Inspektorat |
| | 3 | Layanan Audit Kinerja Luar Provinsi Lingkup Mitra Strategis Inspektorat |
| | 4 | Layanan Pengawasan Pelayanan Kesehatan Haji |
| | 5 | Layanan Penilaian Good Public Governance |
| | 6 | Layanan Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan |
| 2056.EBD | | Layanan Manajemen Kinerja Internal |
| | 7 | Hasil Pengawasan Internal |
| | 8 | Pembinaan/Penilaian Pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani Lingkup Kementerian Kesehatan |
| 024.03 | | Direktorat Jenderal Kesehatan Primer Dan Komunitas |
| 4812.FAB | | Sistem Informasi Pemerintahan |
| | 9 | Modular Aplikasi Kesprimkom |
| 7954.QAH | | Pelayanan Publik Lainnya |
| | 10 | Layanan kewaspadaan dini berbasis laboratorium (HS) |
| 024.04 | | Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan |
| 7957.PDE | | Akkreditasi Lembaga |
| | 11 | Rumah Sakit Terakreditasi Paripurna |
| 7958.DCM | | Pelatihan Bidang Kesehatan |
| | 12 | Pelatihan Bidang Kesehatan (LR) |
| 7958.SCM | | Pelatihan Bidang Kesehatan |
| | 13 | Pelatihan Keterampilan dan Kompetensi Lainnya pada Proyek Penguanan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (IsDB) |
| | 14 | Pelaksanaan Pendidikan Formal Tenaga RS pada Proyek Penguanan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (IsDB) |
| | 15 | Pelatihan Keterampilan dan Kompetensi Lainnya pada Proyek Penguanan Pelayanan Kanker Terpadu (IsDB) - LR |
| | 16 | Pelaksanaan Pendidikan Formal Tenaga RS pada Proyek Penguanan Pelayanan Kanker Terpadu (IsDB) |
| 024.05 | | Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit |
| 7956.PFA | | Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria |
| | 17 | Penyusunan NSPK Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Kategori I |
| | 18 | Penyusunan NSPK Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Kategori II |
| 7960.QAH | | Pelayanan Publik Lainnya |
| | 19 | Layanan Pengendalian Faktor Risiko Penyakit di Pelabuhan Penyeberangan (HS-29) |
| | 20 | Layanan pengendalian faktor risiko penyakit di bandar udara |
| | 21 | Layanan pengendalian faktor risiko penyakit di PLBN |
| | 22 | Layanan pengendalian faktor risiko penyakit pada situasi khusus skala besar wilayah Jakarta, Papua |
| | 23 | Layanan pengendalian faktor risiko penyakit di Bandar Udara Soekarno Hatta Terminal Internasional |
| | 24 | Layanan kegawatdaruratan dan rujukan jarak jauh wilayah Jakarta Papua |
| | 25 | Layanan pengendalian faktor risiko penyakit DBD |
| | 26 | Layanan survei faktor risiko penyakit pes dan leptospirosis |
| | 27 | Layanan pengendalian faktor risiko penyakit diare |
| | 28 | Layanan pengendalian faktor risiko penyakit malaria |

| Kode | No | Uraian |
|-----------------|-----------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| | 29 | Layanan survei faktor risiko penyakit DBD |
| | 30 | Layanan survei faktor risiko penyakit malaria |
| | 31 | Layanan survei faktor risiko penyakit diare |
| | 32 | Layanan survei faktor risiko penyakit HIV AIDS |
| | 33 | Layanan survei faktor risiko penyakit TB |
| | 34 | Layanan kegawatdaruratan dan rujukan jarak dekat wilayah Jakarta Papua |
| | 35 | Layanan pengendalian faktor risiko penyakit di pelabuhan |
| | 36 | Layanan penemuan aktif surveilans migrasi malaria |
| | 37 | Layanan penemuan aktif surveilans migrasi malaria skala besar |
| | 38 | Layanan survei faktor risiko penyakit DBD di asrama haji dalam kota |
| | 39 | Layanan pengendalian faktor risiko penyakit pada situasi khusus skala kecil wilayah Jakarta, Papua |
| | 40 | Layanan Kesehatan Haji Pada Masa Embarkasi dalam kota |
| | 41 | Layanan Kesehatan Haji Pada Masa Embarkasi skala kecil |
| | 42 | Layanan Kesehatan Haji Pada Masa Embarkasi skala besar |
| | 43 | Layanan Kesehatan Haji Pada Masa Debarkasi dalam kota |
| | 44 | Layanan Kesehatan Haji Pada Masa Debarkasi skala kecil |
| | 45 | Layanan Kesehatan Haji Pada Masa Debarkasi skala besar |
| | 46 | Layanan pengendalian faktor risiko penyakit pada situasi khusus skala besar wilayah Jawa, Bali, Nusa Tenggara |
| | 47 | Layanan pengendalian faktor risiko penyakit pada situasi khusus skala besar wilayah Sumatera, Kalimantan, Maluku, Sulawesi |
| | 48 | Layanan pengendalian faktor risiko penyakit pada situasi khusus skala kecil wilayah Jawa, Bali, Nusa Tenggara |
| | 49 | Layanan pengendalian faktor risiko penyakit pada situasi khusus skala kecil wilayah Sumatera, Kalimantan, Maluku, Sulawesi |
| | 50 | Layanan kegawatdaruratan dan rujukan jarak jauh wilayah Jawa, Bali, Nusa Tenggara |
| | 51 | Layanan kegawatdaruratan dan rujukan jarak jauh Sumatera, Kalimantan, Maluku, Sulawesi |
| | 52 | Layanan kegawatdaruratan dan rujukan jarak dekat Jawa, Bali, Nusa Tenggara |
| | 53 | Layanan kegawatdaruratan dan rujukan jarak dekat Sumatera, Kalimantan, Maluku, Sulawesi |
| 7961.PFA | | Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria |
| | 54 | NSPK Surveilans dan Kekarantinaan Kesehatan Kategori I (HS-29) |
| | 55 | NSPK Surveilans dan Kekarantinaan Kesehatan Kategori II (HS-29) |
| | 56 | NSPK Kesehatan Lingkungan Kategori I (HS-29) |
| 024.07 | | Ditjen Farmasi Dan Alat Kesehatan |
| 4814.CBT | | Prasarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi |
| | 57 | Pemeliharaan prasarana teknologi informasi dan komunikasi |
| 7962.ACD | | Perizinan Lembaga |
| | 58 | Sertifikasi di bidang Produksi dan Distribusi Kefarmasian |
| 7962.FAB | | Sistem Informasi Pemerintahan |
| | 59 | Sistem Informasi di Bidang Produksi dan Distribusi Kefarmasian |
| 7965.ADF | | Sertifikasi Lembaga |
| | 60 | Sertifikasi dan Penilaian Kepatuhan Penerapan CDAKB |
| 7965.BIC | | Pengawasan dan Pengendalian Lembaga |
| | 61 | Pengawasan, Pengamatan, Penelitian dan Pemeriksaan Terhadap Laporan Produk Alat Kesehatan dan PKRT |

16. Kementerian Negara/Lembaga: Kementerian Agama (025)

| Kode | No | Uraian |
|-----------------|-----------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| 025.05 | | Ditjen Bimbingan Masyarakat Kristen |
| 2136.QEK | | Bantuan Pendidikan Dasar dan Menengah |
| | 1 | Siswa SMTK/SMAK Penerima PIP |
| | 2 | Siswa SMPTK Penerima PIP |
| | 3 | Siswa SMTK/SMAK Penerima BOS |
| | 4 | Siswa SMPTK Penerima BOS |
| | 5 | Siswa SDTK Penerima BOS |
| 2137.PEG | | Konferensi dan Event |
| | 6 | Event Seni Budaya Keagamaan Kristen (Pesparawi) |
| 2137.QDB | | Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga |
| | 7 | Lembaga Keagamaan Kristen dan Lembaga Budaya Keagamaan Kristen Yang Dibina dan Difasilitasi |
| | 8 | Lembaga Amal Sosial Kristiani yang diperkuat literasi Program Pengentasan Kemiskinan |
| 2137.QDC | | Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat |
| | 9 | Penyuluhan Agama Kristen Non ASN Penerima Tunjangan |
| 4434.PDG | | Standarisasi Profesi dan SDM |
| | 10 | Guru Agama dan Keagamaan Kristen Yang Tersertifikasi |
| 4434.QDB | | Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga |
| | 11 | Lembaga Pendidikan Agama dan Keagamaan Kristen Yang Ditingkatkan Mutunya |
| 4434.QEI | | Bantuan Lembaga |
| | 12 | Lembaga POKJAWAS/KKG/MGMP Kristen Penerima Bantuan |
| 4434.QEK | | Bantuan Pendidikan Dasar dan Menengah |
| | 13 | Guru Pendidikan Agama dan Keagamaan Kristen Non ASN Penerima Tunjangan Profesi |
| 4434.SCI | | Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Pendidikan |
| | 14 | Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kristen Yang Ditingkatkan Kompetensinya |
| 5101.BGC | | Pelatihan Bidang Pendidikan |
| | 15 | PTKKN yang Meningkat Kualitas Layanan Pendidikannya Melalui PNBP |
| 5101.DCI | | Pelatihan Bidang Pendidikan |
| | 16 | Dosen dan Tenaga Kependidikan pada PTK Kristen yang mengikuti peningkatan Kompetensi |
| 5101.QEJ | | Bantuan Pendidikan Tinggi |
| | 17 | Mahasiswa PTK Kristen Penerima KIP Kuliah |
| 025.06 | | Ditjen Bimbingan Masyarakat Katolik |
| 2131.PDG | | Standardisasi Profesi dan SDM |
| | 18 | Dosen yang tersertifikasi |
| 025.09 | | Ditjen Penyelenggaraan Haji Dan Umrah |
| 2149.UAH | | Pengelolaan Keuangan Negara |
| | 19 | Laporan Keuangan Haji yang Akuntabel |
| 025.11 | | Badan Penelitian Pengembangan Dan Pendidikan Pelatihan |
| 7894.AFA | | Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria |
| | 20 | Kurikulum dan Sistem Penjaminan Mutu Pengembangan Kompetensi SDM Keagamaan |
| 7898.PFA | | Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria |
| | 21 | Kurikulum dan Sistem Penjaminan Mutu Pengembangan Kompetensi SDM Pendidikan |
| 7898.SCI | | Pelatihan Bidang Pendidikan |
| | 22 | Tenaga Teknis Pendidikan yang Ditingkatkan Kompetensinya melalui Platform Pembelajaran Digital |

17. Kementerian Negara/Lembaga: Kementerian Ketenagakerjaan (026)

| Kode | No | Uraian |
|-----------------|----|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 026.13 | | Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi Dan Produktivitas |
| 4053.PDF | | Sertifikasi Lembaga |
| | 1 | Pembinaan LSP |
| 4053.PDI | | Sertifikasi Profesi dan SDM |
| | 2 | SDM Bidang Sertifikasi yang dilatih |
| | 3 | Lulusan pelatihan vokasi yang mendapatkan Sertifikat Kompetensi Kerja |
| 4053.PFA | | Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria |
| | 4 | Skema Sertifikasi Kompetensi Kerja |
| 4055.SCI | | Pelatihan Bidang Pendidikan |
| | 5 | Instruktur Yang Berkompotensi Tinggi |
| | 6 | Tenaga Pelatihan Berkompotensi Tinggi |
| | 7 | Instruktur Berkinerja Tinggi |

18. Kementerian Negara/Lembaga: Kementerian Kelautan dan Perikanan (032)

| Kode | No | Uraian |
|-----------------|-----------|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 032.01 | | Sekretariat Jenderal |
| 6453.BDG | | Fasilitasi dan Pembinaan UMKM |
| | 1 | UMKM yang Dilayani Permodalan BLU |
| 6453.BIF | | Pengawasan dan Pengendalian Layanan |
| | 2 | Layanan Pengelolaan Risiko Modal Usaha |
| 6453.FAE | | Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan |
| | 3 | Laporan Pengelolaan Keuangan |
| | 4 | Laporan Pengawasan Internal Pengelolaan Modal Modal Usaha |
| 032.03 | | Ditjen Perikanan Tangkap |
| 2337.BKB | | Pemantauan produk |
| | 5 | Bantuan sarana penangkapan ikan yang dipantau pemanfaatannya |
| 2339.PCA | | Perizinan Produk |
| | 6 | Izin alokasi usaha perikanan tangkap (SIUP) yang diterbitkan |
| 2341.QKB | | Pemantauan produk |
| | 7 | Laporan data logbook penangkapan Ikan yang dikumpulkan dan diverifikasi |
| 032.04 | | Ditjen Perikanan Budidaya |
| 7021.QED | | Bantuan Tanaman |
| | 8 | Bibit Rumput Laut kultur jaringan yang disalurkan ke masyarakat |
| 7022.QEL | | Bantuan Hewan |
| | 9 | Calon Induk Unggul Ikan Air Payau yang disalurkan ke masyarakat |
| | 10 | Calon Induk Unggul Udang yang disalurkan ke masyarakat |
| | 11 | Benih Ikan Air Payau yang disalurkan ke masyarakat |
| | 12 | Benih Ikan Udang yang disalurkan ke masyarakat |
| 7022.QJC | | Penyidikan dan Pengujian Penyakit |
| | 13 | Sampel Surveilan Resistensi Antimikroba (AMU/AMR) Ikan Air Payau yang diuji |
| 7023.QEL | | Bantuan Hewan |
| | 14 | Benih Kepiting yang disalurkan ke masyarakat |
| | 15 | Benih Ikan Air Laut yang disalurkan ke masyarakat |
| 7023.QJC | | Penyidikan dan Pengujian Penyakit |
| | 16 | Sampel Survaillance Resistensi Antimikroba Ikan Air Laut (AMU/AMR) yang diuji |
| 7024.QEL | | Bantuan Hewan |
| | 17 | Calon Induk Unggul Ikan Air Tawar yang disalurkan ke masyarakat |
| | 18 | Benih Ikan Air Tawar yang disalurkan ke masyarakat |
| 7024.QJC | | Penyidikan dan Pengujian Penyakit |
| | 19 | Sampel Surveilan Resistensi Antimikroba Ikan Air Tawar (AMU/AMR) yang diuji |
| 032.05 | | Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan |
| 2351.AEA | | Koordinasi |
| | 20 | Koordinasi dalam rangka penegakan hukum bidang Kelautan dan Perikanan |
| 2351.AFA | | Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria |
| | 21 | NSPK Bidang Penanganan Pelanggaran |
| 2351.BCE | | Penanganan Perkara |
| | 22 | Sengketa Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang ditangani |
| | 23 | Perkara Kelautan dan Perikanan yang dikenakan Sanksi Pidana |
| 2352.ACA | | Perizinan Produk |
| | 24 | Surat Keterangan Aktivasi Transmitter (SKAT) yang diterbitkan |
| 2352.AFA | | Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria |
| | 25 | NSPK Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan |
| | 26 | NSPK Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan |
| 2352.BHD | | Operasi Pengawasan Sumber Daya Alam |
| | 27 | Operasi Intelijen Pengawasan Sumber Daya Kelautan |

| Kode | No | Uraian |
|-----------------|-----------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| | 28 | Operasi Intelijen Pengawasan Sumber Daya Perikanan |
| 2352.BII | | Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan |
| | 29 | Audit pemanfaatan ruang laut yang dilaporkan |
| 2352.FBA | | Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah |
| | 30 | Pemerintah Daerah yang dibina dalam pelaksanaan Pengawasan Kelautan |
| | 31 | Pemerintah Daerah yang dibina dalam pelaksanaan Pengawasan Perikanan |
| 2352.QIC | | Pengawasan dan Pengendalian Lembaga |
| | 32 | Unit usaha sektor kelautan yang diawasi kepatuhannya |
| | 33 | Unit usaha sektor perikanan yang diawasi kepatuhannya |
| 2352.RDS | | OP Prasarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi |
| | 34 | Sistem Pemantauan SDKP Terintegrasi yang Operasional |
| 2353.BDC | | Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat |
| | 35 | Masyarakat yang memperoleh penyadartahuan dalam pemanfaatan sumber daya perikanan |
| | 36 | Masyarakat yang memperoleh penyadartahuan dalam pemanfaatan sumber daya kelautan |
| 2353.QDD | | Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat |
| | 37 | Pembinaan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) |
| 032.06 | | Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan Dan Perikanan |
| 2357.PBR | | Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan |
| | 38 | Kertas Posisi Runding Penyelesaian Hambatan Ekspor dan Perluasan Akses Pasar Luar Negeri |
| 2357.PEE | | Kemitraan |
| | 39 | Kesepakatan Pemasaran Produk Perikanan di Dalam negeri |
| | 40 | Kerjasama pemasaran rumput laut |
| 2357.PEH | | Promosi |
| | 41 | Kampanye Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan) |
| | 42 | Promosi Produk Kelautan dan Perikanan Skala Internasional |
| | 43 | Promosi Produk Kelautan dan Perikanan di Dalam Negeri |
| 2358.QDG | | Fasilitasi dan Pembinaan UMKM |
| | 44 | Pelaku usaha yang difasilitasi pembinaan diversifikasi produk bernilai tambah |
| 5279.ADA | | Standarisasi Produk |
| | 45 | Produk Kelautan dan Perikanan yang Dinilai Kesesuaianya |
| 5279.AEF | | Sosialisasi dan Diseminasi |
| | 46 | Masyarakat yang Menerima Diseminasi Pengujian Penerapan Produk Kelautan dan Perikanan |
| 7025.BMA | | Data dan Informasi Publik |
| | 47 | Profil Ketersediaan dan Kebutuhan Hasil KP |
| 7025.QDH | | Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha |
| | 48 | Pelaku Usaha yang menerapkan Sistem Ketertelusuran dan Logistik Ikan Nasional (STELINA) |
| 7026.PEH | | Promosi |
| | 49 | Promosi Usaha dan Investasi KP |
| 7026.QDB | | Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga |
| | 50 | Lembaga usaha KP yang ditingkatkan kapasitas kelembagaan usaha |
| 7026.QDG | | Fasilitasi dan Pembinaan UMKM |
| | 51 | Wirausaha KP yang Ditumbuhkan dan/atau Dibina |
| 032.12 | | Badan Penyuluhan Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan Dan Perikanan |
| 2375.ABW | | Kebijakan Bidang Kemaritiman dan Kelautan |
| | 52 | Inovasi yang diterapkan untuk Pelatihan Kelautan dan Perikanan |
| 2375.AFA | | Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria |
| | 53 | Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Pelatihan Kelautan dan Perikanan |
| 2376.SAC | | Pendidikan Vokasi Bidang Pertanian, Kelautan, dan Perikanan |
| | 54 | Peserta Pendidikan Vokasi Kelautan dan Perikanan Yang Kompeten |

19. Kementerian Negara/Lembaga: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (035)

| Kode | No | Uraian |
|-----------------|-----------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| 035.01 | | Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian |
| 2490.ABA | | Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan |
| | 1 | Rekomendasi Kebijakan atas Isu-Isu strategis di bidang Regulasi, Penegakan Hukum, dan Ketahanan Ekonomi |
| | 2 | Rekomendasi Kebijakan atas Isu-Isu strategis di bidang Pembangunan Daerah |
| | 3 | Rekomendasi Kebijakan atas Isu-Isu strategis di bidang Pengembangan Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi |
| 2491.ABA | | Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan |
| | 4 | Rekomendasi Kebijakan Terkait Ekosistem Ekonomi Digital |
| 2521.ABB | | Kebijakan Bidang Investasi dan Perdagangan |
| | 5 | Rekomendasi Kebijakan Bidang Fasilitasi Perdagangan |
| 4543.ABA | | Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan |
| | 6 | Rekomendasi Kebijakan terkait Program Pengembangan Usaha Bullion |
| 4545.PBK | | Kebijakan Bidang Tenaga Kerja, Industri dan UMKM |
| | 7 | Rekomendasi Pengembangan Ekosistem Ketenagakerjaan |
| 4550.PBK | | Kebijakan Bidang Tenaga Kerja, Industri dan UMKM |
| | 8 | Rekomendasi Kebijakan Pelaksanaan Cipta Kerja |

20. Kementerian Negara/Lembaga: Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (036)

| Kode | No | Uraian |
|-----------------|-----------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| 036.01 | | Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan |
| 6336.ABH | | Kebijakan Bidang IPTEK, Pendidikan dan Kebudayaan |
| | 1 | Telaahan Staf Ahli Bidang Sumber Daya Manusia Berkualitas |
| 6336.ABL | | Kebijakan Bidang Tata Kelola Pemerintahan |
| | 2 | Telaahan Staf Ahli Bidang Pembangunan Berkelanjutan |
| | 3 | Telaahan Staf Ahli Bidang Hukum dan Tata Kelola Pemerintahan |
| 6338.ABS | | Kebijakan Bidang Ketahanan bencana dan perubahan iklim |
| | 4 | Rekomendasi Alternatif Kebijakan Pengurangan Risiko Bencana |
| | 5 | Rekomendasi Alternatif Kebijakan Penanganan Bencana |
| | 6 | Rekomendasi Alternatif Kebijakan Rehabilitasi dan Rekonstruksi |
| | 7 | Rekomendasi Alternatif Kebijakan Penanggulangan Konflik Sosial |
| 6338.AEA | | Koordinasi |
| | 8 | Koordinasi Penguatan Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial (P3AKS) |
| 6339.ABG | | Kebijakan Bidang Kesehatan |
| | 9 | Rekomendasi Alternatif Kebijakan Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan |
| | 10 | Rekomendasi Alternatif Kebijakan Peningkatan Sumber Daya Kesehatan |
| | 11 | Rekomendasi Alternatif Kebijakan Peningkatan, Kapasitas dan Ketahanan Kesehatan |
| 6339.PEA | | Koordinasi |
| | 12 | Koordinasi Percepatan Penurunan Stunting |
| | 13 | Koordinasi Penanggulangan Tuberkulosis |
| 6340.ABN | | Kebijakan Bidang Sosial |
| | 14 | Rekomendasi Alternatif Kebijakan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak |
| | 15 | Rekomendasi Alternatif Kebijakan Pemenuhan Hak, Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan |
| | 16 | Rekomendasi Alternatif Kebijakan Kesejahteraan Lanjut Usia dan Penyandang Disabilitas |
| | 17 | Rekomendasi Alternatif Kebijakan Ketahanan Keluarga dan Pembangunan Kependudukan |
| 6340.AEA | | Koordinasi |
| | 18 | Koordinasi Penyusunan RAN PAUD HI 2025 - 2029 |
| | 19 | Koordinasi Pelaksanaan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Pornografi |
| 6341.ABH | | Kebijakan Bidang IPTEK, Pendidikan dan Kebudayaan |
| | 20 | Rekomendasi Alternatif Kebijakan Bidang Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan |
| | 21 | Rekomendasi Alternatif Kebijakan Penguatan Budi Pekerti |
| | 22 | Rekomendasi Alternatif Kebijakan Bina Keagamaan |
| | 23 | Rekomendasi Alternatif Kebijakan Pemberdayaan Pemuda dan Peningkatan Prestasi Bangsa |
| 6341.AEA | | Koordinasi |
| | 24 | Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan |
| 6342.ABH | | Kebijakan Bidang IPTEK, Pendidikan dan Kebudayaan |
| | 25 | Rekomendasi Alternatif Kebijakan Pendidikan Anak Usia Dini dan Dasar |
| | 26 | Rekomendasi Alternatif Kebijakan Pendidikan Menengah dan Tinggi |
| | 27 | Rekomendasi Alternatif Kebijakan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pendidikan |
| | 28 | Rekomendasi Alternatif Kebijakan Riset, Teknologi dan Kemitraan Industri |
| 6342.AEA | | Koordinasi |
| | 29 | Koordinasi Penguatan Pendidikan, Riset, dan Teknologi |
| 7067.ABN | | Kebijakan Bidang Sosial |
| | 30 | Rekomendasi Kebijakan Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan |

21. Kementerian Negara/Lembaga: Kementerian Badan Usaha Milik Negara (041)

| Kode | No | Uraian |
|-----------------|----|--|
| 1 | 2 | 3 |
| 041.01 | | Kementerian Badan Usaha Milik Negara |
| 4419.BBD | | Layanan Bantuan Hukum Badan Usaha |
| | 1 | Legal opinion atas pelaksanaan hukum korporasi BUMN |
| 4420.ABD | | Kebijakan Bidang Hukum dan HAM |
| | 2 | Rumusan Kebijakan dalam Pembinaan dan Pengawasan BUMN bidang Hukum |

22. Kementerian Negara/Lembaga: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (047)

| Kode | No | Uraian |
|-----------------|-----------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| 047.01 | | Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak |
| 2787.AEC | | Kerja sama |
| | 1 | Kerja sama antar lembaga yang dibentuk Masyarakat di bidang PA |
| 2787.QIC | | Pengawasan dan Pengendalian Lembaga |
| | 2 | Pengawasan Penyelenggaraan perlindungan anak di K/L |
| 2790.QDB | | Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga |
| | 3 | K/L Bidang Sosial dan Budaya yang diberikan Bimtek dan Supervisi tentang Pelaksanaan Kebijakan PUG |
| 2794.QDB | | Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga |
| | 4 | K/L Bidang Sosial dan Budaya yang diberikan Bimtek dan Supervisi tentang Pelaksanaan Kebijakan PUG |
| 2795.QDB | | Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga |
| | 5 | K/L Bidang Ekonomi yang diberikan Bimtek dan Supervisi Tentang Penyelenggaraan PUG |
| 2805.BEA | | Bantuan Masyarakat |
| | 6 | AMPK yang mendapat pemenuhan kebutuhan khusus anak |
| 2805.PDD | | Standardisasi Lembaga |
| | 7 | Standarisasi Lembaga Perlindungan Khusus Ramah Anak |
| 2809.PDD | | Standardisasi Lembaga |
| | 8 | Standardisasi dan Sertifikasi PUSPAGA yang Ramah Anak |
| | 9 | Standardisasi dan Sertifikasi Ruang Bermain Ramah Anak |
| 2809.PEA | | Koordinasi |
| | 10 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan PHAPL |
| 2811.QMB | | Komunikasi Publik |
| | 11 | KIE Kebijakan PHSIPA |
| 2811.UBA | | Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah |
| | 12 | Daerah yang diberikan Bimtek dan Supervisi dalam Pelaksanaan Kebijakan PHSIPA |
| 2812.AEA | | Koordinasi |
| | 13 | Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak atas Kesehatan dan Pendidikan |
| 2812.QDB | | Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga |
| | 14 | K/L yang Diberikan Bimtek dan Supervisi tentang Pelaksanaan Kebijakan PHAKP |
| 6373.PBN | | Kebijakan Bidang Sosial |
| | 15 | Rekomendasi Kebijakan Pemenuhan Hak Anak atas Kesehatan Mental |

23. Kementerian Negara/Lembaga: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (048)

| Kode | No | Uraian |
|-----------------|-----------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| 048.01 | | Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi |
| 6189.ABL | | Kebijakan Bidang Tata Kelola Pemerintahan |
| | 1 | Kebijakan Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana |
| 6191.FAE | | Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan |
| | 2 | Laporan Kinerja Pemerintah Pusat |
| 6191.FAI | | Peningkatan Manajemen Lembaga Pemerintahan |
| | 3 | Evaluasi Indeks Reformasi Birokrasi |
| | 4 | Evaluasi WBK/WBBM |
| | 5 | Evaluasi implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) |
| | 6 | Asistensi Tim Reformasi Birokrasi |
| 6195.AEA | | Koordinasi |
| | 7 | Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik |

24. Kementerian Negara/Lembaga: Badan Intelijen Negara (050)

| Kode | No | Uraian |
|-----------------|-----------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| 050.01 | | Badan Intelijen Negara |
| 2851.DBA | | Pendidikan Tinggi |
| | 1 | Sarjana Sekolah Tinggi Intelijen Negara (STIN) |
| | 2 | Pasca Sarjana Sekolah Tinggi Intelijen Negara (STIN) |
| 5235.BHB | | Operasi Bidang Keamanan |
| | 3 | Analisis Bidang Ideologi Politik dan Sosial Budaya |
| | 4 | Analisis Bidang Keamanan Nasional |
| | 5 | Analisis Bidang Ekonomi |
| | 6 | Analisis Bidang Luar Negeri |

25. Kementerian Negara/Lembaga: Badan Siber dan Sandi Negara (051)

| Kode | No | Uraian |
|-----------------|-----------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| 051.01 | | Badan Siber dan Sandi Negara |
| 3123.AEC | | Kerja sama |
| | 1 | Kerjasama Kemitraan Pendidikan Tinggi |
| 3123.AEG | | Konferensi dan Event |
| | 2 | Konferensi dan Event Poltek SSN |
| 3123.AEH | | Promosi |
| | 3 | Promosi Poltek SSN |
| 6653.ABE | | Kebijakan Bidang Pertahanan dan Keamanan |
| | 4 | Rekomendasi Kebijakan Prioritas Bidang Tata Kelola Keamanan Siber |
| | 5 | Rekomendasi Kebijakan Prioritas Bidang Teknologi Keamanan Siber dan Sandi |
| | 6 | Rekomendasi Kebijakan Prioritas bidang SDM Keamanan Siber dan Sandi |
| 6654.AEB | | Forum |
| | 7 | Forum Keamanan Siber |
| 6655.BDB | | Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga |
| | 8 | Fasilitasi dan Pembinaan Kematangan Keamanan Siber Pemerintah Pusat |
| 6655.FBA | | Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah |
| | 9 | Fasilitasi dan Pembinaan Penyelenggaraan Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Daerah |
| 6656.BDB | | Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga |
| | 10 | Fasilitasi dan Pembinaan Kematangan Keamanan Siber Sektor Keuangan, Perdagangan dan Pariwisata |

26. Kementerian Negara/Lembaga: Badan Pusat Statistik (054)

| Kode | No | Uraian |
|-----------------|-----------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| 054.01 | | Badan Pusat Statistik |
| 2887.EBC | | Layanan Manajemen SDM Internal |
| | 1 | Diklat Teknis Substansi |
| | 2 | Diklat Fungsional |
| | 3 | Standarisasi dan Sertifikasi |
| 2888.EBC | | Layanan Manajemen SDM Internal |
| | 4 | Program DIII |
| | 5 | Program DIV |
| 2896.BDB | | Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga |
| | 6 | Pembinaan Statistik Sektoral Pengembangan Dan Analisis |
| 2896.BMA | | Data dan Informasi Publik |
| | 7 | Publikasi/ Laporan Indeks Pembangunan Manusia |
| 2898.BDB | | Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga |
| | 8 | Pembinaan Statistik Sektoral Neraca Pengeluaran |
| 2899.BDB | | Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga |
| | 9 | Pembinaan Statistik Sektoral Neraca Produksi |
| 2899.BMA | | Data dan Informasi Publik |
| | 10 | Publikasi/ Laporan Neraca Satelit Pariwisata Nasional (TSA) |
| 2902.BDB | | Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga |
| | 11 | Pembinaan Statistik Sektoral Distribusi |
| 2903.BDB | | Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga |
| | 12 | Pembinaan Statistik Sektoral Harga |
| 2904.BDB | | Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga |
| | 13 | Pembinaan Statistik Sektoral Industri, Pertambangan, Penggalian, Energi Dan Konstruksi |
| 2905.BDB | | Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga |
| | 14 | Pembinaan Statistik Sektoral Kependudukan Dan Ketenagakerjaan |
| 2906.BDB | | Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga |
| | 15 | Pembinaan Statistik Sektoral Kesejahteraan Rakyat |
| 2907.BDB | | Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga |
| | 16 | Pembinaan Statistik Sektoral Ketahanan Sosial |
| 2908.BDB | | Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga |
| | 17 | Pembinaan Statistik Sektoral Keuangan, Teknologi Informasi Dan Pariwisata |
| 2909.BDB | | Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga |
| | 18 | Pembinaan Statistik Sektoral Peternakan, Perikanan Dan Kehutanan |
| 2910.BDB | | Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga |
| | 19 | Pembinaan Statistik Sektoral Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan |
| 4203.EBD | | Layanan Manajemen Kinerja Internal |
| | 20 | Layanan Pengawasan Internal Inspektorat Wilayah I |
| 4204.EBD | | Layanan Manajemen Kinerja Internal |
| | 21 | Layanan Pengawasan Internal Inspektorat Wilayah II |
| 4205.EBD | | Layanan Manajemen Kinerja Internal |
| | 22 | Layanan Pengawasan Internal Inspektorat Wilayah III |

27. Kementerian Negara/Lembaga: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional / Bappenas (055)

| Kode | No | Uraian |
|-----------------|-----------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| 055.01 | | Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional |
| 6263.ABP | | Kebijakan Bidang Pengembangan Wilayah |
| | 1 | Kebijakan Perencanaan Pembangunan Jangka Pendek/Tahunan Lingkup Tata Ruang, Pertanahan, dan Penanggulangan Bencana |
| 6268.ABC | | Kebijakan Bidang Politik |
| | 2 | Kebijakan Perencanaan Pembangunan Jangka Pendek/Tahunan Lingkup Politik dan Komunikasi |
| 6271.ABA | | Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan |
| | 3 | Kebijakan Pengelolaan Kegiatan dan Kebijakan |
| | 4 | Kebijakan Analisis Kinerja |
| | 5 | Kegiatan Tata Kelola Internal PAKK |

28. Kementerian Negara/Lembaga: Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN (056)

| Kode | No | Uraian |
|-----------------|-----------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| 056.01 | | Sekretariat Jenderal |
| 5519.AEC | | Kerja sama |
| | 1 | Naskah Perjanjian Kerja Sama Luar Negeri |
| | 2 | Naskah Perjanjian Kerja Sama Dalam Negeri |
| 5526.AEC | | Kerja sama |
| | 3 | Kerjasama Tri Dharma Perguruan Tinggi |
| 5526.DBA | | Pendidikan Tinggi |
| | 4 | Lulusan Diploma IV/Strata-1 Pertanahan |
| 6411.ADI | | Sertifikasi Profesi dan SDM |
| | 5 | SK Surveyor Berlisensi |
| 6412.BAA | | Pelayanan Publik kepada masyarakat |
| | 6 | Layanan Pemetaan Tematik Bidang Skala 1:2.500 |
| | 7 | Layanan Pemetaan Tematik Bidang Tanah untuk Pemecahan Sertifikat Skala 1 : 1.000 |
| 6412.BAC | | Pelayanan Publik kepada badan usaha |
| | 8 | Layanan Pemetaan Tematik Kawasan Skala 1:10.000 |
| 6413.BAH | | Pelayanan Publik Lainnya |
| | 9 | Layanan Informasi Data Tekstual/Grafikal, Salinan/Kutipan/Scan/Fotocopy/Printout Digital Warkah |
| | 10 | Layanan Informasi Data Tekstual/Grafikal, Informasi Tekstual/Grafikal untuk Surveyor Berlisensi |
| | 11 | Pelayanan Informasi Data Tekstual/ Grafikal,Salinan Surat Ukur (untuk Sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun dan Ganti Blanko) |
| | 12 | Pelayanan Informasi Data Tekstual/ Grafikal,Kutipan Gambar Denah Satuan Rumah Susun |
| | 13 | Pelayanan Informasi Data Tekstual/ Grafikal,Kutipan Surat Ukur (kegiatan pengukuran yang sudah dilaksanakan dalam kegiatan lainnya) |
| | 14 | Layanan Legalisasi Gambar Ukur |
| 6413.QAA | | Pelayanan Publik kepada masyarakat |
| | 15 | PBT Konsolidasi Tanah Kategori 1 |
| | 16 | PBT Konsolidasi Tanah Kategori 2 |
| | 17 | PBT Konsolidasi Tanah Kategori 3 |
| | 18 | PBT Konsolidasi Tanah Kategori 4 |
| | 19 | PBT Konsolidasi Tanah Kategori 5 |
| | 20 | PBT Non Sistematis Kategori 1 |
| | 21 | PBT Non Sistematis Kategori 2 |
| | 22 | PBT Non Sistematis Kategori 3 |
| | 23 | PBT Non Sistematis Kategori 4 |
| | 24 | PBT Non Sistematis Kategori 5 |
| 6413.QAB | | Pelayanan Publik kepada lembaga |
| | 25 | PBT BMN Luas Kurang Dari 25.000 M2 Kategori 1 |
| | 26 | PBT BMN Luas Kurang Dari 25.000 M2 Kategori 2 |
| | 27 | PBT BMN Luas Kurang Dari 25.000 M2 Kategori 3 |
| | 28 | PBT BMN Luas Kurang Dari 25.000 M2 Kategori 4 |
| | 29 | PBT BMN Luas Kurang Dari 25.000 M2 Kategori 5 |
| | 30 | PBT BMN Luas 25.000 -100.000 M2 Kategori 1 |
| | 31 | PBT BMN Luas 25.000 -100.000 M2 Kategori 2 |
| | 32 | PBT BMN Luas 25.000 -100.000 M2 Kategori 3 |
| | 33 | PBT BMN Luas 25.000 -100.000 M2 Kategori 5 |
| | 34 | PBT BMN Luas lebih dari 100.000 M2 Kategori 3 |
| | 35 | PBT BMN Luas lebih dari 100.000 M2 Kategori 5 |
| | 36 | PBT Luasan (Ulayat/HKB Redis/HPL) Jawa Bali |

| Kode | No | Uraian |
|-----------------|-----------|---|
| 1 | 2 | 3 |
| | 37 | PBT Luasan (Ulayat/HKB Redis/HPL) Luar Jawa Bali |
| | 38 | PBT PTSL Desa/Kelurahan Lengkap Jawa Bali |
| | 39 | PBT PTSL Desa/Kelurahan Lengkap Luar Jawa Bali |
| | 40 | PBT PTSL Desa/Kelurahan Lengkap Jawa Bali Pihak Ketiga |
| | 41 | PBT PTSL Desa/Kelurahan Lengkap Luar Jawa Bali Pihak Ketiga |
| 6413.QAH | | Pelayanan Publik Lainnya |
| | 42 | Berita Acara Penyuluhan Luar Jawa Bali |
| | 43 | Berita Acara Penyuluhan Jawa Bali |
| 6422.BAB | | Pelayanan Publik kepada lembaga |
| | 44 | Materi Teknis Perencanaan Konsolidasi Tanah Kategori I (Materi Teknis) |
| | 45 | Materi Teknis Perencanaan Konsolidasi Tanah Kategori II (Materi Teknis) |
| 6422.QAA | | Pelayanan Publik kepada masyarakat |
| | 46 | Surat Keputusan Konsolidasi Tanah Kategori I |
| | 47 | Surat Keputusan Konsolidasi Tanah Kategori II |
| 056.03 | | Direktorat Jenderal Tata Ruang |
| 6668.PBT | | Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan |
| | 48 | Dokumen Persetujuan Substansi RTRW Prov/Kab/Kota di Wilayah I |
| | 49 | Dokumen Persetujuan Substansi RTRW Prov/Kab/Kota di Wilayah II |
| 056.04 | | Direktorat Jenderal Survei Dan Pemetaan Pertanahan Dan Ruang |
| 5544.AFA | | Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria |
| | 50 | NSPK Bidang Survei dan Pemetaan Tematik |
| 5544.BAC | | Pelayanan Publik kepada badan usaha |
| | 51 | Layanan Peta Tematik Kawasan |
| 5546.AFA | | Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria |
| | 52 | NSPK Bidang Pengukuran dan Pemetaan Kadastral |
| 056.05 | | Direktorat Jenderal Penetapan Hak Dan Pendaftaran Tanah |
| 5549.BAH | | Pelayanan Publik Lainnya |
| | 53 | Surat Keputusan Penetapan Hak Atas Tanah Perorangan dan Badan Hukum |
| 056.07 | | Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah Dan Pengembangan Pertanahan |
| 5563.BAH | | Pelayanan Publik Lainnya |
| | 54 | Lisensi Penilai Tanah (SK) |
| 056.09 | | Direktorat Jenderal Penanganan Sengketa Dan Konflik Pertanahan |
| 5576.BCE | | Penanganan Perkara |
| | 55 | Surat Keputusan Penyelesaian Perkara Pertanahan - Pusat |

29. Kementerian Negara/Lembaga: Perpustakaan Nasional RI (057)

| Kode | No | Uraian |
|-----------------|-----------|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 057.01 | | Perpustakaan Nasional Republik Indonesia |
| 3004.BAA | | Pelayanan Publik kepada masyarakat |
| | 1 | Pemustaka Yang Memanfaatkan Layanan |
| 3004.RAA | | Sarana Bidang Pendidikan |
| | 2 | Alih Bahasa Naskah Kuno Nusantara |
| | 3 | Alih Wahana Naskah Kuno Nusantara |
| | 4 | Alih Aksara Naskah Kuno Nusantara |
| | 5 | Saduran Naskah Kuno Nusantara |
| | 6 | Kajian Naskah Kuno Nusantara |
| | 7 | Pemajuan Naskah Kuno Nusantara sebagai Ingatan Kolektif Nasional (IKON) dan Memory of The World (MoW) |
| 3005.DCI | | Pelatihan Bidang Pendidikan |
| | 8 | ASN Perpustakaan Yang Ditingkatkan Kompetensinya |
| 3005.SCI | | Pelatihan Bidang Pendidikan |
| | 9 | Peserta Pelatihan Kepustakawan (Metode Pembelajaran Bauran) |
| 3008.ADG | | Standarisasi Profesi dan SDM |
| | 10 | Tenaga Perpustakaan Yang Ditingkatkan Kompetensinya |
| 3008.PDI | | Sertifikasi Profesi dan SDM |
| | 11 | Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Bidang Perpustakaan |
| | 12 | Sertifikasi Pustakawan |
| 3009.RAA | | Sarana Bidang Pendidikan |
| | 13 | Naskah Kuno Nusantara yang Dikonservasi |
| | 14 | Naskah Kuno Nusantara yang Dialih media |
| | 15 | Bahan Perpustakaan yang Dialih media |
| 3010.BAA | | Pelayanan Publik kepada masyarakat |
| | 16 | Pemustaka yang memanfaatkan layanan UPT Perpustakaan Proklamator |
| 3010.CAA | | Sarana Bidang Pendidikan |
| | 17 | Bahan Perpustakaan yang Diadakan, Diolah, Dianalisis, dan Dilestarikan |
| 3010.QAA | | Pelayanan Publik kepada masyarakat |
| | 18 | Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di UPT Perpustakaan Proklamator Bung Karno |
| 4380.BDB | | Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga |
| | 19 | Pembinaan dan Penghargaan SSKCKR |
| 4380.CAA | | Sarana Bidang Pendidikan |
| | 20 | Naskah Kuno Nusantara yang Diadakan |
| | 21 | Koleksi KCKR yang Terhimpun |
| | 22 | Bahan Perpustakaan yang Diadakan |
| 4381.BAH | | Pelayanan Publik Lainnya |
| | 23 | Pengajuan ISBN yang Diproses |
| | 24 | Pengajuan ISMN yang Diproses |
| 4381.CAA | | Sarana Bidang Pendidikan |
| | 25 | Metadata Bibliografi yang Dihimpun |
| | 26 | Bahan Perpustakaan yang Diolah |
| 4382.BMA | | Data dan Informasi Publik |
| | 27 | Layanan Data dan Informasi Publik |
| 4382.QDB | | Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga |
| | 28 | Perpustakaan Tergabung Jejaring |
| 4383.PDE | | Akreditasi Lembaga |
| | 29 | Akreditasi Perpustakaan Umum |
| | 30 | Akreditasi Perpustakaan Khusus |
| | 31 | Akreditasi Perpustakaan Sekolah/Madrasah |

| Kode | No | Uraian |
|-----------------|-----------|---|
| 1 | 2 | 3 |
| | 32 | Akreditasi Perpustakaan Perguruan Tinggi |
| | 33 | Penjaminan Mutu Perpustakaan Terakreditasi |
| 4385.QDD | | Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat |
| | 34 | Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik Literasi |
| 4386.ABH | | Kebijakan Bidang IPTEK, Pendidikan dan Kebudayaan |
| | 35 | Dokumen Hasil Analisis Perpustakaan, Pengembangan Budaya Baca, dan Literasi |
| 4386.QDC | | Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat |
| | 36 | Relawan Literasi Masyarakat (RELIMA) |
| 5272.BAA | | Pelayanan Publik kepada masyarakat |
| | 37 | Pemustaka UPT Perpustakaan Proklamator Bung Hatta |
| 5272.CAA | | Sarana Bidang Pendidikan |
| | 38 | Bahan Perpustakaan Yang Diadakan, Diolah, Dan Dilestarikan |
| 5272.QAA | | Pelayanan Publik kepada masyarakat |
| | 39 | Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di UPT Perpustakaan Proklamator Bung Hatta |

30. Kementerian Negara/Lembaga: Kementerian Komunikasi dan Digital (059)

| Kode | No | Uraian |
|-----------------|-----------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| 059.09 | | Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital |
| 7436.BAH | | Pelayanan Publik Lainnya |
| | 1 | Persiapan, Pelaksanaan Dan Evaluasi On Site Kalibrasi Wilayah Pulau Jawa |
| 7437.BAH | | Pelayanan Publik Lainnya |
| | 2 | Pemantauan, Pengukuran Dan Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Dalam Kota Wilayah Sumatera |
| | 3 | Pemantauan, Pengukuran Dan Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota Transportasi Darat Wilayah Sumatera |
| | 4 | Pemantauan, Pengukuran Dan Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota Transportasi Udara Wilayah Sumatera |
| | 5 | Pemantauan, Pengukuran Dan Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota Transportasi Laut/Sungai Wilayah Sumatera |
| | 6 | Penertiban Frekuensi Radio Dan Standar Perangkat Pos Dan Informatika Dalam Kota Wilayah Sumatera |
| | 7 | Penertiban Frekuensi Radio Dan Standar Perangkat Pos Dan Informatika Luar Kota Transportasi Darat Wilayah Sumatera |
| | 8 | Penertiban Frekuensi Radio Dan Standar Perangkat Pos Dan Informatika Luar Kota Transportasi Laut/Sungai Wilayah Sumatera |
| | 9 | Pemantauan, Pengukuran Dan Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Dalam Kota Wilayah Jawa |
| | 10 | Pemantauan, Pengukuran Dan Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota Transportasi Darat Wilayah Jawa |
| | 11 | Pemantauan, Pengukuran Dan Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota Transportasi Laut/Sungai Wilayah Jawa |
| | 12 | Penertiban Frekuensi Radio Dan Standar Perangkat Pos Dan Informatika Dalam Kota Wilayah Jawa |
| | 13 | Penertiban Frekuensi Radio Dan Standar Perangkat Pos Dan Informatika Luar Kota Transportasi Darat Wilayah Jawa |
| | 14 | Penertiban Frekuensi Radio Dan Standar Perangkat Pos Dan Informatika Luar Kota Transportasi Laut/Sungai Wilayah Jawa |
| | 15 | Pemantauan, Pengukuran Dan Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Dalam Kota Wilayah Kalimantan |
| | 16 | Pemantauan, Pengukuran Dan Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota Transportasi Darat Wilayah Kalimantan |
| | 17 | Pemantauan, Pengukuran Dan Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota Transportasi Udara Wilayah Kalimantan |
| | 18 | Pemantauan, Pengukuran Dan Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota Transportasi Laut/Sungai Wilayah Kalimantan |
| | 19 | Penertiban Frekuensi Radio Dan Standar Perangkat Pos Dan Informatika Dalam Kota Wilayah Kalimantan |
| | 20 | Penertiban Frekuensi Radio Dan Standar Perangkat Pos Dan Informatika Luar Kota Transportasi Darat Wilayah Kalimantan |
| | 21 | Penertiban Frekuensi Radio Dan Standar Perangkat Pos Dan Informatika Luar Kota Transportasi Udara Wilayah Kalimantan |
| | 22 | Penertiban Frekuensi Radio Dan Standar Perangkat Pos Dan Informatika Luar Kota Transportasi Laut/Sungai Wilayah Kalimantan |
| | 23 | Pemantauan, Pengukuran Dan Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Dalam Kota Wilayah Sulawesi |
| | 24 | Pemantauan, Pengukuran Dan Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota Transportasi Darat Wilayah Sulawesi |
| | 25 | Pemantauan, Pengukuran Dan Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota Transportasi Udara Wilayah Sulawesi |
| | 26 | Pemantauan, Pengukuran Dan Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota Transportasi Sungai/Laut Wilayah Sulawesi |
| | 27 | Penertiban Frekuensi Radio Dan Standar Perangkat Pos Dan Informatika Dalam Kota Wilayah Sulawesi |
| | 28 | Penertiban Frekuensi Radio Dan Standar Perangkat Pos Dan Informatika Luar Kota Transportasi Darat Wilayah Sulawesi |

| Kode | No | Uraian |
|-------------|-----------|---|
| 1 | 2 | 3 |
| | 29 | Penertiban Frekuensi Radio Dan Standar Perangkat Pos Dan Informatika Luar Kota Transportasi Laut/Sungai Wilayah Sulawesi |
| | 30 | Pemantauan, Pengukuran Dan Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Dalam Kota Wilayah Papua |
| | 31 | Pemantauan, Pengukuran Dan Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota Transportasi Darat Wilayah Papua |
| | 32 | Pemantauan, Pengukuran Dan Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota Transportasi Udara Wilayah Papua |
| | 33 | Pemantauan Pengukuran Dan Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota Transportasi Laut/Sungai Wilayah Papua |
| | 34 | Pemantauan, Pengukuran Dan Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota Transportasi Udara/Laut/Sungai Wilayah Papua |
| | 35 | Penertiban Frekuensi Radio Dan Standar Perangkat Pos Dan Informatika Dalam Kota Wilayah Papua |
| | 36 | Penertiban Frekuensi Radio Dan Standar Perangkat Pos Dan Informatika Luar Kota Transportasi Udara/Darat Wilayah Papua |
| | 37 | Pemantauan, Pengukuran Dan Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Dalam Kota Wilayah Kepulauan |
| | 38 | Pemantauan, Pengukuran Dan Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota Transportasi Darat Wilayah Kepulauan |
| | 39 | Pemantauan, Pengukuran Dan Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota Transportasi Udara Wilayah Kepulauan |
| | 40 | Pemantauan, Pengukuran Dan Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota Transportasi Laut/Sungai Wilayah Kepulauan |
| | 41 | Pemantauan, Pengukuran Dan Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota Transportasi Udara/Laut/Sungai Wilayah Kepulauan |
| | 42 | Pemantauan, Pengukuran Dan Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota Transportasi Darat/Laut Wilayah Kepulauan |
| | 43 | Penertiban Frekuensi Radio Dan Standar Perangkat Pos Dan Informatika Dalam Kota Wilayah Kepulauan |
| | 44 | Penertiban Frekuensi Radio Dan Standar Perangkat Pos Dan Informatika Luar Kota Transportasi Darat Wilayah Kepulauan |
| | 45 | Penertiban Frekuensi Radio Dan Standar Perangkat Pos Dan Informatika Luar Kota Transportasi Udara Wilayah Kepulauan |
| | 46 | Penertiban Frekuensi Radio Dan Standar Perangkat Pos Dan Informatika Luar Kota Transportasi Laut/Sungai Wilayah Kepulauan |

31. Kementerian Negara/Lembaga: Kepolisian Negara RI (060)

| Kode | No | Uraian |
|-----------------|-----------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| 060.01 | | Kepolisian Negara Republik Indonesia |
| 3097.DBE | | Pendidikan Non Gelar |
| | 1 | Pendidikan Sekolah Staf dan Pimpinan Pertama Polri |
| 3098.DBA | | Pendidikan Tinggi |
| | 2 | Pendidikan Tinggi Ilmu kepolisian (S3) |
| 3099.DBE | | Pendidikan Non Gelar |
| | 3 | Sekolah Staf dan Pimpinan menengah Polri |
| 3100.DBE | | Pendidikan Non Gelar |
| | 4 | Pendidikan Pembentukan Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana (SIPSS) |
| 3100.DCG | | Pelatihan Bidang Pertahanan dan Keamanan |
| | 5 | Diklat Pim |
| 3142.BCE | | Penanganan Perkara |
| | 6 | Penanganan tindak pidana yang terkait kekerasan terhadap perempuan dan kelompok rentan lainnya |
| | 7 | Penanganan tindak pidana pidana yang terkait kekerasan terhadap anak |
| | 8 | Penanganan tindak pidana perdagangan orang, pelindungan buruh dan penyelundupan manusia |
| 4342.BCE | | Penanganan Perkara |
| | 9 | Penanganan Tindak Pidana Perairan |
| 5069.DCG | | Pelatihan Bidang Pertahanan dan Keamanan |
| | 10 | Peningkatan kualitas tenaga pendidik |
| 5070.EBD | | Layanan Manajemen Kinerja Internal |
| | 11 | Penyusunan Kurikulum Diklat Polri |

32. Kementerian Negara/Lembaga: Badan Pengawas Obat dan Makanan (063)

| Kode | No | Uraian |
|-----------------|-----------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| 063.01 | | Badan Pengawas Obat Dan Makanan |
| 3165.QCD | | Perkara Hukum Badan Usaha |
| | 1 | Perkara Di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan Balai Besar POM Di Jakarta |
| | 2 | Perkara Di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan Balai Besar POM Di Bandung |
| | 3 | Perkara Di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan Balai POM Di Tasikmalaya |
| | 4 | Perkara Di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan Balai POM Di Bogor |
| | 5 | Perkara Di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan Balai Besar POM Di Semarang |
| | 6 | Perkara Di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan Loka POM Di Kab Banyumas |
| | 7 | Perkara Di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan Balai POM Di Surakarta |
| | 8 | Perkara Di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan Balai Besar POM Di Yogyakarta |
| | 9 | Perkara Di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan Balai Besar POM Di Surabaya |
| | 10 | Perkara Di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan Balai POM Di Kediri |
| | 11 | Perkara Di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan Balai POM Di Jember |
| | 12 | Perkara Di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan Balai Besar POM Di Banda Aceh |
| | 13 | Perkara Di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan Loka POM Di Kab Aceh Tengah |
| | 14 | Perkara Di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan Loka POM Di Kab Aceh Selatan |
| | 15 | Perkara Di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan Balai Besar POM Di Medan |
| | 16 | Perkara Di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan Loka POM Di Kota Tanjung Balai |
| | 17 | Perkara Di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan Loka POM Di Kab Toba |
| | 18 | Perkara Di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan Balai Besar POM Di Padang |
| | 19 | Perkara Di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan Balai POM Di Payakumbuh |
| | 20 | Perkara Di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan Loka POM Di Kab Sijunjung |
| | 21 | Perkara Di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan Balai Besar POM Di Pekanbaru |
| | 22 | Perkara Di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan Loka POM Di Kota Dumai |
| | 23 | Perkara Di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan Loka POM Di Kab Indragiri Hilir |
| | 24 | Perkara Di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan Balai Besar POM Di Jambi |
| | 25 | Perkara Di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan Loka POM Di Kab Bungo |
| | 26 | Perkara Di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan Balai Besar POM Di Palembang |
| | 27 | Perkara Di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan Loka POM Di Kota Lubuklinggau |
| | 28 | Perkara Di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan Balai Besar POM Di Bandar Lampung |
| | 29 | Perkara Di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan Loka POM Di Kab Tulangbawang |
| | 30 | Perkara Di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan Balai Besar POM Di Pontianak |
| | 31 | Perkara Di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan Loka POM Di Kab Sanggau |
| | 32 | Perkara Di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan Balai Besar POM Di Palangka Raya |
| | 33 | Perkara Di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan Loka POM Di Kab Kotawaringin Barat |
| | 34 | Perkara Di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan Balai Besar POM Di Banjarbaru |
| | 35 | Perkara Di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan Loka POM Di Kab Tabalong |
| | 36 | Perkara Di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan Loka POM Di Kab Tanah Bumbu |
| | 37 | Perkara Di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan Di Balai Besar POM Di Samarinda |
| | 38 | Perkara Di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan Loka POM Di Kota Balikpapan |
| | 39 | Perkara Di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan Balai POM Di Tarakan |
| | 40 | Perkara Di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan Balai Besar POM Di Manado |
| | 41 | Perkara Di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan Loka POM Di Kab Kepulauan Sangihe |
| | 42 | Perkara Di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan Balai POM Di Palu |
| | 43 | Perkara Di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan Loka POM Di Kab Banggai |
| | 44 | Perkara Di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan Balai Besar POM Di Makassar |
| | 45 | Perkara Di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan Balai POM Di Palopo |
| | 46 | Perkara Di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan Balai POM Di Kendari |

| Kode | No | Uraian |
|-----------------|-----------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| | 47 | Perkara Di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan Loka POM Di Kota Bau Bau |
| | 48 | Perkara Di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan Balai POM Di Ambon |
| | 49 | Perkara Di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan Loka POM Di Kab Kepulauan Tanimbar |
| | 50 | Perkara Di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan Balai Besar POM Di Denpasar |
| | 51 | Perkara Di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan Loka POM Di Kab Buleleng |
| | 52 | Perkara Di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan Balai Besar POM Di Mataram |
| | 53 | Perkara Di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan Loka POM Di Kab Bima |
| | 54 | Perkara Di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan Balai POM Di Kupang |
| | 55 | Perkara Di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan Loka POM Di Kab Ende |
| | 56 | Perkara Di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan Loka POM Di Kab Manggarai Barat |
| | 57 | Perkara Di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan Balai Besar POM Di Jayapura |
| | 58 | Perkara Di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan Loka POM Di Kab Merauke |
| | 59 | Perkara Di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan Loka POM Di Kab Mimika |
| | 60 | Perkara Di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan Balai POM Di Bengkulu |
| | 61 | Perkara Di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan Loka POM Di Kab Rejang Lebong |
| | 62 | Perkara Di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan Balai POM Di Sofifi |
| | 63 | Perkara Di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan Loka POM Di Kab Pulau Morotai |
| | 64 | Perkara Di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan Balai Besar POM Di Serang |
| | 65 | Perkara Di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan Balai POM Di Tangerang |
| | 66 | Perkara Di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan Balai POM Di Pangkal Pinang |
| | 67 | Perkara Di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan Loka POM Di Kab Belitung |
| | 68 | Perkara Di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan Balai POM Di Gorontalo |
| | 69 | Perkara Di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan Balai POM Di Batam |
| | 70 | Perkara Di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan Loka POM Di Kota Tanjungpinang |
| | 71 | Perkara Di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan Balai POM Di Manokwari |
| | 72 | Perkara Di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan Loka POM Di Kab Sorong |
| | 73 | Perkara Di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan Balai POM Di Mamuju |
| 4118.BKB | | Pemantauan produk |
| | 74 | Rekomendasi Intelijen Yang Berkualitas |

33. Kementerian Negara/Lembaga: Lembaga Ketahanan Nasional (064)

| Kode | No | Uraian |
|-----------------|----|--|
| 1 | 2 | 3 |
| 064.01 | | Lembaga Ketahanan Nasional |
| 3190.SBE | | Pendidikan Non Gelar |
| | 1 | Pendidikan Penyiapan dan Pemantapan Pimpinan Nasional |
| 3191.DBE | | Pendidikan Non Gelar |
| | 2 | Pendidikan Pemantapan Pimpinan Nasional |
| 3195.QDC | | Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat |
| | 3 | Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan |
| 3197.QDC | | Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat |
| | 4 | Training Of Trainner (TOT) Nilai-Nilai Kebangsaan |
| 3198.QDC | | Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat |
| | 5 | Dialog Wawasan Kebangsaan |
| 3199.ABC | | Kebijakan Bidang Politik |
| | 6 | Kajian Strategis Bidang Ideologi dan Politik |
| 3200.ABA | | Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan |
| | 7 | Kajian Strategis Bidang Ekonomi dan Sumber Kekayaan Alam |
| 3201.ABN | | Kebijakan Bidang Sosial |
| | 8 | Kajian Strategik Bidang Sosial, Budaya, dan Demografi |
| 3202.ABE | | Kebijakan Bidang Pertahanan dan Keamanan |
| | 9 | Kajian Strategis Bidang Pertahanan, Keamanan, dan Geografi |

34. Kementerian Negara/Lembaga: Badan Narkotika Nasional (066)

| Kode | No | Uraian |
|-----------------|-----------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| 066.01 | | Badan Narkotika Nasional |
| 4020.BAA | | Pelayanan Publik kepada masyarakat |
| | 1 | Program Rehabilitasi Penyalah Guna Narkoba dengan Kondisi Khusus di Balai Besar Rehabilitasi BNN |
| | 2 | Program Rehabilitasi Penyalah Guna Narkoba dengan Tingkat Keparahan Berat di Balai Besar Rehabilitasi BNN |
| | 3 | Program Rehabilitasi Penyalah Guna Narkoba dengan Tingkat Keparahan Sedang di Balai Besar Rehabilitasi BNN |
| | 4 | Program Rehabilitasi Penyalah Guna Narkoba dengan Tingkat Keparahan Berat di Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah |
| | 5 | Program Rehabilitasi Penyalah Guna Narkoba dengan Tingkat Keparahan Sedang di Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah |
| | 6 | Program Rehabilitasi Penyalah Guna Narkoba dengan Tingkat Keparahan Berat di Balai Rehabilitasi BNN Baddoka |
| | 7 | Program Rehabilitasi Penyalah Guna Narkoba dengan Tingkat Keparahan Sedang di Balai Rehabilitasi BNN Baddoka |
| | 8 | Program Rehabilitasi Penyalah Guna Narkoba dengan Tingkat Keparahan Berat di Loka Rehabilitasi BNN Batam |
| | 9 | Program Rehabilitasi Penyalah Guna Narkoba dengan Tingkat Keparahan Sedang di Loka Rehabilitasi BNN Batam |
| | 10 | Program Rehabilitasi Penyalah Guna Narkoba dengan Tingkat Keparahan Berat di Loka Rehabilitasi BNN Kalianda |
| | 11 | Program Rehabilitasi Penyalah Guna Narkoba dengan Tingkat Keparahan Sedang di Loka Rehabilitasi BNN Kalianda |
| | 12 | Program Rehabilitasi Penyalah Guna Narkoba dengan Tingkat Keparahan Berat di Loka Rehabilitasi BNN Deli Serdang |
| | 13 | Program Rehabilitasi Penyalah Guna Narkoba dengan Tingkat Keparahan Sedang di Loka Rehabilitasi BNN Deli Serdang |
| 6239.BJA | | Penyidikan dan Pengujian Produk |
| | 14 | Layanan Pemeriksaan Uji Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Bahan Adiktif Lainnya |

35. Kementerian Negara/Lembaga: Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga / Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (068)

| Kode | No | Uraian |
|-----------------|-----------|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 068.01 | | Kementerian Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga / Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional |
| 3316.PFA | | Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria |
| | 1 | Pedoman di bidang akses pelayanan KB |
| 3316.QEI | | Bantuan Lembaga |
| | 2 | Fasyankes yang mendapat pemenuhan ketersediaan alokan |
| 3316.UBA | | Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah |
| | 3 | Provinsi yang mendapatkan bimbingan teknis di bidang akses pelayanan KB |
| 3317.UBA | | Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah |
| | 4 | Provinsi yang mendapatkan bimbingan teknis di bidang pembinaan keluarga dengan anak usia dini |
| | 5 | Provinsi yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan Taman Asuh Sayang Anak (TAMASYA) |
| 3319.FBA | | Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah |
| | 6 | Provinsi yang mendapatkan bimbingan teknis di bidang pembinaan ketahanan keluarga dan remaja |
| 3319.QDD | | Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat |
| | 7 | PIK Remaja dan BKR yang mendapat fasilitasi dan pembinaan Edukasi Kespro dan Gizi bagi Remaja (Pro PN Provinsi DKI Jakarta) |
| 3319.UBA | | Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah |
| | 8 | Provinsi yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan Gerakan Ayah Teladan (GATE) |
| | 9 | Provinsi yang mendapatkan pembinaan pelembagaan BKR |
| | 10 | Provinsi yang mendapatkan pembinaan pelembagaan GenRe |
| 3320.UBA | | Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah |
| | 11 | Provinsi yang mendapatkan bimbingan teknis dalam Peningkatan pelayanan KB pasca persalinan |
| 3322.AFA | | Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria |
| | 12 | Pedoman di bidang pelayanan KB wilayah khusus |
| 3322.UBA | | Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah |
| | 13 | Provinsi yang mendapatkan bimbingan teknis dibidang pelayanan KB wilayah khusus |
| 3324.PFA | | Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria |
| | 14 | Pedoman terkait Peningkatan kualitas hidup lansia melalui pendampingan keluarga |
| 3324.UBA | | Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah |
| | 15 | Provinsi yang mendapatkan fasilitasi dan bimbingan teknis di bidang pembinaan ketahanan keluarga lansia |
| | 16 | Provinsi yang mendapatkan fasilitasi dan bimbingan teknis di bidang pembinaan ketahanan keluarga rentan |
| 3325.AFA | | Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria |
| | 17 | Pedoman di bidang Kerja sama Pendidikan kependudukan |
| 3326.AFA | | Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria |
| | 18 | Pedoman di bidang Kebijakan Pengendalian Penduduk |
| 3327.PFA | | Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria |
| | 19 | Pedoman di bidang Kualitas Pelayanan Keluarga Berencana |
| 3327.UBA | | Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah |
| | 20 | Provinsi yang mendapatkan bimbingan teknis dalam peningkatan kualitas pelayanan KB |
| 3328.AFA | | Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria |
| | 21 | Pedoman di bidang analisis dampak kependudukan |
| 3328.QDD | | Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat |

| Kode | No | Uraian |
|-----------------|-----------|---|
| 1 | 2 | 3 |
| | 22 | Kampung Keluarga Berkualitas (Pro PN Provinsi DKI Jakarta) |
| 3329.FBA | | Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah |
| | 23 | Pemerintah Daerah yang mendapatkan fasilitasi dalam penyusunan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) Tingkat Prov/Kab/Kota |
| 3331.DCJ | | Pelatihan Bidang Sosial |
| | 24 | SDM eksternal yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan Program Bangga Kencana Tk. Provinsi dan Kab/Kota |
| 3331.QDD | | Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat |
| | 25 | PIK Remaja dan BKR yang mendapat fasilitasi dan pembinaan Edukasi Kespro dan Gizi bagi Remaja |
| | 26 | Kampung Keluarga Berkualitas |
| 3331.QEI | | Bantuan Lembaga |
| | 27 | Fasyankes yang terpenuhi ketersediaan Alat/Obat Kontrasepsi (Alokon) |
| 3331.UBA | | Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah |
| | 28 | Pemerintah Daerah yang mendapatkan fasilitasi, Intensifikasi dan integrasi pelayanan KBKR di wilayah khusus |
| 7557.AFA | | Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria |
| | 29 | Pedoman di bidang tata kelola data dan Teknologi informasi |

36. Kementerian Negara/Lembaga: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (074)

| Kode | No | Uraian |
|-----------------|----|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 074.01 | | Komnas HAM |
| 5679.AEF | | Sosialisasi dan Diseminasi |
| | 1 | Penyebarluasan Wawasan HAM |
| | 2 | Peningkatan Aktualisasi HAM Indonesia |
| | 3 | Diseminasi Nilai-Nilai HAM di Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Sumatera Barat |
| | 4 | Diseminasi Nilai-Nilai HAM di Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Papua |
| 5680.BCC | | Perkara Hukum Kelompok Masyarakat |
| | 5 | Penanganan Pengaduan Dugaan Pelanggaran HAM |

37. Kementerian Negara/Lembaga: Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (075)

| Kode | No | Uraian |
|-----------------|-----------|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 075.01 | | Badan Meteorologi, Klimatologi Dan Geofisika |
| 3344.BMA | | Data dan Informasi Publik |
| | 1 | Layanan Teknologi Komputasi dan Pengelolaan Data yang Standar, Valid, serta Terintegrasi |
| 3345.CCG | | OM Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup |
| | 2 | Pemeliharaan Operasional Layanan Informasi Gempabumi dan Peringatan Dini Tsunami yang Berkualitas |
| 3345.PEF | | Sosialisasi dan Diseminasi |
| | 3 | Layanan Informasi gempabumi dan tsunami melalui Sekolah Lapang Gempabumi (SLG) Wilayah Barat |
| | 4 | Layanan Informasi gempabumi dan tsunami melalui Sekolah Lapang Gempabumi (SLG) Wilayah Tengah |
| | 5 | Layanan Informasi gempabumi dan tsunami melalui Sekolah Lapang Gempabumi (SLG) Wilayah Timur |
| 3346.BMB | | Komunikasi Publik |
| | 6 | Penerbitan Media Publikasi Dan Literasi Majalah Klima |
| 3346.QDC | | Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat |
| | 7 | Sekolah Lapang Iklim Tematik Wilayah Barat |
| | 8 | Sekolah lapang Iklim Tematik Wilayah Tengah |
| | 9 | Sekolah Lapang Iklim Tematik Wilayah Timur |
| | 10 | Sekolah Lapang Iklim Operasional Wilayah Barat |
| | 11 | Sekolah Lapang Iklim Operasional Wilayah Tengah |
| 3349.BDC | | Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat |
| | 12 | Layanan informasi meteorologi penerbangan melalui Sekolah lapang meteorologi penerbangan |
| 3350.AEF | | Sosialisasi dan Diseminasi |
| | 13 | Sekolah Lapang Cuaca |
| 3350.BMB | | Komunikasi Publik |
| | 14 | Pelaksanaan Posko Lebaran, Natal, dan Tahun Baru |
| 3352.BAH | | Pelayanan Publik Lainnya |
| | 15 | Layanan Informasi Prediksi Musim Nasional |
| 3353.AEF | | Sosialisasi dan Diseminasi |
| | 16 | Layanan informasi tanda waktu melalui Sekolah Lapang Hilal |
| 3353.BAH | | Pelayanan Publik Lainnya |
| | 17 | Layanan Informasi Posisi Bulan dan Matahari |
| 3353.PBJ | | Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup |
| | 18 | Layanan Informasi kerentanan seismik di kota besar |
| 5201.CCG | | OM Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup |
| | 19 | Pemeliharaan operasional layanan informasi meteorologi maritim yang berkualitas |
| 5201.QDC | | Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat |
| | 20 | Layanan Informasi meteorologi maritim melalui Sekolah Lapang Cuaca Nelayan (SLCN) wilayah barat |
| | 21 | Layanan Informasi meteorologi maritim melalui Sekolah Lapang Cuaca Nelayan (SLCN) wilayah tengah |
| | 22 | Layanan Informasi meteorologi maritim melalui Sekolah Lapang Cuaca Nelayan (SLCN) wilayah timur |

38. Kementerian Negara/Lembaga: Komisi Pemilihan Umum (076)

| Kode | No | Uraian |
|-----------------|-----------|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 076.01 | | Komisi Pemilihan Umum |
| 7016.QDB | | Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga |
| | 1 | Fasilitasi Pendidikan Pemilih Pemula, Kelompok Rentan, dan Marjinal |
| 7018.QDB | | Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga |
| | 2 | Fasilitasi Pendataan DPT Berkelanjutan |

39. Kementerian Negara/Lembaga: Mahkamah Konstitusi RI (077)

| Kode | No | Uraian |
|-----------------|-----------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| 077.01 | | Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia |
| 4246.BDC | | Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat |
| | 1 | Bimbingan Teknis Pemahaman Hukum Acara Peradilan Konstitusi (Kegiatan) |

40. Kementerian Negara/Lembaga: Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (078)

| Kode | No | Uraian |
|-----------------|-----------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| 078.01 | | Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan |
| 3365.DCF | | Pelatihan Bidang Ekonomi dan Keuangan |
| | 1 | Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme |
| 3384.QCE | | Penanganan Perkara |
| | 2 | Hasil Analisis dan Pemeriksaan Sektor Perjudian |
| | 3 | Hasil Analisis dan Pemeriksaan Sektor Lingkungan Hidup |

41. Kementerian Negara/Lembaga: Badan Informasi Geospasial - BIG (083)

| Kode | No | Uraian |
|-----------------|-----------|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 083.01 | | Badan Informasi Geospasial |
| 6445.CCI | | OM Sarana Pengembangan Kawasan |
| | 1 | Stasiun Ina-Cors yang dikelola di Pulau Bali |
| | 2 | Stasiun Ina-CORS yang Dikelola di Pulau Jawa |
| | 3 | Stasiun Ina-CORS yang Dikelola di Pulau Sumatera |
| | 4 | Stasiun Ina-CORS yang Dikelola di Pulau Kalimantan |
| | 5 | Stasiun Ina-CORS yang Dikelola di Pulau Sulawesi |
| | 6 | Stasiun Ina-CORS yang Dikelola di Pulau Nusa Tenggara |
| | 7 | Stasiun Pasang Surut Permanen yang dikelola Pulau Sumatera |
| | 8 | Stasiun Pasang Surut Permanen yang dikelola Pulau Jawa |
| | 9 | Stasiun Pasang Surut Permanen yang dikelola Pulau Kalimantan |
| | 10 | Stasiun Pasang Surut Permanen yang dikelola Pulau Sulawesi |
| | 11 | Stasiun Pasang Surut Permanen yang dikelola Kepulauan Maluku |
| | 12 | Stasiun Ina-CORS yang Dikelola di Pulau Papua |
| | 13 | Stasiun Pasang Surut Permanen yang dikelola Pulau Nusa Tenggara |
| | 14 | Stasiun Pasang Surut Permanen yang dikelola Pulau Papua |
| | 15 | Stasiun Ina-Cors yang Dikelola di Pulau Maluku |
| | 16 | Stasiun Pasang Surut Permanen yang dikelola Pulau Bali |
| 6449.DCB | | Pelatihan Bidang Infrastruktur |
| | 17 | Pelatihan Kompetensi Profesi Bidang IG |

42. Kementerian Negara/Lembaga: Badan Pengawas Tenaga Nuklir - BAPETEN (085)

| Kode | No | Uraian |
|-----------------|-----------|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 085.01 | | Badan Pengawas Tenaga Nuklir |
| 3563.AEC | | Kerja sama |
| | 1 | Naskah Kerja Sama Bilateral, Regional dan Multilateral |
| 3564.FAB | | Sistem Informasi Pemerintahan |
| | 2 | Sistem Informasi Pemerintahan |
| 3568.ACB | | Perizinan Masyarakat |
| | 3 | Izin Petugas Fasilitas Radiasi |
| | 4 | Izin Petugas Instalasi dan Bahan Nuklir |
| 3568.ACD | | Perizinan Lembaga |
| | 5 | Izin Pemanfaatan Tenaga Nuklir Bidang Kesehatan |
| | 6 | Izin Pemanfaatan Tenaga Nuklir Bidang Fasilitas Penelitian dan Industri |
| | 7 | Izin Reaktor dan Bahan Nuklir |
| 3568.ADC | | Sertifikasi Produk |
| | 8 | Sertifikasi Keandalan Peralatan Ketenaganukliran |
| 3568.ADF | | Sertifikasi Lembaga |
| | 9 | Penunjukan Laboratorium/Lembaga Uji dan Lembaga Pelatihan Ketanaganukliran |
| 3568.ADI | | Sertifikasi Profesi dan SDM |
| | 10 | Sertifikat Personil Uji Kesesuaian |
| | 11 | Sertifikasi Petugas Keamanan Sumber Radioaktif |
| 3568.QIC | | Pengawasan dan Pengendalian Lembaga |
| | 12 | Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Keselamatan dan Keamanan Bidang Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif (FRZR) |
| | 13 | Laporan Hasil Pengawasan (LHP) atas Perizinan Pemanfaatan Pelayanan Kesehatan Berbasis Radiologi |
| | 14 | Laporan Hasil Inspeksi Keselamatan Lingkungan dan Limbah Radioaktif |
| | 15 | Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Penyimpanan Lestari terhadap Sumber Radiasi Bekas dan Limbah Radioaktif guna Mendukung Aspek Keselamatan Masyarakat dan Lingkungan |
| 3569.PFA | | Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria |
| | 16 | Penguanan Pengawasan Kolaboratif Bidang Instalasi dan Bahan Nuklir |
| 4389.QII | | Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan |
| | 17 | Peta Rona Awal Radioaktivitas Lingkungan Calon Tapak PLTN |

43. Kementerian Negara/Lembaga: Lembaga Administrasi Negara (086)

| Kode | No | Uraian |
|-----------------|-----------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| 086.01 | | Lembaga Administrasi Negara |
| 3611.DBA | | Pendidikan Tinggi |
| | 1 | Seleksi Penerimaan |
| | 2 | Wisuda |
| 4827.ADE | | Akreditasi Lembaga |
| | 3 | Akreditasi Program Pelatihan Pada Lembaga Pelatihan Pemerintah |

44. Kementerian Negara/Lembaga: Arsip Nasional RI (087)

| Kode | No | Uraian |
|-----------------|-----------|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 087.01 | | Arsip Nasional Republik Indonesia |
| 3624.FAA | | Kearsipan |
| | 1 | Arsip Statis yang Diolah di BAST sebagai Sarana Temu Balik |
| 3625.FAA | | Kearsipan |
| | 2 | Arsip Terjaga dan Arsip Statis yang Dipreservasi di BAST |
| 3626.BAH | | Pelayanan Publik Lainnya |
| | 3 | Layanan Jasa Penyimpanan Arsip (PNBP) |
| | 4 | Layanan Jasa Pemeliharaan dan Perawatan Arsip (PNBP) |
| | 5 | Layanan Jasa Penataan Arsip (PNBP) |
| | 6 | Layanan Jasa Pembuatan Pedoman Kearsipan (PNBP) |
| | 7 | Layanan Pembuatan Program Aplikasi Sistem Kearsipan (PNBP) |
| 5357.ADI | | Sertifikasi Profesi dan SDM |
| | 8 | SDM Kearsipan yang mendapat sertifikasi (PNBP) |
| 5357.FAC | | Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara |
| | 9 | SDM Kearsipan yang mendapat Pembinaan, Pengembangan dan Pemberdayaan |
| 7034.FBA | | Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah |
| | 10 | Pemerintah Daerah Wilayah I yang Menindaklanjuti Rekomendasi Hasil Pengawasan Kearsipan |
| | 11 | Pemerintah Daerah Wilayah II yang Menindaklanjuti Rekomendasi Hasil Pengawasan Kearsipan |
| 7036.DCI | | Pelatihan Bidang Pendidikan |
| | 12 | SDM yang mengikuti Diklat Fungsional Arsiparis (PNBP) |
| | 13 | SDM yang Mengikuti Diklat Teknis Kearsipan (PNBP) |
| 7037.ABL | | Kebijakan Bidang Tata Kelola Pemerintahan |
| | 14 | Rekomendasi Kebijakan Bidang Kearsipan |
| 7037.ADE | | Akkreditasi Lembaga |
| | 15 | Pencipta Arsip dan Lembaga Kearsipan yang diakkreditasi (PNBP) |
| 7037.UAI | | Peningkatan Manajemen Lembaga Pemerintahan |
| | 16 | Pencipta Arsip dan Lembaga Kearsipan yang Diawasi |
| 7038.FAA | | Kearsipan |
| | 17 | Arsip Statis Nasional yang Diselamatkan |
| | 18 | Arsip Terjaga Nasional yang Diselamatkan |
| | 19 | Arsip Statis Nasional yang Diselamatkan pada BAST |
| 7039.BAA | | Pelayanan Publik kepada masyarakat |
| | 20 | Pengguna Layanan Arsip Statis Kepresidenan yang Memanfaatkan Arsip sebagai Memori Kolektif dan Jati Diri Bangsa |
| 7039.FAA | | Kearsipan |
| | 21 | Arsip yang direproduksi/Laminasi (PNBP) |
| | 22 | Arsip Yang Dinominasikan sebagai Memory Of the World (MOW) |
| 7039.UAA | | Kearsipan |
| | 23 | Arsip Yang Ditetapkan sebagai Memori Kolektif Bangsa (MKB) |
| 7041.FAI | | Peningkatan Manajemen Lembaga Pemerintahan |
| | 24 | Simpul Jaringan yang tergabung di JIKN |

45. Kementerian Negara/Lembaga: Badan Kepegawaian Negara (088)

| Kode | No | Uraian |
|-----------------|-----------|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 088.01 | | Badan Kepegawaian Negara |
| 3639.BCE | | Penanganan Perkara |
| | 1 | Penyelesaian Banding Administratif |
| 3655.BAA | | Pelayanan Publik kepada masyarakat |
| | 2 | Penyelenggaraan seleksi non CASN dengan sistem CAT |
| 3664.FAC | | Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara |
| | 3 | Pendidikan Ilmu Kepegawaian |
| 4845.ABQ | | Kebijakan Bidang Aparatur |
| | 4 | Rekomendasi Kebijakan Penilaian Kinerja dan Standar Kinerja ASN |
| 4846.BAB | | Pelayanan Publik kepada lembaga |
| | 5 | Penetapan Mutasi Lainnya |

46. Kementerian Negara/Lembaga: Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (089)

| Kode | No | Uraian |
|-----------------|-----------|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 089.01 | | Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan |
| 3671.EBD | | Layanan Manajemen Kinerja Internal |
| | 1 | Hasil Pengawasan Internal BPKP |
| | 2 | Hasil Koordinasi Tindak Lanjut Temuan Hasil Pengawasan Internal |
| | 3 | Hasil Evaluasi SAKIP BPKP |
| | 4 | Hasil Evaluasi Maturitas SPIP BPKP |
| 3674.FAC | | Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara |
| | 5 | Diklat Fungsional Auditor RM |
| | 6 | Diklat Fungsional Auditor PNBP |
| | 7 | Diklat Fungsional Auditor STAR |
| | 8 | Diklat Teknis Substansi RM |
| | 9 | Diklat Teknis Substansi PNBP |
| | 10 | Diklat Teknis Substansi STAR |
| | 11 | Diklat Sertifikasi Non JFA RM |
| | 12 | Diklat Sertifikasi Non JFA PNBP |
| | 13 | Diklat Sertifikasi Non JFA STAR |
| | 14 | Pelatihan Daring Massal (MOOC) PNBP |
| | 15 | Hasil Penilaian Potensi dan Kompetensi PNBP |
| 3675.FAG | | Pengawasan Pembangunan |
| | 16 | Hasil Analisis Isu Strategis dan Prioritas Pengawasan |
| | 17 | Hasil Analisis Strategi Kebijakan Pengawasan |
| | 18 | Hasil Pengembangan Manajemen Pengetahuan dan Evaluasi Strategi Kebijakan Pengawasan |
| | 19 | Hasil Penguatan Strategi Kebijakan Pengawasan |
| 3701.FAG | | Pengawasan Pembangunan |
| | 20 | Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Keuangan |
| | 21 | Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Transformasi Sosial |
| | 22 | Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Transformasi Ekonomi |
| | 23 | Rekomendasi Hasil Pengawasan Atas Akuntabilitas Pelaksanaan Pembangunan Nasional dan Daerah |
| | 24 | Rekomendasi Hasil Koordinasi Kebijakan Teknis Pengawasan |
| 3701.UAG | | Pengawasan Pembangunan |
| | 25 | Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih |
| | 26 | Rekomendasi Strategis dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Pembangunan Nasional |
| 4207.FAG | | Pengawasan Pembangunan |
| | 27 | Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Keuangan |
| | 28 | Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Transformasi Sosial |
| | 29 | Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Transformasi Ekonomi |
| | 30 | Rekomendasi Hasil Pengawasan Atas Akuntabilitas Pelaksanaan Pembangunan Nasional dan Daerah |
| 4207.UAG | | Pengawasan Pembangunan |
| | 31 | Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih |
| 4208.FAG | | Pengawasan Pembangunan |
| | 32 | Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Keuangan |
| | 33 | Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Transformasi Sosial |
| | 34 | Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Transformasi Ekonomi |
| | 35 | Rekomendasi Hasil Pengawasan Atas Akuntabilitas Pelaksanaan Pembangunan Nasional dan Daerah |

| Kode | No | Uraian |
|-----------------|-----------|---|
| 1 | 2 | 3 |
| | 36 | Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih |
| 4208.UAG | | Pengawasan Pembangunan |
| | 37 | Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Keuangan |
| | 38 | Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Transformasi Sosial |
| | 39 | Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Transformasi Ekonomi |
| | 40 | Rekomendasi Hasil Pengawasan Atas Akuntabilitas Pelaksanaan Pembangunan Nasional dan Daerah |
| 4209.UAG | | Pengawasan Pembangunan |
| | 41 | Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih |
| 4210.FAG | | Pengawasan Pembangunan |
| | 42 | Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Keuangan |
| | 43 | Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Transformasi Sosial |
| | 44 | Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Transformasi Ekonomi |
| | 45 | Rekomendasi Hasil Pengawasan Atas Akuntabilitas Pelaksanaan Pembangunan Nasional dan Daerah |
| 4210.UAG | | Pengawasan Pembangunan |
| | 46 | Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih |
| 4211.FAG | | Pengawasan Pembangunan |
| | 47 | Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Keuangan |
| | 48 | Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Transformasi Sosial |
| | 49 | Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Transformasi Ekonomi |
| | 50 | Rekomendasi Hasil Pengawasan Atas Akuntabilitas Pelaksanaan Pembangunan Nasional dan Daerah |
| | 51 | Rekomendasi Hasil Koordinasi Kebijakan Teknis Pengawasan |
| 4211.UAG | | Pengawasan Pembangunan |
| | 52 | Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih |
| | 53 | Rekomendasi Strategis dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Pembangunan Nasional |
| 4212.FAG | | Pengawasan Pembangunan |
| | 54 | Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Keuangan |
| | 55 | Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Transformasi Sosial |
| | 56 | Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Transformasi Ekonomi |
| | 57 | Rekomendasi Hasil Pengawasan Atas Akuntabilitas Pelaksanaan Pembangunan Nasional dan Daerah |
| | 58 | Rekomendasi Hasil Koordinasi Kebijakan Teknis Pengawasan |
| 4212.UAG | | Pengawasan Pembangunan |
| | 59 | Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih |
| | 60 | Rekomendasi Strategis dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Pembangunan Nasional |
| 4213.FAG | | Pengawasan Pembangunan |
| | 61 | Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Keuangan |
| | 62 | Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Transformasi Sosial |
| | 63 | Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Transformasi Ekonomi |
| | 64 | Rekomendasi Hasil Pengawasan Atas Akuntabilitas Pelaksanaan Pembangunan Nasional dan Daerah |
| 4213.UAG | | Pengawasan Pembangunan |
| | 65 | Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih |
| 4214.FAG | | Pengawasan Pembangunan |
| | 66 | Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Keuangan |
| | 67 | Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Transformasi Sosial |

| Kode | No | Uraian |
|-----------------|-----------|---|
| 1 | 2 | 3 |
| | 68 | Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Transformasi Ekonomi |
| | 69 | Rekomendasi Hasil Pengawasan Atas Akuntabilitas Pelaksanaan Pembangunan Nasional dan Daerah |
| 4214.UAG | | Pengawasan Pembangunan |
| | 70 | Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih |
| 4215.FAG | | Pengawasan Pembangunan |
| | 71 | Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Keuangan |
| | 72 | Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Transformasi Sosial |
| | 73 | Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Transformasi Ekonomi |
| | 74 | Rekomendasi Hasil Pengawasan Atas Akuntabilitas Pelaksanaan Pembangunan Nasional dan Daerah |
| 4215.UAG | | Pengawasan Pembangunan |
| | 75 | Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih |
| 4216.FAG | | Pengawasan Pembangunan |
| | 76 | Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Keuangan |
| | 77 | Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Transformasi Sosial |
| | 78 | Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Transformasi Ekonomi |
| | 79 | Rekomendasi Hasil Pengawasan Atas Akuntabilitas Pelaksanaan Pembangunan Nasional dan Daerah |
| 4216.UAG | | Pengawasan Pembangunan |
| | 80 | Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih |
| 4217.FAG | | Pengawasan Pembangunan |
| | 81 | Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Keuangan |
| | 82 | Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Transformasi Sosial |
| | 83 | Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Transformasi Ekonomi |
| | 84 | Rekomendasi Hasil Pengawasan Atas Akuntabilitas Pelaksanaan Pembangunan Nasional dan Daerah |
| 4217.UAG | | Pengawasan Pembangunan |
| | 85 | Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih |
| 4218.FAG | | Pengawasan Pembangunan |
| | 86 | Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Keuangan |
| | 87 | Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Transformasi Sosial |
| | 88 | Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Transformasi Ekonomi |
| | 89 | Rekomendasi Hasil Pengawasan Atas Akuntabilitas Pelaksanaan Pembangunan Nasional dan Daerah |
| 4218.UAG | | Pengawasan Pembangunan |
| | 90 | Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih |
| 4219.FAG | | Pengawasan Pembangunan |
| | 91 | Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Keuangan |
| | 92 | Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Transformasi Sosial |
| | 93 | Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Transformasi Ekonomi |
| | 94 | Rekomendasi Hasil Pengawasan Atas Akuntabilitas Pelaksanaan Pembangunan Nasional dan Daerah |
| 4219.UAG | | Pengawasan Pembangunan |
| | 95 | Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih |
| 4220.FAG | | Pengawasan Pembangunan |
| | 96 | Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Keuangan |
| | 97 | Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Transformasi Sosial |
| | 98 | Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Transformasi Ekonomi |

| Kode | No | Uraian |
|-----------------|-----------|---|
| 1 | 2 | 3 |
| | 99 | Rekomendasi Hasil Pengawasan Atas Akuntabilitas Pelaksanaan Pembangunan Nasional dan Daerah |
| | 100 | Rekomendasi Hasil Koordinasi Kebijakan Teknis Pengawasan |
| 4220.UAG | | Pengawasan Pembangunan |
| | 101 | Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih |
| | 102 | Rekomendasi Strategis dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Pembangunan Nasional |
| 4221.FAG | | Pengawasan Pembangunan |
| | 103 | Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Keuangan |
| | 104 | Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Transformasi Sosial |
| | 105 | Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Transformasi Ekonomi |
| | 106 | Rekomendasi Hasil Pengawasan Atas Akuntabilitas Pelaksanaan Pembangunan Nasional dan Daerah |
| 4221.UAG | | Pengawasan Pembangunan |
| | 107 | Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih |
| 4222.FAG | | Pengawasan Pembangunan |
| | 108 | Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Keuangan |
| | 109 | Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Transformasi Sosial |
| | 110 | Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Transformasi Ekonomi |
| | 111 | Rekomendasi Hasil Pengawasan Atas Akuntabilitas Pelaksanaan Pembangunan Nasional dan Daerah |
| 4222.UAG | | Pengawasan Pembangunan |
| | 112 | Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih |
| 4223.FAG | | Pengawasan Pembangunan |
| | 113 | Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Keuangan |
| | 114 | Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Transformasi Sosial |
| | 115 | Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Transformasi Ekonomi |
| | 116 | Rekomendasi Hasil Pengawasan Atas Akuntabilitas Pelaksanaan Pembangunan Nasional dan Daerah |
| | 117 | Rekomendasi Hasil Koordinasi Kebijakan Teknis Pengawasan |
| 4223.UAG | | Pengawasan Pembangunan |
| | 118 | Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih |
| | 119 | Rekomendasi Strategis dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Pembangunan Nasional |
| 4224.FAG | | Pengawasan Pembangunan |
| | 120 | Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Keuangan |
| | 121 | Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Transformasi Sosial |
| | 122 | Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Transformasi Ekonomi |
| | 123 | Rekomendasi Hasil Pengawasan Atas Akuntabilitas Pelaksanaan Pembangunan Nasional dan Daerah |
| 4224.UAG | | Pengawasan Pembangunan |
| | 124 | Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih |
| 4225.FAG | | Pengawasan Pembangunan |
| | 125 | Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Keuangan |
| | 126 | Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Transformasi Sosial |
| | 127 | Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Transformasi Ekonomi |
| | 128 | Rekomendasi Hasil Pengawasan Atas Akuntabilitas Pelaksanaan Pembangunan Nasional dan Daerah |
| 4225.UAG | | Pengawasan Pembangunan |
| | 129 | Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih |
| 4226.FAG | | Pengawasan Pembangunan |

| Kode | No | Uraian |
|-----------------|-----------|---|
| 1 | 2 | 3 |
| | 130 | Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Keuangan |
| | 131 | Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Transformasi Sosial |
| | 132 | Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Transformasi Ekonomi |
| | 133 | Rekomendasi Hasil Pengawasan Atas Akuntabilitas Pelaksanaan Pembangunan Nasional dan Daerah |
| 4226.UAG | | Pengawasan Pembangunan |
| | 134 | Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih |
| 4227.FAG | | Pengawasan Pembangunan |
| | 135 | Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Keuangan |
| | 136 | Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Transformasi Sosial |
| | 137 | Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Transformasi Ekonomi |
| | 138 | Rekomendasi Hasil Pengawasan Atas Akuntabilitas Pelaksanaan Pembangunan Nasional dan Daerah |
| 4227.UAG | | Pengawasan Pembangunan |
| | 139 | Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih |
| 4228.FAG | | Pengawasan Pembangunan |
| | 140 | Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Keuangan |
| | 141 | Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Transformasi Sosial |
| | 142 | Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Transformasi Ekonomi |
| | 143 | Rekomendasi Hasil Pengawasan Atas Akuntabilitas Pelaksanaan Pembangunan Nasional dan Daerah |
| 4228.UAG | | Pengawasan Pembangunan |
| | 144 | Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih |
| 4229.FAG | | Pengawasan Pembangunan |
| | 145 | Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Keuangan |
| | 146 | Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Transformasi Sosial |
| | 147 | Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Transformasi Ekonomi |
| | 148 | Rekomendasi Hasil Pengawasan Atas Akuntabilitas Pelaksanaan Pembangunan Nasional dan Daerah |
| | 149 | Rekomendasi Hasil Koordinasi Kebijakan Teknis Pengawasan |
| 4229.UAG | | Pengawasan Pembangunan |
| | 150 | Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih |
| | 151 | Rekomendasi Strategis dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Pembangunan Nasional |
| 7070.FAG | | Pengawasan Pembangunan |
| | 152 | Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Keuangan |
| | 153 | Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Transformasi Sosial |
| | 154 | Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Transformasi Ekonomi |
| | 155 | Rekomendasi Hasil Pengawasan Atas Akuntabilitas Pelaksanaan Pembangunan Nasional dan Daerah |
| 7070.UAG | | Pengawasan Pembangunan |
| | 156 | Rekomendasi atas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih |
| 7988.FAG | | Pengawasan Pembangunan |
| | 157 | Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Keuangan |
| | 158 | Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Transformasi Sosial |
| | 159 | Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Transformasi Ekonomi |
| | 160 | Rekomendasi Hasil Pengawasan Atas Akuntabilitas Pelaksanaan Pembangunan Nasional dan Daerah |
| 7988.UAG | | Pengawasan Pembangunan |
| | 161 | Rekomendasi atas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih |
| 7989.FAG | | Pengawasan Pembangunan |
| | 162 | Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Keuangan |

| Kode | No | Uraian |
|-----------------|-----------|---|
| 1 | 2 | 3 |
| | 163 | Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Transformasi Sosial |
| | 164 | Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Transformasi Ekonomi |
| | 165 | Rekomendasi Hasil Pengawasan Atas Akuntabilitas Pelaksanaan Pembangunan Nasional dan Daerah |
| 7989.UAG | | Pengawasan Pembangunan |
| | 166 | Rekomendasi atas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih |
| 7990.FAG | | Pengawasan Pembangunan |
| | 167 | Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Keuangan |
| | 168 | Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Transformasi Sosial |
| | 169 | Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Transformasi Ekonomi |
| | 170 | Rekomendasi Hasil Pengawasan Atas Akuntabilitas Pelaksanaan Pembangunan Nasional dan Daerah |
| 7990.UAG | | Pengawasan Pembangunan |
| | 171 | Rekomendasi atas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih |
| 7991.FAG | | Pengawasan Pembangunan |
| | 172 | Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Keuangan |
| | 173 | Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Transformasi Sosial |
| | 174 | Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Transformasi Ekonomi |
| | 175 | Rekomendasi Hasil Pengawasan Atas Akuntabilitas Pelaksanaan Pembangunan Nasional dan Daerah |
| | 176 | Rekomendasi Hasil Koordinasi Kebijakan Teknis Pengawasan |
| 7991.UAG | | Pengawasan Pembangunan |
| | 177 | Rekomendasi atas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih |
| | 178 | Rekomendasi Strategis dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Pembangunan Nasional |

47. Kementerian Negara/Lembaga: Kementerian Perdagangan (090)

| Kode | No | Uraian |
|-----------------|-----------|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 090.01 | | Sekretariat Jenderal |
| 3706.FAB | | Sistem Informasi Pemerintahan |
| | 1 | Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum (JDIH) |
| 3709.BMB | | Komunikasi Publik |
| | 2 | Komunikasi Publik |
| 3713.BAH | | Pelayanan Publik Lainnya |
| | 3 | Layanan perlindungan WNI |
| | 4 | Layanan Pembinaan WNI |
| | 5 | Layanan Keimigrasian |
| | 6 | Layanan Kekonsuleran |
| 3714.PBB | | Kebijakan Bidang Investasi dan Perdagangan |
| | 7 | Laporan Market Intelligence |
| 3714.PEG | | Konferensi dan Event |
| | 8 | Pertemuan di Bidang Perdagangan |
| 3725.ABB | | Kebijakan Bidang Investasi dan Perdagangan |
| | 9 | Saran dan Pertimbangan Kepada Pemerintah Dalam Rangka Perlindungan Konsumen |
| 3725.AEC | | Kerja sama |
| | 10 | Pelaksanaan Kerjasama dan Program Mitra Kelembagaan yang Ditindaklanjuti |
| 3725.BAA | | Pelayanan Publik kepada masyarakat |
| | 11 | Penerimaan Pengaduan Konsumen |
| 3725.BDB | | Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga |
| | 12 | Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat Yang Diberdayakan |
| 3777.PBB | | Kebijakan Bidang Investasi dan Perdagangan |
| | 13 | Market Intelligence |
| 3777.PEH | | Promosi |
| | 14 | Promosi ITPC Barcelona |
| | 15 | Promosi ITPC Budapest |
| | 16 | Promosi ITPC Busan |
| | 17 | Promosi ITPC Chennai |
| | 18 | Promosi ITPC Chicago |
| | 19 | Promosi ITPC Dubai |
| | 20 | Promosi ITPC Hamburg |
| | 21 | Promosi ITPC Jeddah |
| | 22 | Promosi ITPC Johannesburg |
| | 23 | Promosi ITPC Lagos |
| | 24 | Promosi ITPC Los Angeles |
| | 25 | Promosi ITPC Mexico City |
| | 26 | Promosi ITPC Milan |
| | 27 | Promosi ITPC Osaka |
| | 28 | Promosi ITPC Santiago |
| | 29 | Promosi ITPC Sao Paulo |
| | 30 | Promosi ITPC Shanghai |
| | 31 | Promosi ITPC Sydney |
| | 32 | Promosi ITPC Vancouver |
| 3973.ABB | | Kebijakan Bidang Investasi dan Perdagangan |
| | 33 | Rekomendasi Kebijakan Perjanjian Perdagangan Internasional |
| 3973.BCE | | Penanganan Perkara |
| | 34 | Layanan Penanganan Perkara Sengketa Perjanjian Perdagangan Internasional dan Trade Remedies |
| 5048.ABO | | Kebijakan Bidang Teknologi Informasi |

| Kode | No | Uraian |
|-----------------|-----------|---|
| 1 | 2 | 3 |
| | 35 | Rekomendasi Kebijakan Bidang Teknologi Informasi |
| 5048.BMA | | Data dan Informasi Publik |
| | 36 | Data dan Informasi Perdagangan |
| 5048.FAB | | Sistem Informasi Pemerintahan |
| | 37 | Sistem Aplikasi Terpadu Perdagangan |
| | 38 | Pengembangan Satu Data Perdagangan |
| | 39 | Sistem Aplikasi Manajemen Layanan Kementerian Perdagangan |
| | 40 | Sistem Aplikasi Pelaporan Harga (SP2KP) |
| 090.02 | | Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri |
| 3716.PBB | | Kebijakan Bidang Investasi dan Perdagangan |
| | 41 | Profil Pola Konsumsi Rumah Tangga Nasional |
| 3716.PEH | | Promosi |
| | 42 | Promosi Pameran Pangan Nusa |
| | 43 | Kampanye Bangga Buatan Indonesia |
| 3720.BKB | | Pemantauan produk |
| | 44 | Pemantauan Perdagangan |
| 3720.PEA | | Koordinasi |
| | 45 | Koordinasi Pengendalian Distribusi Barang Kebutuhan Pokok, Barang Penting dan Barang Dalam Pengawasan |
| 3722.PEB | | Forum |
| | 46 | Forum Konsultasi Pedagangan Besar dan Eceran termasuk Mobil dan Motor |
| | 47 | Forum Dialog Kebijakan di Bidang Distribusi Tidak Langsung |
| 3722.QDG | | Fasilitasi dan Pembinaan UMKM |
| | 48 | Pembinaan Pelaku Usaha UMKM di Bidang Distribusi Tidak Langsung |
| 5090.PEA | | Koordinasi |
| | 49 | Logistik interaktif |
| 5090.QDB | | Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga |
| | 50 | Gerakan Edukasi dan Layanan terkait Sarana Perdagangan |
| | 51 | Gerakan Edukasi dan Layanan terkait Logistik Nasional |
| 6907.QDC | | Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat |
| | 52 | Tenaga Fasilitator Edukasi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang Mendapat Pembinaan |
| | 53 | Pelaku Usaha yang berpartisipasi dalam Hari Belanja Online Nasional (Harbolnas) |
| 6907.QDH | | Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha |
| | 54 | Pelaku Usaha di Bidang Jasa Perdagangan yang Diberikan Bimbingan Teknis |
| 090.03 | | Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri |
| 3730.ABB | | Kebijakan Bidang Investasi dan Perdagangan |
| | 55 | Rekomendasi Kebijakan terkait Tata Niaga Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan |
| 3730.PBB | | Kebijakan Bidang Investasi dan Perdagangan |
| | 56 | Rekomendasi Kebijakan terkait Harga Patokan Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan |
| 3730.QDG | | Fasilitasi dan Pembinaan UMKM |
| | 57 | Fasilitasi Penerbitan Dokumen Ekspor Produk Industri Kehutanan |
| 3731.ABB | | Kebijakan Bidang Investasi dan Perdagangan |
| | 58 | Rekomendasi Kebijakan Ekspor Komoditi Produk Industri dan Pertambangan |
| 3731.PBB | | Kebijakan Bidang Investasi dan Perdagangan |
| | 59 | Rekomendasi Kebijakan Ekspor Produk Industri dan Pertambangan |
| 3731.PEB | | Forum |
| | 60 | Partisipasi pada Forum terkait Produk Industri dan Pertambangan |
| 3736.ABB | | Kebijakan Bidang Investasi dan Perdagangan |
| | 61 | Rekomendasi Kebijakan di bidang Fasilitasi Ekspor dan Impor |
| 3736.BAC | | Pelayanan Publik kepada badan usaha |

| Kode | No | Uraian |
|-----------------|-----------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| | 62 | Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) di IPSKA dan Penerapan Sertifikasi Mandiri |
| 3736.PBB | | Kebijakan Bidang Investasi dan Perdagangan |
| | 63 | Fasilitasi Peningkatan Akses Pasar Melalui Skema Imbal Dagang |
| 3736.QAC | | Pelayanan Publik kepada badan usaha |
| | 64 | Layanan Fasilitasi Eksport dan Impor |
| | 65 | Layanan Fasilitasi Penetapan Eksportir Bereputasi Baik (EBB) dan Importir Bereputasi Baik (IBB) |
| 3737.PBB | | Kebijakan Bidang Investasi dan Perdagangan |
| | 66 | Rekomendasi Kebijakan Bidang Impor |
| 3737.PEA | | Koordinasi |
| | 67 | Koordinasi Pengendalian Impor |
| | 68 | Penyusunan dan Pelaksanaan Penyederhanaan Perizinan Berusaha di Bidang Impor dalam Kerangka Neraca Komoditas |
| 3745.QCB | | Perkara Hukum Lembaga |
| | 69 | Penanganan Kasus Trade Remedy dan Hambatan Teknis Perdagangan |
| 090.04 | | Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional |
| 3738.PBB | | Kebijakan Bidang Investasi dan Perdagangan |
| | 70 | Fasilitasi Persidangan Perundingan Perdagangan Internasional |
| | 71 | Rekomendasi Ratifikasi Perjanjian Perdagangan Internasional |
| 3738.UAB | | Sistem Informasi Pemerintahan |
| | 72 | Website FTA Helpdesk |
| 3740.PBB | | Kebijakan Bidang Investasi dan Perdagangan |
| | 73 | Rekomendasi Ratifikasi Perjanjian Perdagangan Jasa |
| 3742.PEC | | Kerja sama |
| | 74 | Kerja Sama ASEAN dengan Negara Mitra Dialog |
| 3743.PEC | | Kerja sama |
| | 75 | Komite Bersama Perjanjian Perdagangan Bilateral |
| 3743.PED | | Perjanjian |
| | 76 | Indonesia-GCC CEPA |
| | 77 | Perjanjian Perdagangan Bilateral Lainnya |
| 3744.PEC | | Kerja sama |
| | 78 | Kerja Sama Perdagangan dalam Forum Organisasi Internasional |
| 090.05 | | Inspektorat Jenderal |
| 3746.FAB | | Sistem Informasi Pemerintahan |
| | 79 | Sistem Informasi Manajemen Pengawasan Inspektorat Jenderal |
| 090.06 | | Direktorat Jenderal Pengembangan Eksport Nasional |
| 3751.PEC | | Kerja sama |
| | 80 | Kerja sama kelembagaan eksport di dalam negeri |
| | 81 | Kerja sama kelembagaan eksport di luar negeri |
| 3751.QDB | | Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga |
| | 82 | Pembinaan dan Pengembangan Perwakilan Perdagangan di Luar Negeri |
| 3753.PBB | | Kebijakan Bidang Investasi dan Perdagangan |
| | 83 | Analisa dan informasi pasar eksport |
| 3753.QAC | | Pelayanan Publik kepada badan usaha |
| | 84 | Layanan Inquiry dan Temu Bisnis |
| | 85 | Permanent Trade Exhibition |
| | 86 | Export Center |
| 3753.QDH | | Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha |
| | 87 | Penghargaan Pelaku Usaha |
| 6904.PEH | | Promosi |
| | 88 | Jakarta Muslim Fashion Week |
| | 89 | Partisipasi Pameran Luar Negeri Jasa dan Produk Kreatif |
| | 90 | Partisipasi Pameran Dalam Negeri Jasa dan Produk Kreatif |

| Kode | No | Uraian |
|-----------------|-----------|---|
| 1 | 2 | 3 |
| | 91 | Misi Dagang Jasa dan Produk Kreatif |
| 6904.QDH | | Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha |
| | 92 | Pendampingan Pengembangan Ekspor Jasa |
| | 93 | Pengembangan Desain melalui Indonesia Design Development Center (IDDC) |
| | 94 | Peningkatan Daya Saing Jasa dan Produk Kreatif |
| 6905.PEH | | Promosi |
| | 95 | Trade Expo Indonesia |
| | 96 | Partisipasi Pameran Luar Negeri Produk Primer |
| | 97 | Partisipasi Pameran Dalam Negeri Produk Primer |
| | 98 | Misi Dagang Produk Primer |
| | 99 | Buying Mission |
| 6905.QDH | | Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha |
| | 100 | Fasilitasi Sertifikasi Produk Primer |
| | 101 | Peningkatan Daya Saing Produk Ekspor Primer |
| 6906.PEC | | Kerja sama |
| | 102 | Kerjasama Pengembangan Ekspor Produk Manufaktur |
| 6906.PEH | | Promosi |
| | 103 | Partisipasi Pameran Luar Negeri Produk Manufaktur |
| | 104 | Partisipasi Pameran Dalam Negeri Produk Manufaktur |
| | 105 | Misi Dagang Produk Manufaktur |
| | 106 | (Inisiatif Baru) Branding Produk Manufaktur |
| 6906.QDH | | Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha |
| | 107 | Peningkatan daya saing produk ekspor manufaktur |
| | 108 | Identifikasi Potensi Produk Ekspor di Jawa dan Sumatera |
| | 109 | Pendampingan Pengembangan Produk Ekspor di Jawa dan Sumatera |
| 090.07 | | Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi |
| 3759.BIH | | Pengawasan dan Pengendalian Badan Usaha |
| | 110 | Pengawasan Pelaku Usaha SRG |
| 3760.ACD | | Perizinan Lembaga |
| | 111 | Perizinan Lembaga SRG |
| 3760.BDB | | Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga |
| | 112 | Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga Penyalur Skema Subsidi Resi Gudang |
| 3760.QDB | | Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga |
| | 113 | Fasilitasi dan Pembinaan dalam rangka Peningkatan Kompetensi Pengelola Gudang SRG |
| | 114 | Fasilitasi dan pembinaan calon pengelola Gudang SRG |
| 3760.QDC | | Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat |
| | 115 | Pembinaan / Pendampingan pada pertemuan teknis pelaku usaha PLK |
| | 116 | Pembinaan / Pendampingan pada kegiatan Asistensi pelaku usaha PLK |
| 3761.BBA | | Layanan Bantuan Hukum Perseorangan |
| | 117 | Layanan Asistensi Hukum di Bidang PBK, SRG, dan PLK |
| 3762.BMA | | Data dan Informasi Publik |
| | 118 | Layanan Data dan Informasi Harga Komoditi di Bidang PBK |
| 090.08 | | Badan Kebijakan Perdagangan |
| 3763.AEA | | Koordinasi |
| | 119 | Koordinasi Kesekretariatan Tim Pertimbangan Kepentingan Nasional |
| 6901.ABB | | Kebijakan Bidang Investasi dan Perdagangan |
| | 120 | Rekomendasi Kebijakan Isu Strategis Perdagangan Domestik |
| 6902.ABB | | Kebijakan Bidang Investasi dan Perdagangan |
| | 121 | Rekomendasi Kebijakan Isu Strategis Ekspor Impor dan Pengamanan Perdagangan |
| | 122 | Rekomendasi Kebijakan Kinerja Ekspor Impor dan Pengamanan Perdagangan |
| 6903.ABB | | Kebijakan Bidang Investasi dan Perdagangan |

| Kode | No | Uraian |
|-----------------|-----------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| | 123 | Rekomendasi Kebijakan Isu Strategis Perdagangan Internasional |
| | 124 | Rekomendasi Kebijakan Kinerja Perdagangan Internasional |
| 090.09 | | Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen Dan Tertib Niaga |
| 3724.BAA | | Pelayanan Publik kepada masyarakat |
| | 125 | Layanan Pengaduan Konsumen |
| 3724.BDB | | Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga |
| | 126 | Bimbingan Teknis kepada SDM LPKSM |
| 3726.ABB | | Kebijakan Bidang Investasi dan Perdagangan |
| | 127 | Rancangan Kebijakan dan NSPK bidang Metrologi Legal |
| 3726.ACA | | Perizinan Produk |
| | 128 | Layanan Perijinan Metrologi Legal |
| 3726.ADC | | Sertifikasi Produk |
| | 129 | Standar Ukuran Metrologi Legal Milik UPT yang Diverifikasi |
| | 130 | Standar Ukuran Metrologi Legal milik UML yang diverifikasi |
| | 131 | Layanan evaluasi tipe dan tera tera ulang penanganan khusus |
| 3726.AEC | | Kerja sama |
| | 132 | Implementasi Kerja sama di bidang metrologi legal |
| 3726.BIC | | Pengawasan dan Pengendalian Lembaga |
| | 133 | Tindak lanjut pengawasan metrologi legal |
| 3726.QIA | | Pengawasan dan Pengendalian Produk |
| | 134 | UTTP yang diawasi |
| | 135 | BDKT yang diawasi |
| 3726.UAC | | Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara |
| | 136 | SDM Metrologi Legal yang diuji dan dibina |
| 3727.QIA | | Pengawasan dan Pengendalian Produk |
| | 137 | Pengawasan Barang Beredar di Pasar |
| 3733.ACA | | Perizinan Produk |
| | 138 | Sertifikat Sistem Mutu Yang Dipertahankan (ISO 9001, ISO 37001, dan ISO 17043) |
| 3733.BAH | | Pelayanan Publik Lainnya |
| | 139 | Layanan Standardisasi dan Pengendalian Mutu |
| 3733.BDC | | Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat |
| | 140 | Pemangku Kepentingan yang Dibina |
| 3734.CCH | | OP Sarana Bidang Industri dan Perdagangan |
| | 141 | Ruang Lingkup Pelayanan Kalibrasi Yang Dipelihara dan Dikembangkan |
| 3734.PDC | | Sertifikasi Produk |
| | 142 | Layanan Kalibrasi |
| 3735.ADC | | Sertifikasi Produk |
| | 143 | Sertifikasi Produk Tipe 5 Dalam Negeri |
| | 144 | Sertifikasi Produk Tipe 5 Luar Negeri |
| | 145 | Sertifikasi Produk Tipe 1 Dalam Negeri |
| | 146 | Sertifikasi Produk Tipe 1 Luar Negeri |
| 3735.ADI | | Sertifikasi Profesi dan SDM |
| | 147 | Sertifikasi Person |
| 3735.BJA | | Penyidikan dan Pengujian Produk |
| | 148 | Survaijen Terhadap Pelanggan |
| 3992.AEF | | Sosialisasi dan Diseminasi |
| | 149 | Pelaku usaha yang diedukasi |
| 3992.BIC | | Pengawasan dan Pengendalian Lembaga |
| | 150 | Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Kegiatan Perdagangan |
| 3992.QIA | | Pengawasan dan Pengendalian Produk |
| | 151 | Pengawasan Post Border |
| 3992.QIC | | Pengawasan dan Pengendalian Lembaga |

| Kode | No | Uraian |
|-----------------|-----------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| | 152 | Pengawasan Kegiatan Perdagangan |
| 090.11 | | Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perdagangan |
| 3707.FAC | | Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara |
| | 153 | Pelatihan Teknis Bidang Perdagangan bagi Aparatur Daerah |
| 3723.SBA | | 090_Kemendag'!D158= |
| | 154 | Pendidikan Vokasi D3 Metrologi dan Instrumentasi |
| 3723.UAB | | Sistem Informasi Pemerintahan |
| | 155 | Pengelolaan Sistem Informasi Pemerintahan |
| 3756.PDI | | Sertifikasi Profesi dan SDM |
| | 156 | Layanan Sertifikasi Profesi Metrologi, Mutu dan Jasa Perdagangan |
| 3756.SCF | | Pelatihan Bidang Ekonomi dan Keuangan |
| | 157 | Masyarakat yang mengikuti Pelatihan SDM Eksport |
| | 158 | Masyarakat yang mengikuti Pelatihan SDM Jasa Perdagangan |
| | 159 | Masyarakat yang mengikuti Pelatihan SDM Metrologi |
| | 160 | Masyarakat yang mengikuti Pelatihan SDM Mutu |
| 6900.ADI | | Sertifikasi Profesi dan SDM |
| | 161 | Uji Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional Perdagangan |

48. Kementerian Negara/Lembaga: Kementerian Pemuda dan Olahraga (092)

| Kode | No | Uraian |
|-----------------|-----------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| 092.01 | | Kementerian Pemuda Dan Olah Raga |
| 3829.PDI | | Sertifikasi Profesi dan SDM |
| | 1 | Tenaga Keolahragaan Cabang Olahraga DBON yang Bersertifikat Nasional dan Internasional |
| | 2 | Pelatih Cabang Olahraga DBON yang bersertifikat Nasional dan Internasional |
| 3829.PEA | | Koordinasi |
| | 3 | Koordinasi Cabor Pusat dan Daerah yang Terstandardisasi |
| | 4 | Pembinaan dan Pengelolaan ASN Jabatan Fungsional Pelatih Olahraga dan Asisten Pelatih Olahraga |

49. Kementerian Negara/Lembaga: Komisi Pemberantasan Korupsi (093)

| Kode | No | Uraian |
|-----------------|----|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 093.01 | | Komisi Pemberantasan Korupsi |
| 3845.BIB | | Pengawasan dan Pengendalian Masyarakat |
| | 1 | Pendaftaran LHKPN |
| | 2 | Hasil Analisis Pemeriksaan LHKPN |
| 3846.BKC | | Pemantauan lembaga |
| | 3 | Ketetapan Status Gratifikasi |
| | 4 | Monitoring dan Evaluasi Implementasi Pengendalian Gratifikasi |
| | 5 | Rekomendasi Perbaikan Sistem Penyelenggaraan Pelayanan Publik |
| 6566.ADI | | Sertifikasi Profesi dan SDM |
| | 6 | Sertifikasi Profesi dan Kompetensi Penyuluhan Antikorupsi |
| | 7 | Sertifikasi Profesi dan Kompetensi Ahli Pembangun Integritas |
| 6567.BKC | | Pemantauan lembaga |
| | 8 | Rekomendasi Kebijakan Pencegahan Korupsi |
| | 9 | Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Rekomendasi Kebijakan |

50. Kementerian Negara/Lembaga: Dewan Perwakilan Daerah (095)

| Kode | No | Uraian |
|-----------------|----|--|
| 1 | 2 | 3 |
| 095.02 | | Dewan Perwakilan Daerah |
| 7983.BMB | | Komunikasi Publik |
| | 1 | Kegiatan Anggota DPD RI pada Masa Kegiatan di Daerah (Masa Reses) |
| | 2 | Kunjungan Kerja Perseorangan di Daerah Pemilihan (Kundapil) oleh Anggota DPD |

51. Kementerian Negara/Lembaga: Komisi Yudisial RI (100)

| Kode | No | Uraian |
|-----------------|----|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 100.01 | | Komisi Yudisial RI |
| 3866.BIB | | Pengawasan dan Pengendalian Masyarakat |
| | 1 | Investigasi Penanganan Dugaan Pelanggaran Kode Etik |
| | 2 | Investigasi Pendalaman Kasus |
| | 3 | Penelusuran rekam jejak hakim dan CHA |
| | 4 | Investigasi Pencegahan Pelanggaran Disiplin dan Etik |
| 3871.BIB | | Pengawasan dan Pengendalian Masyarakat |
| | 5 | Penanganan Pendahuluan Laporan Masyarakat terhadap Pelanggaran KEPPH |
| | 6 | Penyelenggaraan Kegiatan Penanganan Lanjutan Atas Dugaan Pelanggaran KEPPH |
| | 7 | Laporan Hasil Pemantauan Persidangan |
| 3872.AEA | | Koordinasi |
| | 8 | Advokasi Represif |
| 3872.PDG | | Standarisasi Profesi dan SDM |
| | 9 | Pelatihan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) serta teknis hukum dan peradilan |

52. Kementerian Negara/Lembaga: Badan Nasional Penanggulangan Bencana - BNPB (103)

| Kode | No | Uraian |
|-----------------|-----------|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 103.01 | | Badan Nasional Penanggulangan Bencana |
| 3873.AEC | | Kerja sama |
| | 1 | Kesepakatan Kerja sama bidang Penanggulangan Bencana |
| 3878.AFA | | Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria |
| | 2 | NSPK Bidang Pendidikan dan Pelatihan PB |
| 3878.SCK | | Pelatihan Bidang Pencarian, Pertolongan, dan Penanganan Bencana |
| | 3 | Pendidikan dan Pelatihan Teknis PB bagi Fasilitator Nasional |
| 3879.AFA | | Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria |
| | 4 | Penyusunan Petunjuk Teknis Pengawasan Internal |
| 3880.AFA | | Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria |
| | 5 | Penyusunan Pedoman |
| 3882.FBA | | Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah |
| | 6 | Pendampingan Penyusunan Rencana Kontingensi dan RPKB |
| 3882.UBB | | Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Desa |
| | 7 | Penguatan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana |
| 3884.AFA | | Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria |
| | 8 | NSPK Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Prasarana Fisik |
| 3884.UBA | | Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah |
| | 9 | Pendampingan Pemulihan Bidang Fisik di Wilayah Terdampak Bencana Masif |
| 3885.AEH | | Promosi |
| | 10 | Kegiatan Promosi Terhadap Kelompok Terdampak Bencana |
| 3885.QAH | | Pelayanan Publik Lainnya |
| | 11 | Layanan Fasilitasi Pemulihan dan Peningkatan Bidang Sosial di Daerah Pascabencana |
| | 12 | Layanan Fasilitasi Pemulihan dan Peningkatan Bidang Ekonomi di Daerah Pascabencana |
| | 13 | Layanan Fasilitasi Pemulihan dan Peningkatan Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan di Daerah Pascabencana |
| 3888.ABS | | Kebijakan Bidang Ketahanan bencana dan perubahan iklim |
| | 14 | Indeks Pemulihan Pascabencana |
| 3888.UAC | | Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara |
| | 15 | Pendamping Petugas Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (Jitupasna) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana |
| 3891.AFA | | Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria |
| | 16 | NSPK Bidang Dukungan Sumber daya Darurat |
| 3893.BMA | | Data dan Informasi Publik |
| | 17 | Peningkatan Komunikasi Bencana |
| 4279.AFA | | Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria |
| | 18 | Pedoman Penilaian Risiko Kecurangan |
| 4281.AFA | | Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria |
| | 19 | NSPK Bidang Pengembangan Strategi Penanggulangan Bencana |
| 4281.PBS | | Kebijakan Bidang Ketahanan bencana dan perubahan iklim |
| | 20 | Analisis Pengembangan Strategi Penanggulangan Bencana |
| 4282.AFA | | Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria |
| | 21 | NSPK Bidang Kebencanaan |
| 4284.AEA | | Koordinasi |
| | 22 | Penguatan Sistem Peringatan Dini |
| 4284.AFA | | Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria |
| | 23 | NSPK Bidang Peringatan Dini terkait Pedoman Peralatan Peringatan Dini Banjir |
| 4285.FBA | | Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah |

| Kode | No | Uraian |
|-----------------|-----------|---|
| 1 | 2 | 3 |
| | 24 | Pembinaan Penyelenggaraan Pemulihan Segera Prasarana dan Sarana Vital pada saat Keadaan Darurat Bencana |
| 4286.UAC | | Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara |
| | 25 | Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas dalam Penanganan Pengungsi |
| 4287.AFA | | Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria |
| | 26 | Penyusunan Pedoman Pemanfaatan Sistem Manajemen Pusdalops |
| 4287.BHC | | Operasi Bidang Pencarian, Pertolongan, dan Penanganan Bencana |
| | 27 | Layanan Pengendalian Operasi |
| 4287.UAC | | Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara |
| | 28 | Pendampingan Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana dan Keposkoan |
| 4289.AFA | | Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria |
| | 29 | NSPK Bidang Optimasi Jaringan Logistik dan Peralatan |

53. Kementerian Negara/Lembaga: Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah - LKPP (106)

| Kode | No | Uraian |
|-----------------|-----------|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 106.01 | | Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah |
| 6319.ABL | | Kebijakan Bidang Tata Kelola Pemerintahan |
| | 1 | Rekomendasi Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum |
| 6320.FAE | | Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan |
| | 2 | Rekomendasi Hasil Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Kinerja PBJP |
| 6321.ADI | | Sertifikasi Profesi dan SDM |
| | 3 | Peserta Sertifikasi SDM PBJ |
| 6321.AFA | | Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria |
| | 4 | Pedoman Sertifikasi PBJP |
| | 5 | Program dan Kurikulum Pelatihan PBJ |
| | 6 | Pedoman Pelatihan PBJ |
| 6321.CAA | | Sarana Bidang Pendidikan |
| | 7 | Media Pembelajaran Berbasis TIK |
| 6321.CCL | | OM Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi |
| | 8 | Sarana Sertifikasi PBJP |
| 6321.DCF | | Pelatihan Bidang Ekonomi dan Keuangan |
| | 9 | Sumber Daya Manusia yang mendapatkan Pelatihan Perancang Kebijakan PBJ |
| 6322.BCE | | Penanganan Perkara |
| | 10 | Perkara/Permasalahan PBJ yang Terlayani |
| 6322.FAI | | Peningkatan Manajemen Lembaga Pemerintahan |
| | 11 | Kementerian/Lembaga yang Terbangun Kapabilitas untuk Melaksanakan Clearing House |
| | 12 | Pemda yang Terbangun Kapabilitas untuk Melaksanakan Clearing House |
| | 13 | Instansi/Stakeholder yang Mendapatkan Pembinaan dalam Dukungan Penegakan Hukum dan Penyelesaian Permasalahan PBJ |
| 6323.FAI | | Peningkatan Manajemen Lembaga Pemerintahan |
| | 14 | Kementerian/Lembaga yang Mendapatkan Advokasi dalam rangka Peningkatan Penggunaan PDN dan Pemberdayaan UMK dalam Proses PBJ |
| | 15 | Pemerintah Daerah yang Mendapatkan Advokasi dalam rangka Peningkatan Penggunaan PDN dan Pemberdayaan UMK dalam Proses PBJ |

54. Kementerian Negara/Lembaga: Badan SAR Nasional (107)

| Kode | No | Uraian |
|-----------------|-----------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| 107.01 | | Badan SAR Nasional |
| 3972.BKA | | Pemantauan masyarakat dan kelompok masyarakat |
| | 1 | Siaga SAR Khusus Lebaran di Kantor SAR untuk Wilayah Barat |
| | 2 | Siaga SAR Khusus Lebaran di Kantor SAR untuk Wilayah Tengah |
| | 3 | Siaga SAR Khusus Lebaran di Kantor SAR untuk Wilayah Timur |
| 6931.DCK | | Pelatihan Bidang Pencarian, Pertolongan, dan Penanganan Bencana |
| | 4 | Diklat SAR di Permukaan Air |

55. Kementerian Negara/Lembaga: Ombudsman RI (110)

| Kode | No | Uraian |
|-----------------|----|--|
| 1 | 2 | 3 |
| 110.01 | | Ombudsman Republik Indonesia |
| 5618.BAH | | Pelayanan Publik Lainnya |
| | 1 | Akses Pengaduan Pelayanan Publik |
| 5618.QAA | | Pelayanan Publik kepada masyarakat |
| | 2 | Laporan/Pengaduan Masyarakat ke Ombudsman RI Pusat yang Diselesaikan |
| | 3 | Laporan/Pengaduan Masyarakat ke Ombudsman RI Perwakilan yang Diselesaikan |
| 5619.BIC | | Pengawasan dan Pengendalian Lembaga |
| | 4 | Penyelenggara Pelayanan Publik bagi Kelompok Marjinal dan bagi Masyarakat di Daerah Terluar, Terdepan, Tertinggal (3T) yang Dilakukan Pendampingan |
| 5619.QIC | | Pengawasan dan Pengendalian Lembaga |
| | 5 | Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kementerian/Lembaga |
| 5619.QIE | | Pengawasan dan Pengendalian Pemerintah Daerah |
| | 6 | Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pemerintah Daerah |
| 5731.BIC | | Pengawasan dan Pengendalian Lembaga |
| | 7 | Unit Kerja yang Dilakukan Penjaminan Mutu Penyelesaian Laporan |
| | 8 | Unit Kerja yang Dilakukan Penjaminan Mutu Terkait Pencegahan Maladministrasi |

56. Kementerian Negara/Lembaga: Badan Nasional Pengelola Perbatasan-BNPP (111)

| Kode | No | Uraian |
|-----------------|----|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 111.01 | | Badan Nasional Pengelola Perbatasan |
| 4592.ABE | | Kebijakan Bidang Pertahanan dan Keamanan |
| | 1 | Penyusunan Rencana Aksi Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan |

57. Kementerian Negara/Lembaga: Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam - BPKPB Batam (112)

| Kode | No | Uraian |
|-----------------|-----------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| 112.01 | | Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam (Bpkpb Batam) |
| 5126.CCB | | OP Sarana Bidang Kesehatan |
| | 1 | Pemeliharaan Gedung Instalasi Perawatan dan Kantor |
| 5127.CDK | | OP Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup |
| | 2 | Pemeliharaan dan Perawatan Pertamanan BP Batam |
| 5130.CDN | | OM Prasarana Bidang Pariwisata dan Kebudayaan |
| | 3 | Pemeliharaan Aset Kawasan Agrowisata Sei Temiang |
| | 4 | Pemeliharaan Kawasan Wisata Galang |
| 5134.BHC | | Operasi Bidang Penanggulangan Bencana |
| | 5 | Penanggulangan Bahaya Kebakaran di Wilayah Kerja BP Batam |

58. Kementerian Negara/Lembaga: Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (113)

| Kode | No | Uraian |
|-----------------|-----------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| 113.01 | | Badan Nasional Penanggulangan Terorisme |
| 5096.BHB | | Operasi Bidang Keamanan |
| | 1 | Assesmen Sistem Pengamanan Terhadap Fasilitas Publik dari Tindak Pidana Terorisme |
| 5097.BHB | | Operasi Bidang Keamanan |
| | 2 | Operasi Intelijen Jaringan Terorisme |
| | 3 | Operasi Intelijen Siber dan Teknologi Informasi |
| 5097.PEA | | Koordinasi |
| | 4 | Kegiatan Kesiapsiagaan Nasional |
| 5098.ABE | | Kebijakan Bidang Pertahanan dan Keamanan |
| | 5 | Partisipasi Aktif BNPT di Forum Penanggulangan Terorisme Internasional serta Penguatan Perangkat Hukum Internasional, dan Perlindungan WNI dan BHI dari Ancaman Terorisme di Luar Negeri |
| 5098.AEC | | Kerja sama |
| | 6 | Kerja Sama Bilateral Dalam Penanggulangan Terorisme |
| | 7 | Kerja Sama Regional dan Multilateral Dalam Penanggulangan Terorisme |

59. Kementerian Negara/Lembaga: Badan Pengawas Pemilihan Umum (115)

| Kode | No | Uraian |
|-----------------|----|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 115.01 | | Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum |
| 7014.QIC | | Pengawasan dan Pengendalian Lembaga |
| | 1 | Hasil Pengawasan DPT Berkelanjutan di Pusat |

60. Kementerian Negara/Lembaga: Televisi RI (117)

| Kode | No | Uraian |
|-----------------|-----------|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 117.01 | | Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia |
| 5153.BAH | | Pelayanan Publik Lainnya |
| | 1 | Layanan Promo |
| | 2 | Konten Media Baru |
| 5155.BAH | | Pelayanan Publik Lainnya |
| | 3 | Siaran Berita, Current Affairs dan Olahraga |
| | 4 | Siaran Program dan Promosi Acara |

61. Kementerian Negara/Lembaga: Badan Keamanan Laut (119)

| Kode | No | Uraian |
|-----------------|----|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 119.01 | | Badan Keamanan Laut |
| 5735.BHB | | Operasi Bidang Keamanan |
| | 1 | Patroli Udara Maritim |
| 5735.QHB | | Operasi Bidang Keamanan |
| | 2 | Patroli Mandiri |

62. Kementerian Negara/Lembaga: Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (122)

| Kode | No | Uraian |
|-----------------|-----------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| 122.01 | | Badan Pembinaan Ideologi Pancasila |
| 6926.ABN | | Kebijakan Bidang Sosial |
| | 1 | Rekomendasi Hubungan Kerjasama Pembinaan Ideologi Pancasila |
| | 2 | Rekomendasi Hasil Pembudayaan Nilai-Nilai Pancasila |
| 6926.QDD | | Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat |
| | 3 | Fasilitasi Pembinaan Relawan Gerakan Kebajikan Pancasila |
| 6926.QMB | | Komunikasi Publik |
| | 4 | Layanan Sosialisasi Ideologi Pancasila |
| | 5 | Layanan Komunikasi Ideologi Pancasila |
| 6927.ABD | | Kebijakan Bidang Hukum dan HAM |
| | 6 | Rekomendasi Hasil Advokasi Pembinaan Ideologi Pancasila terhadap Organisasi Sosial dan Politik serta Komponen Masyarakat Lainnya |
| 6927.PBD | | Kebijakan Bidang Hukum dan HAM |
| | 7 | Rekomendasi Hasil Analisis dan Penyelarasan Rancangan Produk Hukum Yang Bertentangan Dengan Nilai Pancasila |
| | 8 | Rekomendasi Hasil Pengawasan Kebijakan dan Regulasi Yang Selaras Dengan Nilai Pancasila |
| 6928.ABN | | Kebijakan Bidang Sosial |
| | 9 | Rekomendasi Hasil Kajian Implementasi Pembinaan Ideologi Pancasila |
| 6929.PDI | | Sertifikasi Profesi dan SDM |
| | 10 | Sertifikasi Pengajar Diklat Pembinaan Ideologi Pancasila |
| 6929.SCJ | | Pelatihan Bidang Sosial |
| | 11 | Peserta Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila |
| 6930.ABC | | Kebijakan Bidang Politik |
| | 12 | Rekomendasi Hasil Pengendalian Pembinaan Ideologi Pancasila |
| | 13 | Rekomendasi Hasil Evaluasi Pembinaan Ideologi Pancasila |
| 6930.PBC | | Kebijakan Bidang Politik |
| | 14 | Rekomendasi Hasil Pengukuran Pelembagaan Pancasila |
| 6930.PBN | | Kebijakan Bidang Sosial |
| | 15 | Rekomendasi Hasil Pengukuran Indeks Aktualisasi Pancasila |

63. Kementerian Negara/Lembaga: Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
(123)

| Kode | No | Uraian |
|-----------------|----|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 123.01 | | Sekretariat Jenderal |
| 7012.AEC | | Kerja sama |
| | 1 | Kerjasama |

64. Kementerian Negara/Lembaga: Badan Riset dan Inovasi Nasional (124)

| Kode | No | Uraian |
|-----------------|----|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 124.01 | | Badan Riset Dan Inovasi Nasional |
| 6680.QEJ | | Bantuan Pendidikan Tinggi |
| | 1 | Peserta Program Mobilitas Talenta Riset dan Inovasi |
| 6683.QDB | | Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga |
| | 2 | Mitra Pemanfaatan Riset dan Inovasi pada Industri |

65. Kementerian Negara/Lembaga: Badan Pangan Nasional (125)

| Kode | No | Uraian |
|-----------------|----|--|
| 1 | 2 | 3 |
| 125.01 | | Badan Pangan Nasional |
| 6874.AEC | | Kerja sama |
| | 1 | Kerja Sama Bidang Pangan |
| 6875.QDD | | Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat |
| | 2 | Pangan yang Terdistribusi |
| 6875.QMA | | Data dan Informasi Publik |
| | 3 | Data dan Informasi Ketersediaan Pangan |
| | 4 | Data dan Informasi Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan |
| 6876.QMA | | Data dan Informasi Publik |
| | 5 | Data dan Informasi Pengendalian Kerawanan Pangan |
| | 6 | Data dan Informasi Kewaspadaan Pangan |
| 6877.ABR | | Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan |
| | 7 | Rekomendasi Kebijakan Keamanan, Mutu, Gizi, Label dan Iklan Pangan |
| 6877.QMA | | Data dan Informasi Publik |
| | 8 | Data Situasi Konsumsi Pangan |

66. Kementerian Negara/Lembaga: Badan Karantina Indonesia (127)

| Kode | No | Uraian |
|-----------------|-----------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| 127.01 | | Badan Karantina Indonesia |
| 7003.PDC | | Sertifikasi Produk |
| | 1 | Layanan Sertifikasi Kesehatan Karantina Ikan |

67. Kementerian Negara/Lembaga: Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (129)

| Kode | No | Uraian |
|-----------------|----|--|
| 1 | 2 | 3 |
| 129.01 | | Kementerian Koordinator Bidang Politik Dan Keamanan |
| 7385.EBA | | Layanan Dukungan Manajemen Internal |
| | 1 | Pengarusutamaan Gender |

68. Kementerian Negara/Lembaga: Kementerian Hukum (135)

| Kode | No | Uraian |
|-----------------|----|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 135.11 | | Badan Pembinaan Hukum Nasional |
| 7136.QBA | | Layanan Bantuan Hukum Perseorangan |
| | 1 | Kegiatan Bantuan Hukum Litigasi |
| 7136.QBC | | Layanan Bantuan Hukum Kelompok Masyarakat |
| | 2 | Kegiatan Bantuan Hukum Non Litigasi |
| 135.13 | | Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum |
| 7144.EBC | | Layanan Manajemen SDM Internal |
| | 3 | Pendidikan Taruna Tk II Jurusan Ilmu Pemasyarakatan |
| | 4 | Pendidikan Taruna Tingkat III Jurusan Ilmu Pemasyarakatan |
| | 5 | Pendidikan Taruna Tk IV Jurusan Ilmu Pemasyarakatan |
| | 6 | Pendidikan Taruna Tingkat II Jurusan Imigrasi |
| | 7 | Pendidikan Taruna Tingkat III Jurusan Imigrasi |
| | 8 | Pendidikan Taruna Tingkat IV Jurusan Imigrasi |
| | 9 | Masa Basis Calon Taruna |

69. Kementerian Negara/Lembaga: Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (137)

| Kode | No | Uraian |
|-----------------|-----------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| 137.03 | | Direktorat Jenderal Imigrasi |
| 6159.BHB | | Operasi Bidang Keamanan |
| | 1 | Operasi Intelijen Keimigrasian Tingkat Pusat |
| 6159.BHB | | Operasi Bidang Keamanan |
| | 2 | Operasi Gabungan Tingkat Pusat |
| | 3 | Penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian Tingkat Pusat |
| 6159.QHB | | Operasi Bidang Keamanan |
| | 4 | Operasi Mandiri Tingkat Pusat |
| 6161.BHB | | Operasi Bidang Keamanan |
| | 5 | Pengawasan Pengungsi |
| | 6 | Operasi Intelijen Keimigrasian di Wilayah Barat |
| | 7 | Operasi Intelijen Keimigrasian di Wilayah Tengah |
| | 8 | Operasi Intelijen Keimigrasian di Wilayah Timur |
| | 9 | Operasi Gabungan di Wilayah Barat |
| | 10 | Operasi Gabungan di Wilayah Tengah |
| | 11 | Operasi Gabungan di Wilayah Timur |
| | 12 | Penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian di Wilayah Barat |
| | 13 | Penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian di Wilayah Tengah |
| | 14 | Penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian di Wilayah Timur |
| 6161.BIF | | Pengawasan dan Pengendalian Layanan |
| | 15 | Pemeriksaan Keimigrasian Non Reguler Wilayah Barat |
| | 16 | Pemeriksaan Keimigrasian Non Reguler Wilayah Tengah |
| | 17 | Pemeriksaan Keimigrasian Non Reguler Wilayah Timur |
| 6161.QHB | | Operasi Bidang Keamanan |
| | 18 | Operasi Mandiri di Wilayah |
| 137.04 | | Direktorat Jenderal Pemasyarakatan |
| 6166.AEC | | Kerja sama |
| | 19 | Penyusunan Naskah Kerja Sama Bidang Pemasyarakatan |
| 6169.BIF | | Pengawasan dan Pengendalian Layanan |
| | 20 | Pengawasan dan Pengendalian Kode Etik Pemasyarakatan |
| | 21 | Penyelesaian Pengaduan Layanan Pemasyarakatan |
| 6170.BDC | | Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat |
| | 22 | Layanan Pendampingan Peradilan Anak |
| | 23 | Pembimbingan dan Pengawasan |
| | 24 | Rekomendasi Program Pembinaan dan Pelayanan |
| 6170.BHB | | Operasi Bidang Keamanan |
| | 25 | Operasi Penanganan Gangguan Keamanan dan Ketertiban di Wilayah |
| | 26 | Operasi Keamanan dan Ketertiban |

70. Kementerian Negara/Lembaga: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (138)

| Kode | No | Uraian |
|-----------------|-----------|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 138.01 | | Sekretariat Jenderal |
| 7575.QEK | | Bantuan Pendidikan Dasar dan Menengah |
| | 1 | Siswa SD/Paket A Yang Mendapatkan Program Indonesia Pintar |
| | 2 | Siswa SMP/Paket B Yang Mendapatkan Program Indonesia Pintar |
| | 3 | Siswa SMA/Paket C Yang Mendapatkan Program Indonesia Pintar |
| | 4 | Siswa SMK Yang Mendapatkan Program Indonesia Pintar |
| 7576.QMB | | Komunikasi Publik |
| | 5 | Layanan Penguatan Karakter Peserta Didik |
| | 6 | Layanan Penguatan Karakter Iklim Keamanan Satuan Pendidikan |
| | 7 | Layanan Penguatan Karakter Inklusivitas Satuan Pendidikan |
| 138.02 | | Inspektorat Jenderal |
| 7591.EBD | | Layanan Manajemen Kinerja Internal |
| | 8 | Layanan Reviu Inspektorat I |
| | 9 | Layanan Pengawasan Dana Transfer Daerah Inspektorat I |
| | 10 | Layanan Pengawasan WBK/WBBM Inspektorat I |
| | 11 | Layanan Pengawasan SPIP Inspektorat I |
| 7592.EBD | | Layanan Manajemen Kinerja Internal |
| | 12 | Layanan Reviu Inspektorat II |
| | 13 | Layanan Pengawasan Dana Transfer Daerah Inspektorat II |
| | 14 | Layanan Pengawasan WBK/WBBM Inspektorat II |
| | 15 | Layanan Pengawasan SPIP Inspektorat II |
| 7593.EBD | | Layanan Manajemen Kinerja Internal |
| | 16 | Layanan Reviu Inspektorat III |
| | 17 | Layanan pengawasan WBK/WBBM Inspektorat III |
| | 18 | Layanan pengawasan SPIP Inspektorat III |
| 7594.EBA | | Layanan Dukungan Manajemen Internal |
| | 19 | Pencegahan Korupsi dan Penanganan Kekerasan |
| | 20 | Tindak Lanjut Hasil Pengawasan |
| 7683.EBD | | Layanan Manajemen Kinerja Internal |
| | 21 | Layanan Penanganan Pengaduan |
| 138.03 | | Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan, Dan Pendidikan Guru |
| 7570.QDC | | Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat |
| | 22 | Guru PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Difasilitasi dalam Pengembangan Karir |
| | 23 | Guru PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Memperoleh Penghargaan |
| 7570.UBA | | Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah |
| | 24 | Penataan Guru PAUD dan Pendidikan Nonformal |
| 7614.SCI | | Pelatihan Bidang Pendidikan |
| | 25 | Guru yang mengikuti Program Pendidikan Kepemimpinan Sekolah |
| 7615.QDC | | Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat |
| | 26 | Guru Dikdas yang Difasilitasi dalam Pengembangan Karir |
| | 27 | Guru Dikdas yang Memperoleh Penghargaan |
| 7615.UBA | | Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah |
| | 28 | Penataan Guru Dikdas |
| 7616.QDC | | Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat |
| | 29 | Guru Dikmen dan Diksus yang Difasilitasi dalam Pengembangan Karir |
| | 30 | Guru Dikmen dan Diksus yang Memperoleh Penghargaan |
| 7616.UBA | | Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah |
| | 31 | Penataan Guru Dikmen dan Diksus |
| 7618.QDC | | Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat |

| Kode | No | Uraian |
|-----------------|-----------|---|
| 1 | 2 | 3 |
| | 32 | Tenaga Kependidikan yang Difasilitasi dalam Pengembangan Karir |
| | 33 | Kepala sekolah, Pengawas sekolah, dan Tenaga Kependidikan yang Memperoleh Penghargaan |
| 138.04 | | Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Dan Pendidikan Menengah |
| 7600.QDB | | Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga |
| | 34 | Satuan PAUD yang menerapkan Kurikulum dan Model Pembelajaran yang berlaku |
| | 35 | Satuan PAUD Menyelenggarakan Pendekatan Holistik Integratif |
| | 36 | Satuan PAUD yang melaksanakan program UKS |
| 7601.QDB | | Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga |
| | 37 | SD yang Mendapatkan Penguatan Pendidikan Karakter |
| | 38 | SD yang Melaksanakan Program UKS |
| | 39 | SD Yang Menerapkan Kurikulum Yang Berlaku |
| 7602.QDB | | Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga |
| | 40 | SMP yang Mendapatkan Penguatan Pendidikan Karakter |
| | 41 | SMP yang Melaksanakan Program UKS |
| | 42 | SMP Yang Menerapkan Kurikulum yang berlaku |
| 7603.QDB | | Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga |
| | 43 | Prov/Kab/Kota yang Mendapatkan Penguatan Pendidikan Karakter jenjang SMA |
| | 44 | Prov/Kab/Kota yang melaksanakan program UKS pada jenjang SMA |
| | 45 | Prov/Kab/Kota yang mendapatkan pendampingan implementasi Kurikulum yang berlaku jenjang SMA |
| 138.05 | | Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, Dan Pendidikan Layanan Khusus |
| 7571.QDB | | Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga |
| | 46 | SMK yang Melaksanakan Program UKS |
| 7572.QDB | | Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga |
| | 47 | Satuan Pendidikan Khusus yang Melaksanakan Program UKS |
| | 48 | Satuan Pendidikan Khusus Yang Menerapkan Kurikulum dan Model Pembelajaran Yang Berlaku |
| 7620.PDI | | Sertifikasi Profesi dan SDM |
| | 49 | Siswa SMK yang Tersertifikasi Terhadap Kompetensi yang Relevan dengan Kebutuhan Dunia Kerja |
| | 50 | Siswa SMK yang Mendapatkan Penguatan Akses Kebekerjaan Luar Negeri |
| 7620.PEC | | Kerja sama |
| | 51 | Kerja Sama antara SMK dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri |
| 7620.QDB | | Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga |
| | 52 | SMK yang Mengembangkan Proyek Kreatif dan Kewirausahaan |
| 7622.QDC | | Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat |
| | 53 | Anak Usia Sekolah tidak Sekolah memperoleh Pendidikan Kecakapan Kerja |
| | 54 | Anak Usia Sekolah tidak Sekolah memperoleh Pendidikan Kecakapan Wirausaha |
| 7623.PBH | | Kebijakan Bidang IPTEK, Pendidikan dan Kebudayaan |
| | 55 | Inovasi model pembelajaran vokasi mengacu pada dunia kerja |
| 7623.PEC | | Kerja sama |
| | 56 | Satuan pendidikan vokasi yang bermitra dengan Dunia kerja |
| 7835.QDB | | Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga |
| | 57 | Sekolah Yang Menyelenggarakan Program Pendidikan Inklusif |
| 7835.QDC | | Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat |
| | 58 | Orang Dewasa Yang Mendapat Layanan Pendidikan Keaksaraan |
| 138.11 | | Badan Standar, Kurikulum Dan Asesmen Pendidikan |
| 7607.PBH | | Kebijakan Bidang IPTEK, Pendidikan dan Kebudayaan |
| | 59 | Bahan Kebijakan Hasil Asesmen Pendidikan |
| | 60 | Soal yang Dikembangkan |
| | 61 | Model Asesmen Pendidikan |
| 7607.QDB | | Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga |

| Kode | No | Uraian |
|-----------------|-----------|---|
| 1 | 2 | 3 |
| | 62 | Satuan Pendidikan yang Melaksanakan Asesmen |
| 7609.ABH | | Kebijakan Bidang IPTEK, Pendidikan dan Kebudayaan |
| | 63 | Bahan Kebijakan Kurikulum yang esensial |
| 7609.PBH | | Kebijakan Bidang IPTEK, Pendidikan dan Kebudayaan |
| | 64 | Model Kurikulum yang adaptif dan kontekstual |
| 7609.PDI | | Sertifikasi Profesi dan SDM |
| | 65 | Tim Pengembang Kurikulum yang berkompeten |
| 7609.QMA | | Data dan Informasi Publik |
| | 66 | Sistem Informasi Kurikulum |
| 7610.ABH | | Kebijakan Bidang IPTEK, Pendidikan dan Kebudayaan |
| | 67 | Bahan Kebijakan Perbukuan yang Dikembangkan |
| 7610.PDI | | Sertifikasi Profesi dan SDM |
| | 68 | SDM Perbukuan yang Terbina |
| 7611.PBH | | Kebijakan Bidang IPTEK, Pendidikan dan Kebudayaan |
| | 69 | Bahan Kebijakan Isu Strategis Pendidikan |
| | 70 | Rapor Pendidikan yang dikembangkan |
| | 71 | Standar Nasional Pendidikan yang Dikembangkan |
| 138.12 | | Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa |
| 7566.QDC | | Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat |
| | 72 | Penutur Bahasa Daerah Terfasilitasi Program Pelindungan Bahasa Daerah |
| 7567.BMA | | Data dan Informasi Publik |
| | 73 | Istrumen Kemahiran Bahasa Indonesia yang Tersusun |
| 7567.QDD | | Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat |
| | 74 | Komunitas Literasi yang difasilitasi dan diapresiasi |
| | 75 | Komunitas Sastra yang difasilitasi dan diapresiasi |
| 7569.QMA | | Data dan Informasi Publik |
| | 76 | Produk Penerjemahan |

71. Kementerian Negara/Lembaga: Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (139)

| Kode | No | Uraian |
|-----------------|----|--|
| 1 | 2 | 3 |
| 139.03 | | Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi |
| 7726.QEJ | | Bantuan Pendidikan Tinggi |
| | 1 | Mahasiswa Mengembangkan Inovasi Wirausaha |
| | 2 | Mahasiswa Mengikuti Pembelajaran dan Pemberdayaan Masyarakat |
| 7726.SBA | | Pendidikan Tinggi |
| | 3 | Mahasiswa Mendapatkan Pembinaan Kreativitas, Minat, dan Bakat |
| 7727.PDE | | Akreditasi Lembaga |
| | 4 | Perguruan Tinggi/Prodi yang Diakreditasi (BAN-PT) |
| 7727.QEI | | Bantuan Lembaga |
| | 5 | Akselerasi Transformasi Akreditasi Perguruan Tinggi Vokasi |
| 139.04 | | Direktorat Jenderal Riset Dan Pengembangan |
| 7737.QEI | | Bantuan Lembaga |
| | 6 | PT Penerima Bantuan Pendanaan Penelitian Competitive Fund (BOPTN Penelitian) |
| | 7 | PT Penerima Bantuan Pendanaan Penelitian Kerja Sama Luar Negeri dan PUIPT (BOPTN Penelitian) |
| 139.05 | | Direktorat Jenderal Sains Dan Teknologi |
| 7741.SCI | | Pelatihan Bidang Pendidikan |
| | 8 | Pelatihan Pembelajaran Transformatif bagi Dosen LPTK |
| 7743.QEI | | Bantuan Lembaga |
| | 9 | Peningkatan Kualitas Perguruan Tinggi untuk Menyelenggarakan PPG (Revitalisasi LPTK) |

72. Kementerian Negara/Lembaga: Kementerian Kebudayaaan (140)

| Kode | No | Uraian |
|-----------------|-----------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| 140.03 | | Direktorat Jenderal Pelindungan Kebudayaan Dan Tradisi |
| 7407.AFA | | Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria |
| | 1 | NSPK Bidang Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat |
| 7408.AFA | | Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria |
| | 2 | NSPK Bidang Sejarah dan Permuseuman |
| 7410.AFA | | Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria |
| | 3 | NSPK Bidang Internalisasi Nilai Budaya dan Hak Kekayaan intelektual |
| 7411.AFA | | Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria |
| | 4 | NSPK Bidang Pelindungan Warisan Budaya |
| 7412.QDD | | Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat |
| | 5 | Fasilitasi dan Kemitraan Warisan Budaya |
| 140.04 | | Direktorat Jenderal Diplomasi, Promosi Dan Kerjasama Kebudayaan |
| 7415.AFA | | Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria |
| | 6 | NSPK Bidang Diplomasi Kebudayaan |
| 7415.QDD | | Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat |
| | 7 | Fasilitasi Bidang Kebudayaan |
| 7416.AFA | | Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria |
| | 8 | NSPK Bidang Promosi Kebudayaan |
| 7417.AFA | | Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria |
| | 9 | NSPK Bidang Kerja Sama Kebudayaan |
| 140.05 | | Direktorat Jenderal Pengembangan, Pemanfaatan, Dan Pembinaan Kebudayaan |
| 7420.AFA | | Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria |
| | 10 | NSPK Bidang Film, Musik, dan Seni |
| 7421.AFA | | Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria |
| | 11 | NSPK Bidang Pengembangan Sarana dan Prasarana Kebudayaan |
| 7422.AFA | | Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria |
| | 12 | NSPK Bidang Budaya Digital |
| 7423.AFA | | Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria |
| | 13 | SKKNI Bidang Kebudayaan |
| 7424.AFA | | Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria |
| | 14 | NSPK Bidang Penyensoran |

73. Kementerian Negara/Lembaga: Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (142)

| Kode | No | Uraian |
|-----------------|-----------|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 142.01 | | Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal |
| 7160.PDC | | Sertifikasi Produk |
| | 1 | Sertifikat Halal dengan Pernyataan Halal Pelaku Usaha |

74. Kementerian Negara/Lembaga: Kementerian Kehutanan (143)

| Kode | No | Uraian |
|-----------------|-----------|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 143.01 | | Sekretariat Jenderal |
| 7262.BAB | | Pelayanan Publik kepada lembaga |
| | 1 | Layanan Pengembangan Sosial Ekonomi Masyarakat Hutan |
| 143.03 | | Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan |
| 7264.BMA | | Data dan Informasi Publik |
| | 2 | Data dan Informasi Sumber Daya Hutan diwilayah kerja BPKHTL |
| 7268.QAC | | Pelayanan Publik kepada badan usaha |
| | 3 | Hasil Verifikasi PNBP Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKH |
| | 4 | Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan di wilayah BPKH |
| 143.04 | | Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam Dan Ekosistem |
| 7272.PEC | | Kerja sama |
| | 5 | Optimalisasi tata kelola kerja sama penguatan fungsi dan pembangunan strategis di Kawasan Suaka Alam (KSA), Kawasan Pelestarian Alam (KPA), dan Taman Buru (TB) |
| 7273.QDD | | Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat |
| | 6 | Pembinaan dan Pemberdayaan Kelompok Masyarakat |
| 143.05 | | Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Dan Rehabilitasi Hutan |
| 7275.REA | | Konservasi Kawasan/Rehabilitasi Ekosistem |
| | 7 | Pemantauan RHL secara vegetatif oleh masyarakat dan stakeholder lainnya utamanya di DAS yang dipulihkan |
| 143.06 | | Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari |
| 7279.AFA | | Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria |
| | 8 | NSPK Perencanaan Pengelolaan Hutan |
| 7280.AFA | | Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria |
| | 9 | NSPK usaha pemanfaatan hutan, Prosedur dan Kriteria |
| 7281.AFA | | Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria |
| | 10 | NSPK Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan |
| 7282.AFA | | Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria |
| | 11 | NSPK Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan |
| 7283.AFA | | Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria |
| | 12 | NSPK Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan |
| 143.07 | | Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial |
| 7284.BAH | | Pelayanan Publik Lainnya |
| | 13 | Layanan Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial |
| 7284.QDD | | Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat |
| | 14 | Pemolaan Areal Perhutanan Sosial |
| 7286.BAH | | Pelayanan Publik Lainnya |
| | 15 | Layanan Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat |
| 7286.QAH | | Pelayanan Publik Lainnya |
| | 16 | Penanganan konflik tenurial di kawasan hutan |
| 7287.BAH | | Pelayanan Publik Lainnya |
| | 17 | Layanan Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial |
| 7288.BAH | | Pelayanan Publik Lainnya |
| | 18 | Layanan Pengendalian Perhutanan Sosial |

75. Kementerian Negara/Lembaga: Kementerian Lingkungan Hidup / Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (144)

| Kode | No | Uraian |
|-----------------|----|--|
| 1 | 2 | 3 |
| 144.01 | | Kementerian Lingkungan Hidup / Badan Pengendalian Lingkungan Hidup |
| 7508.BDH | | Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha |
| | 1 | Usaha dan/atau kegiatan yang dibina dan difasilitasi terkait penaatan bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup wilayah Kalimantan |
| | 2 | Usaha dan/atau kegiatan yang dibina dan difasilitasi terkait penaatan bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup wilayah Sulawesi dan Maluku |
| 7508.FBA | | Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah |
| | 3 | Pemda yang dibina dan difasilitasi terkait penaatan bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup wilayah Sulawesi dan Maluku |
| | 4 | Pemda yang dibina dan difasilitasi terkait penaatan bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup wilayah Papua |
| 7528.ABJ | | Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup |
| | 5 | Kebijakan dan regulasi pengurangan sampah |

76. Kementerian Negara/Lembaga: Kementerian Pekerjaan Umum (145)

| Kode | No | Uraian |
|-----------------|-----------|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 145.03 | | Direktorat Jenderal Sumber Daya Air |
| 7689.BAH | | Pelayanan Publik Lainnya |
| | 1 | Layanan Teknis Kepatuhan Intern dan Manajemen Risiko |
| 145.04 | | Direktorat Jenderal Bina Marga |
| 7696.CBR | | Dukungan Teknis |
| | 2 | Layanan Penyiapan dan Pengendalian Pelaksanaan |
| 7696.CDC | | OM Prasarana Bidang Konektivitas Darat (Jalan) |
| | 3 | Preservasi Pemeliharaan Rutin Jalan |
| 7696.CDF | | OM Prasarana Bidang Konektivitas Darat (Jembatan) |
| | 4 | Preservasi Rutin Jembatan |
| 7698.ABF | | Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana |
| | 5 | Layanan Keteknikan Bidang Jalan dan Jembatan |
| | 6 | Pembinaan Teknik Bidang Jalan dan Jembatan |
| 145.07 | | Direktorat Jenderal Bina Konstruksi |
| 7761.AFA | | Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria |
| | 7 | Rancangan Standar Kompetensi Kerja Bidang Konstruksi |
| | 8 | Rancangan Materi Kompetensi Konstruksi Strategis dan/atau Percontohan |
| 145.12 | | Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| 7771.EBC | | Layanan Manajemen SDM Internal |
| | 9 | Penilaian Kompetensi |

77. Kementerian Negara/Lembaga: Kementerian Pariwisata (147)

| Kode | No | Uraian |
|-----------------|-----------|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 147.01 | | Kementerian Pariwisata |
| 7210.PEA | | Koordinasi |
| | 1 | Koordinasi Indeks Pembangunan Kepariwisataan Nasional (IPKN) |
| 7211.PEA | | Koordinasi |
| | 2 | Fasilitasi Pengembangan Amenitas dan Aksesibilitas Pariwisata Wilayah I |
| 7212.PEA | | Koordinasi |
| | 3 | Fasilitasi Pengembangan Amenitas dan Aksesibilitas Pariwisata Wilayah II |
| 7214.PEA | | Koordinasi |
| | 4 | Fasilitasi Pengembangan Desa Wisata |
| | 5 | Penerapan Pariwisata Berkelanjutan di Destinasi Pariwisata |
| 7216.PEH | | Promosi |
| | 6 | Promosi Pariwisata di Kawasan Pariwisata Borobudur |
| 7218.AFA | | Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria |
| | 7 | NSPK Standardisasi dan Sertifikasi Usaha Pariwisata |
| 7218.FAB | | Sistem Informasi Pemerintahan |
| | 8 | Platform Standardisasi dan Sertifikasi Usaha |
| 7232.PDI | | Sertifikasi Profesi dan SDM |
| | 9 | Sertifikasi Profesi dan SDM |
| 7233.PDI | | Sertifikasi Profesi dan SDM |
| | 10 | Sertifikasi Profesi dan SDM Poltekpar Palembang |
| 7234.PDI | | Sertifikasi Profesi dan SDM |
| | 11 | Pelaksanaan Sertifikasi Profesi dan SDM Politeknik Pariwisata NHI Bandung |
| 7235.PDI | | Sertifikasi Profesi dan SDM |
| | 12 | Pelaksanaan Sertifikasi Profesi dan SDM Politeknik Pariwisata Bali |
| 7236.PDI | | Sertifikasi Profesi dan SDM |
| | 13 | Pelaksanaan Sertifikasi Profesi dan SDM Poltekpar Lombok |
| 7237.PDI | | Sertifikasi Profesi dan SDM |
| | 14 | Pelaksanaan Sertifikasi Profesi dan SDM Poltekpar Makassar |

78. Kementerian Negara/Lembaga: Kementerian Transmigrasi (152)

| Kode | No | Uraian |
|-----------------|-----------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| 152.03 | | Direktorat Jenderal Pembangunan Dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi |
| 7165.AFA | | Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria |
| | 1 | NSPK dalam Penataan Persebaran Penduduk |
| | 2 | NSPK dalam Pembangunan Kawasan Transmigrasi |
| | 3 | NSPK dalam Pengembangan Kawasan Transmigrasi |
| 7165.QDB | | Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga |
| | 4 | Fasilitasi dan Pembinaan Kelembagaan di Satuan Permukiman dan Pusat SKP |

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PURBAYA YUDHI SADEWA